

Dr. Fridiyanto, M.Pd.I

Dr. Faisal Riza, MA

Dr. Firmansyah, MA

Mengelola **MULTIKULTURALISME**

Agama, Politik, Pendidikan, Sosial dan Budaya

Editor

Dr. Sakti Ritonga, M.Pd

MENGELOLA MULTIKULTURALISME
Agama, Politik, Pendidikan, Sosial dan Budaya

Penulis : Dr. Fridiyanto, M.Pd.I
Dr. Faisal Riza, MA
Dr. Firmansyah, MA

Editor : Dr. Sakti Ritonga, M.Pd

ISBN :

Copyright ©Oktober 2022

Ukuran: 15.5 cm x 23 cm; Hal: x + 160

Isi merupakan tanggung jawab penulis.
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Desainer sampul : An Nuha Zarkasyi

Penata isi : An Nuha Zarkasyi

Cetakan 1, Oktober 2022

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

CV. Literasi Nusantara Abadi

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: penerbitlitnus@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

KATA PENGANTAR EDITOR

Alhamdulillah, editor sangat bersyukur dapat menyelesaikan editing naskah buku yang berjudul, “MENGELOLA MULTIKULTURALISME: Agama, Politik, Pendidikan, Sosial dan Budaya” sehingga dapat hadir ke hadapan para pembaca.

Dalam melakukan kerja editing buku ini, editor juga dapat menikmati dan sambil mempelajari konsep dan praktik multikulturalisme yang dilihat dari aspek: agama, politik, pendidikan, serta sosial dan budaya. Begitu banyak dinamika dan tantangan dalam mengelola multikulturalisme di negara yang bhineka seperti di Indonesia.

Kehadiran buku yang ditulis oleh tiga sarjana ini semoga dapat menambah khasan kajian multikulturalisme. Akhir kata, saya mengucapkan terimakasih kepada para penulis yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk melakukan editing hingga buku ini dapat diterbitkan dan hadir ke para pembaca.

Medan, 6 Oktober 2022

Editor

Dr. Sakti Ritonga, M.Pd

KATA PENGANTAR PENULIS

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillahirabbil'aalamiin. Segala puji penulis haturkan kehadirat Allah SWT sekalian alam, atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan buku ini. Shalawat serta salam senantiasa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi panutan seluruh umat muslim untuk mendapatkan syafaat-Nya. Buku ini akan membahas terkait dengan agama, budaya, politik, pendidikan dan komunikasi multikultural.

Agama merupakan suatu kebutuhan yang mendasar bagi umat manusia, baik itu agama samawi maupun non samawi: agama juga dianggap tidak mampu menjawab kebutuhan manusia, apalagi pada zaman milenial sekarang ini. Di dalam masyarakat modern, agama dijadikan sebuah penunjang untuk kehidupan sehari-hari, bukan untuk kebutuhan yang melekat pada dirinya. Tradisi memeluk suatu agama ini yang telah menjadi sebuah budaya atau *habit* umat manusia sepanjang sejarah umat manusia berada di atas bumi ini.

Tradisi memeluk agama merupakan hal yang paling klasik dan mewarnai umat manusia seluruh dunia. Pada tataran zaman sekarang tercermin pada benua Eropa dan Amerika dengan tradisi memeluk Kristen dengan tradisi kecilnya (*low tradition*) Protestan dan Katolik. Kemudian di Timur Tengah ada tradisi besar memeluk agama Islam dengan tradisi kecilnya adalah Islam Sunni dan Syi'ah. Selanjutnya untuk Asia Timur dan Asia Selatan memiliki tradisi memeluk agama Buddhisme dengan tradisi kecilnya adalah Hinaya dan Mahayana. Islam di Indonesia memiliki tradisi kecil yakni Nahdhlatul Ulama (NU), Muhammadiyah (MU), Persis, Al-Washliyah, Al-Khairat, Majelis Mujahiddin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir dan Front Pembela Islam.

Keberadaan agama jika dilihat dari sosio-historis, agama mampu bertahan dan bahkan menelurkan tradisi baru di dalam masyarakat sebagaimana penulis sebutkan di atas. Kemudian dengan munculnya tradisi-tradisi baru dimasyarakat, maka menimbulkan keberagaman dan

perbedaan yang akan selalu eksis di tengah-tengah masyarakat. Dengan bercermin pada kemajemukan tradisi kecil, lalu tersingkritisme budaya, adat istiadat, bahasa, keyakinan, kebiasaan, dan mitos yang melekat pada diri manusia tersebut perlu pola pandang, pemikiran, perspektif baru dalam menghargai, menghormati, mengakui dan menerima perbedaan yang ada, hal tersebut dikenal dengan multikulturalisme.

Multikulturalisme ini merupakan suatu upaya untuk mendesain, memanipulasi ruang-ruang sosial yang awalnya memiliki potensi konflik antar golongan, agama, suku, ras, dan status sosial menjadi damai, akur, rukun dan harmoni. Untuk mengkomunikasikan hal tersebut dibutuhkan diseminasi multikulturalisme di lembaga-lembaga pendidikan yang notabeneanya tempat candradimuka generasi penerus bangsa. Mengkomunikasikan multikulturalisme ini dibutuhkan keseriusan, waktu, persamaan ideologi dan *equality*, berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beranekaragaman dan sangat kompleks sekali sehingga *founding Father* kita mencetuskan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Soekarno pernah berkata bahwa Bangsa Indonesia terbentuk bukan karena agama, suku, ras dan antar golongan melainkan karena rasa senasib dan sepenanggungan terjajah serta memiliki tujuan kemerdekaan sejati dan abadi. Dengan memiliki keanekaragaman budaya, bahasa, tradisi, nilai, norma, etnis, ras, suku, agama dan komunal keberkahan yang luar biasa dan juga menjadi bom waktu bagi Bangsa Indonesia jika tidak diasuh, diasah, dan dirawat dengan benar.

Buku ini hadir menawarkan banyak pemikiran, ide, gagasan, pola pandang baru untuk melihat keragaman baik secara politik, ekonomi, komunikasi, pendidikan, agama dan budaya. Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca, khususnya mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan UIN Sumatera Utara dan Universitas Dharmawangsa Medan serta kampus di sekitaran kota Medan, Binjai dan Deli Serdang (MEBIDANG)

Jambi dan Medan, 1 September 2022

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar Editor.....	iii
Kata Pengantar Penulis	v

BAB 1

TEORI-TEORI MULTIKULTURALISME 1

A. Pengertian Multikulturalisme	1
B. Pengertian Budaya (<i>Culture</i>).....	5
C. Proses Budaya Multikultural.....	7
D. Multikulturalisme dan Konteks Pembentukan Suatu Bangsa.	9

BAB 2

MULTIKULTURALISME DALAM PERSPEKTIF INTELEKTUAL MUSLIM 15

A. Pendahuluan	15
B. al-Din al-Sayid Mahmud al-Alusi al-Baghdadi.....	15
C. Muhammad Quraish Shihab.....	17
D. Abd al-Qadir Awdah	20
E. Muhammad Fakhr al-Din al-Razi,.....	21
F. Yusuf al-Qaradhawi.....	22

BAB 3

MEMBANGUN TRADISI MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA 27

A. Pendahuluan	27
B. Komitmen Kebangsaan.....	31
C. Toleransi.....	33
D. Anti Kekerasan.....	34
E. Akomodatif Terhadap Budaya Lokal	35
F. Terbuka (inklusif).....	36

G. Dialog.....	37
H. Berperilaku Beragama Tidak Ekstrem.	38
I. Sikap di Tengah-Tengah.	39
J. Berlaku Adil dan Berimbang	41

BAB 4

TEORI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL 43

A. Tipologi Pendidikan Multikultural	43
B. Pendekatan, Tipologi dan Pembelajaran Pendidikan Multikultural	44
C. Konsep Pendidikan Multikultural.....	45

BAB 5

TEORI PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURAL 49

A. Pengertian, dan Tujuan Pendidikan Islam Multikultural	49
B. Perkembangan Pendidikan Islam Multikultural di Indonesia.....	52
C. Pendidikan Islam Multikultural dalam Kontek Kebangsaan Indonesia	60
D. Ukhuwah Wathaniyah (Ajaran Cinta Tanah Air)	63
E. Akar-akar Inklusif dalam Mengkontruksi Pendidikan Islam Multikultural.....	72

BAB 6

NILAI-NILAI MULTIKULTURALISME DALAM SEJARAH ISLAM85

BAB 7

LEGAL STANDING PENYELENGGARAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI INDONESIA..... 91

A. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional.....	91
B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.....	97

BAB 8

RISET BUDAYA SEKOLAH MULTIKULTURAL DALAM MEWUJUDKAN NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA DI SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA ISKANDAR MUDA KOTA MEDAN..... 105

A. Pendahuluan	105
B. Pembahasan	109
C. Kesimpulan.....	120

BAB 9

RISET MULTIKULRALISME DAN KEMUNCULAN GERAKAN SOSIAL ISLAM DI MEDAN KONTEMPORER121

- A. Pendahuluan 121
- B. Pembahasan 125
- C. Penutup 144

Daftar Pustaka..... 145

Daftar Riwayat Hidup Penulis 159



BAB 1

TEORI-TEORI MULTIKULTURALISME

A. Pengertian Multikulturalisme

Secara harfiah multikulturalisme berasal dari kata “multi”, “culture” dan “isme”. Kata multi berasal dari bahasa Inggris yang berarti “jamak, bhineka, banyak, berbeda, beragam dan kemajemukan”, kemudian begitu juga dengan kata *culture* yang dalam bahasa Inggris yakni “budaya” lebih luas lagi dapat ditafsirkan dalam ruang lingkup bahasa, adat istiadat, tradisi, nilai, norma, mitos, harapan, dan keyakinan”. Sedangkan kata isme menyatakan “aliran, paham, kepercayaan, pola pandang, perspektif”¹

Suparlan² mengartikan multikulturalisme sebagai sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan. Dalam model multikulturalisme ini. Satu masyarakat dilihat sebagai hal yang mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat tersebut yang coraknya seperti sebuah mosaik. Di dalam mosaik itu tercakup semua kebudayaan dari berbagai masyarakat yang lebih kecil yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar.

Prinsip-prinsip dasar multikulturalisme mengakui dan menghargai keberagaman kelompok masyarakat seperti etnis, ras, budaya, gender, strata sosial, agama, perbedaan kepentingan, keyakinan dan tradisi yang akan sangat membantu bagi terwujudnya perubahan format perilaku sosial yang kondusif dan ditengah kehidupan masyarakat yang majemuk. Sarana terbaik dan strategis yang digunakan untuk membangun dan mensosialisasikan konsep multikultural agar melahirkan perilaku sosial kondusif, “kearifan sosial”, “kearifan budaya” dan “kearifan moral” adalah lewat pendidikan formal melalui

persekolahan dan menanamkan “pendidikan multikultural”³

Azra⁴ mengungkapkan bahwa multikultural adalah sebuah pandangan dunia tentang kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa memandang perbedaan budaya, etnis, gender, bahasa dan agama. Kemudian Hasan mengungkapkan bahwa multikultural merupakan suatu keyakinan yang mengakui dan menghormati perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun sosioal-kebudayaan.⁵ Multikulturalisme juga merupakan konsep dimana sebuah komunitas dalam konteks kebangsaan dapat mengakui keberagaman, perbedaan, dan kemajmukan budaya, ras, dan bahasa. Serta merupakan sebuah konsep yang memberikan pemahaman bahwa sebuah bangsa yang plural adalah bangsa yang terdiri dari beberapa etnis, budaya, agama, tradisi dan bahasa yang bermacam-macam, yang dapat hidup berdampingan dan saling menghormati dalam suasana rukun dan damai.

Multikulturalisme merupakan hal yang memandang bahwa masyarakat memiliki sebuah kebudayaan atau kearifan lokal tersendiri dan mengakui dan menerima perbedaan dalam kesederajatan, kesamaan, secara individu maupun secara kelompok, dan kebudayaan.⁶ Dengan memahami, menghormati, mengakui dan menghargai perbedaan dan mendukung keragaman masyarakat yang majemuk dan heterogen mampu mengikis potensi konflik ditengah-tengah masyarakat serta membentuk karakter yang terbuka terhadap perbedaan.⁷

McCormick mengatakan bahwa: *Efforts to characterize the United States as a “melting pot” in which differences would gradually disappear began to adjust to a perspective of our society as a kind of “salad bowl” wherein each group reflected its unique identity and its American experience. While a multicultural view of society and education has not fully taken hold, the concept has provided educators with a framework in*

³ Laila Octaviani, *Pandataru dan Jarlatsu: Model Pendidikan Multikultural di SMA Taruna Nusantara Magelang*, *Jurnal Komunitas*, Vol. 5, No. 1 Tahun 2013, h. 112-127, DOI: <https://doi.org/10.15294/komunitas.v5i1.2383>

⁴ Azyumardi Azra, *Keragaman Indonesia: Pancasila dan Multikulturalisme*, makalah 2007, h. 7

⁵ Muhammad Tholhah Hasan, *Pendidikan Multikultural Sebagai Opsi Penanggulangan Radikalisme*, Cet. Ke-3. (Malang: Lembaga Penerbitan UNISMA, 2016) h. 9-10

⁶ Lihat Parsudi Suparlan, *Menuju Masyarakat...*, h. 1

⁷ H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional* (Jakarta: Grasindo, 2004), h 9-10.

*which to advocate program development and change that is not based on a deficit model of students and their heritage.*⁸

Theresa E. McCormick telah membagi model multikulturalisme yang telah terjadi di Amerika Serikat. Model multikulturalisme ini sebenarnya mencerminkan wajah multikulturalisme yang terjadi secara periodik empirik di USA, sebelum multikulturalisme dengan model *melting pot*, dimana setiap kebudayaan terjadi peleburan dan kemudian menghilangkan identitas setiap budaya, menjadi ciri *salad bowl*, yang mana setiap kelompok mencerminkan identitasnya masing-masing yang unik.

Pendapat Bikhu Parekh terkait multicultural adalah “...*just as society with several religion or language is multi religious or multi lingual, a society containing several cultures is multicultural.* Karena itu, parekh merumuskan bahwa “...*a multicultural society, then, is one that includes several cultural communities with their overlapping but none the less distinct conceptions of the world, system of meaning, values, forms of social organization, histories, customs and practice.*”⁹ (Multikulturalisme adalah suatu masyarakat yang didalamnya terdapat beberapa komunitas yang memiliki perbedaan konsepsi tentang sistem makna, nilai-nilai, organisasi sosial, sejarah, tradisi dan kebiasaan).

Jadi, tersirat bahwa melalui perbedaan konsepsi tersebut, mereka mampu saling hidup berdampingan satu dengan yang lain. Parekh menyebutkan:

1. *Multikulturalisme isolasionis*, yaitu masyarakat yang berbagai kelompok kulturalnya menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi minimal satu sama lain.
2. *Multikulturalisme akomodatif*, yaitu masyarakat yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. Masyarakat ini merumuskan dan menerapkan undang-undang, hukum, dan ketentuan-ketentuan yang sensitif secara kultural, dan memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka. Begitupun sebaliknya, kaum minoritas tidak menantang kultur

⁸ Theresa E. McCormick (1984) *Multiculturalism: Some principles and issues, Theory Into Practice*, 23:2, 93-97, doi: 10.1080/00405848409543097

⁹ Bikhu Parekh, *Rethinking Multikulturalism*, (Harvard University Press, 2002), hal. 5

dominan. Multikulturalisme ini diterapkan di beberapa negara Eropa.

3. *Multikulturalisme otonomis*, yaitu masyarakat plural yang kelompok-kelompok kultural utamanya berusaha mewujudkan kesetaraan (*equality*) dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima. Perhatian pokok kultural ini adalah untuk mempertahankan cara hidup mereka, yang memiliki hak yang sama dengan kelompok dominan; mereka menantang kelompok dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat yang semua kelompoknya bisa eksis sebagai mitra sejajar.
4. *Multikulturalisme kritikal/interaktif*, yakni masyarakat plural yang kelompok-kelompok kulturalnya tidak terlalu terfokus (*concerned*) dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih membentuk penciptaan kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif khas mereka.
5. *Multikulturalisme kosmopolitan*, yaitu masyarakat plural yang berusaha menghapus batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat tempat setiap individu tidak lagi terikat kepada budaya tertentu, sebaliknya secara bebas terlibat dalam percobaan-percobaan interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing.¹⁰

Dalam sejarahnya, multikulturalisme diawali dengan teori *melting pot* yang sering diwacanakan oleh Hector seorang imigran asal Normandia. Dalam teorinya Hector menekankan penyatuan budaya dan melelehkan budaya asal, sehingga seluruh imigran Amerika hanya memiliki satu budaya baru yakni budaya Amerika, walaupun diakui bahwa monokultur mereka itu lebih diwarnai oleh kultur *White Anglo Saxon Protestant* (WASP) sebagai kultur imigran kulit putih berasal Eropa. Kemudian, ketika komposisi etnik Amerika semakin beragam dan budaya mereka semakin majemuk, maka teori *melting pot* kemudian dikritik dan muncul teori baru yang populer dengan nama *salad bowl* sebagai sebuah teori alternatif dipopulerkan oleh Horace Kallen.¹¹ Paradigma multikulturalis menghendaki adanya apresiasi dan

¹⁰ Bikhu Parekh, "National Culture and Multiculturalism", dikutip oleh Azyumardi Azra, *Merawat Kemajuan Merawat Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal. 13-16

¹¹ Muhandis Azzuhri, Konsep multikulturalisme dan Pluralisme dalam Pendidikan Agama

respek terhadap suku, budaya, agama, bahasa, dan tradisi orang lain. Namun demikian, multikulturalisme yang memiliki banyak model, pada gilirannya akan memberikan perilaku multikulturalis yang berbeda-beda pula.

Mengomentari pandangan lima varian multikulturalisme di atas, Azra mengatakan, dalam konteks Indonesia, kelihatannya termasuk ke dalam multikulturalisme kedua dan keempat. Di Indonesia, pada dasarnya terdapat kultur dominan baik dalam konteks budaya, politik, etnis dan agama; tetapi pada dasarnya kultur dominan memberikan akomodasi bagi kultur lain untuk memberikan akomodasi bagi kultur lain untuk mengekspresikan dirinya. Juga terjadi proses interaksi yang cukup intens antar kultur dominan dengan kultur-kultur lain, yang pada gilirannya memunculkan sebuah “supra-culture”—yang sederhananya bisa dinisbahkan kepada kultur Indonesia—kultur *nation-state* Indonesia.¹²

B. Pengertian Budaya (*Culture*)

Budaya merupakan hasil dari masyarakat dan sekaligus akan menjadi milik masyarakat. Budaya merupakan sebuah nilai yang tidak dapat dikontrol oleh genetik atau seseorang. Hal ini senada dengan Binford: “*Culture is all the ways in which forms are not directly under genetic control... who work to fit individuals and groups into their ecological community*”¹³

Budaya merupakan semua cara yang bentuk-bentuknya tidak langsung berada di bawah kontrol genetik yang bekerja untuk menyesuaikan individu-individu dan kelompok ke dalam komunitas ekologi mereka. Budaya membentuk tingkah laku seseorang yang terikat kepada kelompok sosial tertentu yang akhirnya menjadi sebuah tradisi dan adat istiadat: “*The concept of culture descends into a pattern of behavior that is bound to certain groups, which is to become “customs” or*

(Upaya Menguniversalkan Pendidikan Agama dalam Ranah Keindonesiaan). Forum Tarbiyah Vol. 10, No. 1, juni 2012. (Online), <https://id.scribd.com/doc/303154690/370-1380-2-PB>, diakses 13 Desember 2017, h. 15-16.

¹² Azyumardi Azra, *Merawat Kemanjemukan Merawat Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 16

¹³ Binford, Lewis R. “The Archaeology of Place”, dalam Robert Whallon (ed.), *Journal of Anthropological Archaeology I (1)*. New York: Academic Press, 1982. h. 323

“way of life” of humans”¹⁴

Konsep budaya turun jadi pola tingkah laku yang terikat kepada kelompok-kelompok tertentu, yaitu menjadi “adat istiadat” (*customs*) atau “cara kehidupan” (*way of life*) manusia. Budaya ini tidak tertulis atau biasa di sebut dengan *hidden culture* yang secara kolektif menyesuaikan dengan lingkungan dimana ia berada. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Guthrie dan Schuermann: “*Culture is a comprehensive collection of a people’s actions and beliefs that enables a collectivity to adjust to its physical environment, continually renew itself, and sustain its gene pool.*”¹⁵

Budaya menyingkapkan kumpulan komprehensif dari tindakan dan keyakinan orang-orang yang memungkinkan kolektivitas untuk menyesuaikan untuk lingkungan fisiknya, terus memperbarui dirinya sendiri, dan mempertahankan kumpulan gennya. Budaya tidak dibentuk secara permanen, namun budaya sangat dinamis dalam beradaptasi dengan waktu dan ruang seperti beradaptasi dengan lingkungan, ekonomi, teknologi dan perubahan demografi yang terus berkembang dan bahkan berevolusi untuk mempertahankan dan melanggengkan kehidupan. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Geertz: “*Culture is historically transmitted pattern of meanings embodied in symbols, a system of inherited conceptions expressed in symbolic forms by means of which men communicate, perpetuate, and develop their knowledge about and attitudes toward life*”¹⁶

Budaya merupakan pola makna yang ditransmisikan secara historis yang terkandung dalam simbol, sebuah sistem konsepsi yang diwariskan yang diekspresikan dalam bentuk simbol yang dengannya manusia berkomunikasi, melanggengkan, dan mengembangkan pengetahuan mereka tentang dan sikap terhadap kehidupan. Pendapat Geertz di atas dapat dipahami bahwa budaya merupakan salah satu cara untuk mewariskan pengetahuan dengan mentranmisikan simbol-simbol dan komunikasi melalui dunia pendidikan non formal dan pendidikan formal seperti perguruan tinggi dan sekolah.

Aspek-aspek budaya memiliki banyak ragam, aspek budaya dapat dilihat dari pemikiran, ide-ide, keyakinan, bahasa, adat istiadat,

¹⁴ M. Harris, *The Nature of Culture Things*, (New York: Random Hous, 1964), h. 25

¹⁵ Helen A. Guthrie, *Human Nutrition* (Missouri : Mosby-Year Book, 1995) h. 32

¹⁶ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures*, (New York: Basic Books Inc, 1973) h. 89

nilai, norma, mitos, tari-tarian, ritual adat, hasil dari kesenian berupa bentuk artefak dll. Hal ini sejalan dengan apa yang di katakan oleh Koentjaraningrat: Aspek-aspek budaya berdasarkan dimensi wujudnya, yaitu: (1) Kompleks gugusan atau ide seperti pikiran, pengetahuan, nilai, keyakinan, norma dan sikap. (2) kompleks aktifitas seperti: pola komunikasi, tari-tarian dan upacara adat. (3) Material hasil benda seperti: seni, peralatan dan lain sebagainya.¹⁷

Menurut penulis, budaya adalah sebuah pola perilaku yang di turunkan secara sosial melalui aktifitas sehari-hari lalu menjadi sebuah kebiasaan lalu berkembang dan dirawat serta ditransmisikan secara terus menerus lalu membentuk sebuah tradisi, nilai, norma keyakinan dan mitos. Budaya tidak hanya terdapat atau terjadi di sosial masyarakat. Terbentuknya sebuah budaya tidak memilih tempat, akan tetapi sebuah budaya bisa terbentuk dimana saja, baik yang dibentuk secara non formal dan formal misalnya seperti dunia pendidikan tinggi dan lembaga sosial lainnya.

C. Proses Budaya Multikultural

Proses pembentukan budaya tidaklah instan atau pembentukannya tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan. Pastinya proses pembentukan budaya ini membutuhkan waktu yang panjang dan proses pembentukan ini yang berulang-ulang. Proses penanaman nilai karakter moderasi beragama melalui pembelajaran, habituasi (pembiasaan), ekstrakurikuler¹⁸. Menurut Parekh¹⁹ kemajemukan (*plurality*), keanekaragaman (*diversity*) dan keberagaman (*heterogeneity*) serta keragaman masyarakat merupakan kenyataan sekaligus keniscayaan. Kenyataan seperti ini menuntut dibangunnya berbagai “saluran dialog” oleh semua tokoh di berbagai sektor kehidupan. Keharusan ini dalam rangka menutup kemungkinan adanya entitas masyarakat yang mendapat diskriminasi dan eksploitasi dalam kehidupan bermasyarakat.

(Habitus x Modal) + Ranah= Praktik

¹⁷ Koentjaraningrat, *Rintangan-rintangan Mental dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia*, Ed.2 (Jakarta: Lembaga Riset Kebudayaan Nasional Seni, 1969). h. 17

¹⁸ Kokom Komalasari & Saripudin, *Pendidikan Karakter Konsep dan Aplikasi Living Values Education*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017) h. 32

¹⁹ Parekh, Bhikhu. *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*, (London : Macmillan, 2000), h. 142-276

Habitus mempunyai beberapa sifat sebagai berikut; pertama *Hysteresis de l'habitus*, Bourdieu menjelaskan bahwa *Hysteresis de l'habitus* adalah sifat 'bertahan lama' dalam arti bertahan di sepanjang rentang waktu tertentu dari kehidupan seorang agen. 'Bertahan lama' pada seorang agen bahkan sampai disposisi yang disosialisasikan tidak lagi berlaku seperti kisah Bourdieu: "*Habitus is simply as someone's habits or traits attached to a person. Habitus seeped in, was disposed, and became an inseparable part of the agency.*"²⁰

Habitus secara sederhana sebagai kebiasaan seseorang atau tabiat yang melekat pada diri seseorang. Habitus meresap dalam diri, terdisposisi, dan menjadi bagian yang tidak bisa lepas dari agensi. Maka Bourdieu melihat habitus sebagai kunci bagi reproduksi sosial karena ia bersifat sentral dalam membangkitkan dan mengatur praktik-praktik yang membentuk kehidupan sosial. "*Bourdieu divides capital into four types of capital, namely economic capital, cultural / cultural capital, symbolic capital, social capital in the form of social relations that enable a person to mobilize for his own interests*"²¹

Bourdieu membagi modal menjadi empat macam modal, yakni modal ekonomi, modal kultural/budaya, modal simbolis, modal sosial yang berupa hubungan-hubungan sosial yang memungkinkan seseorang bermobilisasi demi kepentingan sendiri. Bourdieu menganggap bahwa modal memainkan peranan yang penting, karena modal adalah yang memungkinkan orang untuk mengendalikan orang untuk mengendalikan nasibnya sendiri maupun nasib orang lain. *The term Field is often used by Bourdieu to express a social arena where habitus occupy in which there are various struggles and maneuvers between habitus in fighting for meaning, resources, surpassing, seeking recognition, positioning themselves.*²²

Istilah *Field* sering dipakai Bourdieu untuk menyatakan suatu arena sosial tempat bercengkramanya habitus-habitus yang di dalamnya terdapat berbagai perjuangan dan maneuver antar habitus dalam memperebutkan makna, sumber daya, mengungguli, mencari pengakuan, memosisikan diri. Merupakan hasil dari "perkawinan"

²⁰ Pierre Bourdieu, *Arena Produksi Kultural, Sebuah Kajian Sosiologi Budaya*, terjemahan, (Bantul: kreasi Wacana, 2010), 170

²¹ G Priyatmono, *Ngaji Teori : Bourdieu, Derrida, Foucault dan Implementasinya untuk Disertasi*. (Yogyakarta: Impulse, 2020), h.37

²² Pierre Bourdieu, *Arena Produksi Kultural...*,h. 175

habitus di kali dengan modal di tambah ranah/arena/*field* sama dengan praktik.

D. Multikulturalisme dan Konteks Pembentukan Suatu Bangsa.

Mengomentari pandangan lima varian multikulturalisme di atas, Azra mengatakan, dalam konteks Indonesia, kelihatannya termasuk ke dalam multikulturalisme kedua dan keempat. Di Indonesia, pada dasarnya terdapat kultur dominan baik dalam konteks budaya, politik, etnis dan agama; tetapi pada dasarnya kultur dominan memberikan akomodasi bagi kultur lain untuk memberikan akomodasi bagi kultur lain untuk mengekspresikan dirinya. Juga terjadi proses interaksi yang cukup intens antar kultur dominan dengan kultur-kultur lain, yang pada gilirannya memunculkan sebuah “*supra-culture*”—yang sederhananya bisa dinisbahkan kepada kultur Indonesia—kultur *nation-state* Indonesia.²³ Namun demikian, mengutip pendapat Tolchah Hasan, apabila kita memandang berbagai kerangka konseptual tentang multikulturalisme dan masyarakat multikultural seperti tersebut di atas, secara substantif sebenarnya tidak terlalu baru di Indonesia. Sebagai negara bhinneka, tegas Tolchah Hasan, Indonesia mencerminkan multikulturalisme yang terintegrasi dalam ke-ikaan (kesatuan). Negara dalam identitas demikian merupakan negara yang mengakui dan bangga dengan keberagaman namun berusaha keras mewujudkan cita-cita kesatuan dalam kenyataan berbangsa.²⁴

Dari beberapa pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Indonesia adalah masyarakat majemuk yang terdiri dari ragam budaya, etnis, agama, dan bahasa. Meskipun terdapat keanekaragaman masyarakat, masyarakat Indonesia bisa hidup harmoni dan damai. Hal ini bisa dilakukan dikarenakan Indonesia merangkul keragaman masyarakat melalui yurisdiksi dan konstitusi negara. Namun tidak tertutup kemungkinan juga terjadi gesekan dan konflik karena keragaman ini, mungkin gesekan dan konflik ini lebih disebabkan oleh faktor-faktor eksternal seperti masalah ekonomi dan

²³ Azyumardi Azra, *Merawat Kemanjemen Merawat Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal. 16

²⁴ Muhammad Tholchah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, (Jakarta: Lantabora Press, 2005), h. 16

politik, bukan dari alasan keberbedaan.

Masyarakat Indonesia memiliki budaya dan daya resap cukup tinggi terkait dengan ajaran agama, hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya berbagai praktik ibadah atau ritual yang kompleks dan memiliki kemiripan serta kesamaan di antaranya. Pada masa kejayaan agama Hindu dan Budha dapat berdampingan dan membangun tradisi secara bersama-sama. Ketika Islam masuk, tradisi tersebut bersinggungan dengan ajaran agama Islam, mengalami akulturasi dan sinkritisme.

Agama di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri dalam mengakomodir budaya lokal. Contoh agama Islam: perjumpaan agama dengan budaya lokal itu mengambil banyak bentuk. *Pertama*, mengalami benturan (*clash*) yang sampai pada titik di mana budaya setempat dihabisi dan diganti yang baru dengan islamisasi misalnya, yang terjadi di Padang tempo dulu. *Kedua*, ada yang mengambil jalan akomodasi, artinya ada pertemuan saling mengisi dan tidak saling menjatuhkan. “Islam diterima tapi sebatas simboliknya, adapun substansi seperti kepercayaan terhadap leluhur tetap dijaga. *Ketiga*, mengambil bentuk hibriditas, artinya menerima agama tapi separohnya saja, sisanya tradisi setempat, bentuk ini kemudian biasa dikenal dengan misalnya, Islam Jawa, Islam Banjar, Islam Sasak dan sebagainya.²⁵

Lebih jauh lagi di lihat secara historis Wali Songo menakomodasi nilai-nilai lokal dalam Islam sebagai ajaran agama. Misalnya saja Sunan Bonang mengubah gamelan Jawa yang kental dengan estetika Hindu menjadi bernuansa zikir yang mendorong kecintaan pada kehidupan transendental. Tembang “Tombo Ati” adalah salah satu karyanya, lebih jauh lagi pentas pewayangan Sunan Bonang mengubah lakon dan memasukkan tafsir-tafsir khas Islam.²⁶

Jauh hari Islam telah membicarakan tentang kehidupan yang harmoni meskipun hidup dalam keragaman kultural. Rasulullah SAW diutus untuk sekalian alam, yang dalam hal ini mencakup semua agama. Sikap Rasulullah SAW yang mendoakan dan mengharapkan orang-orang musyrik supaya menjadi bagian umat Islam, menguatkan

²⁵ Ahmad Baso, *Tradisi Lokal dan Masa Depan Agama*, Majalah Majemuk, No. 6 November-Desember 2003, h. 3

²⁶ Muhammad Harfin Zuhdi, “Dakwah dan Dialektika Akulturasi Budaya”, *Religia: Jurnal Ilmu-ilmu Kesilaman*, Vol. 15 No. 1, April 2012, h. 46-64, DOI:<https://doi.org/10.28918/religia.v15i1.122>

bahwa Rasulullah SAW. diutus membawa misi toleransi, sebagaimana sabda beliau;

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ بِالْيَهُودِيَّةِ وَلَا بِالنَّصْرَانِيَّةِ وَلَكِنِّي
أُبْعَثُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ

Maka Rasulullah saw bersabda, “sesungguhnya aku tidak diutus untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani, akan tetapi aku diutus untuk orang-orang yang lurus terpuji.”²⁷

Islam telah meletakkan garis-garis batas yang mesti dipahami oleh pemeluknya, dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ayat di bawah ini menyebutkan bahwa setiap komunitas umat manusia memiliki *kiblat* tersendiri. Ayat ini menggambarkan karakteristik dari multikulturalisme *isolasionis*, *akomodatif*, dan *otonomis*. Kiblat di sini adalah panduan hidup umat.

وَلِكُلِّ سَوَءَةٍ هُوَ مُوَلَّيَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ
اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“dan stiap umat mempunyai kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”²⁸

²⁷ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin ‘Auf bin Qasithi bin Marin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa’labah bin Uqbah bin Sha’ab bin Ali bin Bakar bin Wail, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hal. 266

²⁸ QS. Al-Baqarah/2: 148

Surat al-Baqarah ayat 148 di atas menjelaskan bahwa setiap umat memiliki kiblatnya masing-masing, yang mana atas kiblatnya itu setiap umat menghadapnya. Di sini kiblat tidak saja diterjemahkan sebagai “tempat menghadap” dalam ibadah, shalat misalnya, melainkan juga arah hidup. Hal ini ditegaskan oleh Allah ketika menyebutkan bahwa setiap umat punya kiblat masing-masing, sedangkan umat itu harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Di sini terdapat penegasan bahwa kiblat itu hanyalah “arah tujuan” namun substansinya adalah manusia itu melaksanakan kebaikan dalam hidupnya. Adapun surat al-Maidah ayat 48 di atas menggambarkan multikulturalisme kritis, dikarenakan Allah menyebutkan perbedaan sebagai sesuatu yang diciptakan Allah namun manusia diharuskan untuk mencari kesamaan untuk membentuk kesatuan kolektif. Ketentuan multikulturalisme kritis dalam ayat di atas adalah *munasabah* dari ayat berikut:

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُبَازِغَنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمًا

“Bagi tiap-tiap umat telah Kami tetapkan syari’at tertentu yang mereka lakukan, Maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan (syari’at) ini dan serulah kepada (agama) Tuhanmu. Sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus”²⁹

Sebagai bagian dari komitmen kebangsaan adalah penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam kontstitusi UUD 1945 dan regulasi yang keluar di bawahnya. Bangsa (*nation*) mengacu kepada sekelompok orang yang memiliki identitas kebangsaan yang sama. Identitas bersama itu bisa dibangun berdasarkan kesamaan bahasa, sejarah, budaya, atau sekadar karena fakta bahwa sekelompok orang itu menempati wilayah yang sama. Komitmen kebangsaan tidak secara ekstrem memaksakan satu agama menjadi ideologi negara, tetapi pada yang sama tidak merebut ruh nilai-nilai spiritual dari keseluruhan ideologi negara. Landasan komitmen kebangsaan dapat dilihat dalam Alquran Al-Hujarat:

²⁹ QS: Al-Hajj/22:67

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”³⁰

Hadits Rasulullah SAW berkaitan dengan komitmen kebangsaan adalah hadits sanad dari Abi Nadlrah ra.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسْطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبُّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجْمِيٍّ، وَلَا لِعَجْمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدٍ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ

“Telah menceritakan kepada kami Ismail, telah menceritakan kepadaku Sa’id al-Khudri, dari Abi Nadhroh, telah menceritakan kepadaku orang yang mendengar khutbah Rasulullah saw pada pertengahan hari Tasyriq, kemudian beliau berkata: Wahai manusia sekalian, ketahuilah bahwa Tuhan kalian satu, bapak kalian juga satu, ketahuilah tidak ada keutamaan dari orang arab terhadap non Arab, dan juga tidak ada keutamaan orang non Arab dari orang Arab kecuali ketakwaannya”.³¹

Hadist di atas diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad Juz 5 Nomor Hadits 411, al-Baihaqy dalam Syu’abu al-Iman, Juz 4, Nomor Hadits 289, Al-Thabrany dalam al-Ausath Juz 5, Nomor Hadits 86, dan Nomor 4749, Al-Haitsamy dalam Majma’ al-Zawaid, juz 8 nomor hadits 84. Ath-Thabrani memberikan catatan

³⁰ QS. Al Hujarat/49:13

³¹ HR. Imam Ahmad

kaki bahwa al-Bazar yang menjadi salah satu perawinya adalah perawi shahih.

Hal ini berbeda dari negara (*state*), yang mengacu kepada batas-batas wilayah di mana sebuah bangsa berada. Dengan kata lain, negara adalah sebuah unit politik dan administratif yang independen, dengan batas-batas yang relatif jelas, yang berhasil mendapatkan pengakuan akan loyalitas dari penduduk yang kemudian menjadi warganegaranya.³² Nilai semangat kebangsaan adalah cara berpikir, bertindak dan wawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Nilai cinta tanah air adalah cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsanya.³³

³² Oman Faturahman,dkk, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h.110

³³ Kemdikbud. 2011. *Pedoman pelaksanaan pendidikan karakter*. Jakarta: Kementrian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan.



BAB 2

MULTIKULTURALISME DALAM PERSPEKTIF INTELEKTUAL MUSLIM

A. Pendahuluan

Studi Islam (*slamic studies*) jika dilihat pada periode “pembaharuan Islam” telah banyak melahirkan tokoh-tokoh muslim, yang mencurahkan pemikiran mereka dalam masalah hubungan antar umat beragama. Tokoh-tokoh yang muncul pada abad “pencerahan Islam” misalnya Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Tahtawi, di Mesir; Sir Ahmad Khan, Muhammad Iqbal, Ali Jinnah, di India; dan lain seterusnya. Kehadiran pemikiran mereka dalam perkembangan Islam setidaknya bisa diperoleh dari ijtihad mereka terhadap kebebasan berpikir manusia, prinsip anti kolonialisme, dan kebolehan mempelajari ilmu pengetahuan meskipun dari orang bukan Islam; yang secara tidak langsung sebenarnya merupakan bagian dari diskusi multikulturalisme. Pemikiran-pemikiran mereka telah mempengaruhi dan berkontribusi dalam perkembangan studi Islam sampai hari ini. Di sini penulis tidak merincikan pemikiran-pemikiran mereka. Di sini yang akan dibahas ringkas adalah “pemikiran multikulturalisme” perspektif Islam dalam pandangan lima sarjana muslim yaitu (a) Shihab al-Din al-Sayid Mahmud al-Alusi al-Baghdadi, (b) M.Quraish Shihab, (c) Abd al-Qadir Awdah, (d) Muhammad Fakhr al-Din al-Razi, dan (e) Yusuf al-Qaradhawi!

B. al-Din al-Sayid Mahmud al-Alusi al-Baghdadi

Kiprah al-Alusi belum banyak diketahui oleh publik, terutama pemikiran dan pandangannya tentang hubungan antar sesama manusia (sosial). Al-alusi mengakui adanya kesetaraan pada umat manusia.

Manusia tidak dibedakan atas suku, agama, bangsa, ras, bahasa, dan budaya, melainkan perbedaan ketakwaan. Pada hakikatnya manusia adalah sama dan sederajat, hanya saja ketakwaan pada tiap individu yang membedakannya dengan orang lain. Kontek kesetaraan umat manusia terdapat dalam firman Allah swt dalam surat al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”³⁴

Dalam menafsirkan surat al-Hujurat ayat 13 di atas al-Alusi menyebutkan asbab al-nuzul ayat ini. diriwayatkan dari Aisyah bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan abu hind yang pekerjaan sehari-harinya adalah pembekam. Nabi meminta kepada Bani Bayadh agar menikahkan salah satu putri mereka dengan Abu Hind, tetapi mereka enggan dengan laasan tidak wajar mereka menikahkan putri mereka dengannya yang merupakan salah seorang bekas budak mereka. hal ini dikecam oleh al-Qur’an bahwa kemuliaan di sisi Tuhan bukan mereka karena keturunan dan garis bangsawan, tetapi karena ketakwaan.³⁵

Menurut al-Alusi manusia diciptakan berbeda-beda adalah suatu sunnatullah yang tidak mungkin dipertentangkan. *Sunnatullah* ini bagaimanapun bukan urusan manusia untuk memaksa kehendak diri sendiri membuat seragam. Meskipun manusia telah diciptakan berbeda ras, etnik, agama, budaya, bahasa, sesungguhnya manusia sama derajat, tidak superior dan inferior, melainkan ketakwaan kepada Allah swt.

Al-Alusi juga memberi pendapat bahwa sesama manusia lintas imanpun boleh melakukan kerja sama. Asalkan kerja sama

³⁴ QS. al-Hujurat/49: 13

³⁵ Shihab al-Din al-Sayyid Mahmud al-Alusi al-Baghdadi, *Rub al-Ma’ani Jil.IX* (Beirut:Kutub al-Ilmiah, tt), h. 314

itu dilaksanakan dalam koridor kebaikan, bukan dalam kebatilan. Kerja sama antar pemeluk agama dalam bisnis, koperasi, politik, diperbolehkan jikalau mengandung kebaikan. “dalam konteks kehidupan sosial, tolong menolong artinya berusaha untuk membantu mengatasi kesulitan yang dihadapi sesama. Perintah tolong menolong yang terdapat dalam surat al-Maidah ayat 2, adalah mengajak manusia untuk tolong menolong dan menjalin kebersamaan kepada siapapun sepanjang tujuannya untuk kebaikan.”³⁶

C. Muhammad Quraish Shihab

M. Quraish Shihab adalah seorang ulama kontemporer di Indonesia yang telah banyak menuliskan buku. Quraish Shihab seorang mufassir kenamaan di Indonesia, kitab tafsirnya bernama al-Mishbah. Kitab tafsir al-Mishbah memiliki karekteristik konstektual. Disebut konstektual karena dalam menafsirkan ayat al-Qur’an, terlihat kalau Quraish Shihab mengaikan dengan situasi kekinian yang terjadi di dunia, khususnya di Indonesia. Kitab tafsir ini menurut penulis juga “ramah multikulturalisma.” Karena banyak mengandung nilai-nilai multikulturalisme dalam kitab ini. Meskipun *terma* multikulturalisme tidak muncul dalam kitab tersebut, namun aspek-aspek yang menjadi bahan multikulturalisme, khususnya dimensi dan nilai mulitkulturalisme banyak kita temukan, seperti toleransi, gender, pluralisme sosial, kerja sama, saling menghargai, dan lain seterusnya. Pada bagian ini kita hanya mengulas secara ringkas saja nilai-nilai muliktultural tersebut berdasarkan pandangan Quraish Shihab.

Natal, sebagaimana diketahui adalah satu perayaan dalam agama Kristen. Di Indonesia, perayaan natal setiap tahun dirayakan oleh umat kristiani. Ada persoalan muncul apakah mengucapkan selamat natal diperbolehkan dalam Islam atau tidak? Merujuk kepada beberapa cendekiawan muslim, Ibnu Taimiyah, Utsaimin, Bin Baz; menurut ulama ini mengucapkan natal haram. Namun penafsiran agak berbeda adalah Quraish Shihab.

Istilah *natal* satu-satunya terdapat dalam al-Quran. “Itu cuplikan kisah Natal dari al-Qur’an Surah Maryam ayat 33:

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا

³⁶ Shihab al-Din al-Sayyid Mahmud al-Alusi al-Baghdadi,.. h.106

“Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.”³⁷

Shihab mengatakan “al-Qur’an mengabadikan dan merestui ucapan selamat Natal pertama dari dan untuk Nabi mulia itu, Isa as.”³⁸ Shihab menafsirkan bahwa ayat tersebut merupakan doa Nabi Isa bahwa *salam* yakni keselamatan besar dan kesejahteraan sempurna tercurah atas diri beliau serta terhindarkan dari aib dan bencana serta kekurangan pada hari kelahiran, pada hari meninggal dunia, dan pada hari kebangkitan kelak di padang Mahsyar. Lebih lanjut Quraish Shihab menegaskan bahwa ayat tersebut sama sekali tidak terkait dengan ucapan “Selamat Natal” (yang berlaku dalam umat kristiani selama ini). Pengucapan “Selamat Natal” tersebut terkait dengan Ketuhanan Yesus Kristus, sebagaimana diyakini kaum Kristen, jelas bertentangan dengan keimanan karena mengaburkan keyakinan azasi Islam.³⁹

Jika saja “Selamat Natal” tersebut masih sesuai dengan semangat al-Qur’an maka hal tersebut tidak menjadi masalah. Larangan ini muncul, lanjut Quraish Shihab, yaitu dalam rangka upaya memelihara akidah. Karena, kekhawatiran kerancuan pemahaman, agaknya lebih banyak ditujukan kepada mereka yang dikhawatirkan kabur akidahnya. Kalau demikian, jika ada seseorang yang ketika mengucapkannya tetap murni akidahnya atau mengucapkannya sesuai dengan kandungan «Selamat Natal» Qurani, kemudian mempertimbangkan kondisi dan situasi dimana hal itu diucapkan, sehingga tidak menimbulkan kerancuan akidah baik bagi dirinya ataupun Muslim yang lain, maka agaknya tidak beralasan adanya larangan itu.⁴⁰

Sejauh yang penulis teliti, hanya Quraish Shihab yang menafsirkan surat Maryam ayat 33 dengan mengaitkan kondisi kekinian, tentang sosial-religi, yaitu persoalan umat tentang hukum memberi ucapan “selamat natal” bagi kristiani di Indonesia. Membolehkan ucapan “selamat hari natal” dengan syarat di atas menurut Shihab diperbolehkan. Interpretasi multikulturalisme dalam penafsiran Shihab di atas adalah

³⁷ QS. Maryam/19: 33

³⁸ M. Quraish Shihab. *Tafsir Al Mishbab: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Qur’an*. Vol. 8. (Lentera Hati, Jakarta, 2002). h. 180-184

³⁹ M. Quraish Shihab. (*Tafsir Al Mishbab*)

⁴⁰ M. Quraish Shihab. (*Tafsir Al Mishbab*)

satu bentuk toleransi dari kaum muslim kepada non-muslim. demikian pula, dari penafsiran di atas, terlihat kalau Shihab memiliki pandangan yang terbuka (inklusif) dalam hubungan antar umat beragama.

Kemudian persoalan gender, menurut Islam, perempuan mempunyai status yang sama dengan laki-laki, hal tersebut termaktub di dalam al-Qur'an, surat Ali Imran/3 ayat 195: "*Sebagian kalian adalah keturunan dari sebagian yang lain.*"⁴¹ Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan berkenaan dengan status, hak-hak dan balasan, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Menurut Quraish Shihab, kalau merujuk kepada kitab suci al-Qur'an, ditemukan citra perempuan yang terpuji adalah yang memiliki kemandirian yang menjadikannya memiliki hak berpolitik dan kritis terhadap apa yang dikehendaknya. Kitab suci al-Qur'an menyebutkan bahwa anak perempuan Nabi Syu'aib, yang ketika itu masih merupakan gadis-gadis, bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup ayahnya yang telah tua. Bahkan al-Qur'an berbicara tentang perempuan yang menjadi penguasa tertinggi negara yang bijaksana dan patuh kepadanya—laki-laki dan perempuan—sebagaimana terbaca dalam kisah ratu yang menduduki tahta negeri Saba'/ yang konon bernama Balqis.⁴² Dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan "status perempuan", khususnya pada surat Ali Imran ayat 19, Shihab memberikan peluang kepada perempuan untuk masuk ranah politik, bahkan menjadi pemimpin.

Dalam menafsirkan surat al-Hujurat ayat 13, Quraish Shihab dalam *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* menjelaskan sebutan kata *Sya'b* hanya sekali dalam al-Quran itu berbentuk plural (yaitu *syu'ub*). Kata ini pada mulanya mempunyai makna, cabang dan rumpun. Pakar bahasa Abu 'Ubaidah, sebut Shihab, memahami bahwa kata *Sya'b* dengan arti kelompok non-Arab, sama dengan *qabilah* untuk suku-suku.⁴³ Shihab memperjelas bahwa kata *syu'ub* adalah bentuk jamak dari kata *sya'b* yang mana kata ini digunakan untuk menunjukkan kumpulan dari sekian *qabilah* yang biasa diterjemahkan suku yang merujuk pada satu kakek. Qabilah pun terdiri dari sekian banyak keluarga yang dinamakan dengan *'imarah*.⁴⁴ Jadi penamaan kata plural dalam kalimat atau ayat tersebut

⁴¹ QS. Ali Imran/3: 195

⁴² M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Seri.03, Cet. IV, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h.110

⁴³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an ..*, h.333

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an...*, h.260

secara langsung diperuntukkan untuk setiap kelompok manusia, baik manusia yang tergolong dalam komunitas kecil maupun golongan manusia dalam komunitas besar. Di samping itu, setiap komunitas memang terbentuk dari berbagai unsur terutama budaya, agama, dan garis keturunan (*heredity*).

Kemudian kata *ta'arafu* dalam ayat tersebut terambil dari kata '*arafa*' yang berarti *mengenal*. Patron kata yang digunakan ayat ini mengandung makna timbal balik, dengan demikian ia berarti saling mengenal.⁴⁵ yaitu saling kenal mengenal antara sesama manusia dari segala perbedaan ras, suku dan bahasa. Semakin kuat upaya pengenalan satu pihak pada pihak lainnya, semakin terbuka peluang untuk saling memberi manfaat. Karena itu ayat di atas menekankan perlunya saling mengenal. Lebih lanjut "perkenalan" itu dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran dan pengalaman pihak lain, yang berguna untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt. Dampaknya akan tercermin pada kedamaian dan kesejahteraan hidup duniawi dan kebahagiaan ukhrawi. Shihab menegaskan surat al-Hujurat ayat 13 memberi isyarat asal usul manusia dengan menunjukkan konsep kesamaan derajat kemanusiaan di antara manusia.⁴⁶ Hal ini kemudian menjadi bagian dari semangat multikulturalisme. Inilah maksud karakteristik penafsiran al-Mishbah "ramah multikulturalisme" yang penulis sebutkan di atas.

D. Abd al-Qadir Awdah

Abdul Qadir al-Awdah banyak menaruh perhatian pada konsep kesetaraan manusia. Surat al-Hujurat ayat 13 ditafsirkan oleh al-Awdah sebagai satu ayat yang membicarakan tentang persamaan hak-hak manusia. Manusia pada hakikatnya memiliki kemuliaan yang sama sebagai hamba Allah yang telah dimuliakan oleh Allah. Ketika manusia telah diajarkan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, keberbedaan ini tidak memperbedakan status hak-hak setiap individu tersebut. Menurut al-Awdah konsep kesetaraan manusia dalam Islam telah diuraikan di dalam al-Qur'an. Manusia dalam Islam memiliki hak, kewajiban dan tanggungjawab yang sama.⁴⁷

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an...* h.262

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an...* h. 261

⁴⁷ Abd. Qadir al-Awdah, *al-Tashri' al-Jina'i al-Islami*, (Beirut: Dar al-Kutb, 205), h. 257

Dalam diskursus multikulturalisme, konsep kesetaraan memiliki harga paling tinggi yang disematkan kepada setiap individu. Kesetaraan adalah memandang seseorang sebagai satu kesatuan dengan orang lain meskipun berbeda identitas kesukuan dan agama, yang mesti diperlakukan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, seperti status sosial, hak beribadah dan beragama, hak berbicara dan menyatakan pendapat, hak berketurunan, dan hal untuk memperoleh kehidupan yang layak.

Lantas bagaimana dengan hak-hak non muslim yang tinggal dan hidup dalam mayoritas umat Islam? al-Awdah memandang bahwa meskipun non-muslim yang memilih tinggal dalam negara (mayoritas) Islam tetap akan diperlakukan secara sama, mereka yang disebut ahl al-Dzimmi memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab yang sama sebagai manusia, baik di mata hukum maupun di bidang pemerintahan.⁴⁸ Al-awdah memandang kaum non muslim yang di negara Islam harus diperlakukan sama dengan warga muslim lain, mereka memiliki hak yang sama dengan muslim, dan tanggung jawab yang sama sebagai warga negara. jika seorang muslim berkewajiban menjaga keluarganya, lingkungannya bahkan negara, kaum non-muslim pun memiliki kewajiban yang sama.

E. Muhammad Fakhr al-Din al-Razi,

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Umar bin Al-Hasan At-Tamimi Al-Bakri At-Tabaristani Ar-Razi Fakhruddin dan sering dipanggil dengan nama singkat al-Razi. Al-Razi adalah seorang mufassir klasik melahirkan kitab Tafsir al-Kabir Mafatih al-Ghaib. Tafsir ini digolongkan oleh para ulama sebagai tafsir falsafi ini –karena kecenderungan filosofisnya yang kental– mengupas tiap ayat dalam al-Qur’an melalui banyak pendekatan, dari mulai teologi, filsafat, hukum, sejarah, filologi dan bahkan sains.

Kecenderungan pemikirannya terhadap multikulturalisme dapat kita lihat dari penafsirannya terhadap surat al-Hujurat ayat 13. Ia menegaskan bahwa asal usul kejadian manusia sebagaimana yang disebut dalam surat al-Hujurat 13 dapat dilihat dari dua sisi, pertama, yang dimaksud dengan *dhakar wa untsa* adalah Adam dan Hawa. Hal ini mengandung pengertian bahwa tidak sepatasnya manusia

⁴⁸ Lihat Abd. Qadir al-Awdah, *al-Tashri' al-Jina'i al-Islami...*, h. 257

saling bermusuhan karena berasal dari keturunan yang sama (satu keturunan). Kedua, yang dimaksud dengan kata dzakar dan untsa adalah sekalian manusia yang diciptakan dari seorang ayah dan ibu. Ini artinya bahwa manusia diciptakan dari gen yang sama, yakni ayah dan ibu. Pendapat al-Razi ini dapat disimpulkan bahwa manusia pada hakikatnya memiliki ikatan dan merupakan satu kesatuan. Oleh karena itu manusia tidak selayaknya memperselisihkan segala keberbedaan di dunia, karena berasal dari satu keturunan yang sama sebagai ciptaan Tuhan yang tidak ada perbedaan kecuali pada ketakwaan.

F. Yusuf al-Qaradhawi

Yusuf al-Qaradhawy adalah ulama dari Mesir yang banyak menuliskan kitab. Dia merupakan seorang *fuqaha* sekaligus mufassir al-Qur'an. Terutama masalah fikih, al-Qaradhawy banyak melibatkan studi fikih dengan persoalan-persoalan kekinian, seperti dalam kitabnya *halal dan haram dalam Islam, fatwa-fatwa kontemporer, fikih prioritas, fikih maqashid syariah* dst. Kitab-kitab yang ditulis olehnya menjadi rujukan kaum muslimin di berbagai belahan dunia. Al-Qaradhawi tergolong ulama yang berhaluan moderat. Moderatisme Islam, adalah salah satu karakteristik multikulturalisme dalam perspektif Islam. Pemikiran moderat al-Qaradhawi bisa ditemukan dalam karya-karyanya.

Dalam hubungan muamalah antar umat beragama, al-Qaradhawi nampak bersifat terbuka. Ada ruang dialog antar umat beragama untuk menumbuhkan sikap toleransi dan kesalingpahaman sesama agama samawi. Di berbagai kesempatan, al-Qaradhawi sering diundang oleh pemuka-pemuka agama Kristen. Al-Qaradhawi juga memperbolehkan umat Islam mengucapkan selamat natal kepada umat Kristen. Baginya ucapan selamat natal diperbolehkan asalkan tidak mencampuri urusan aqidah. Tidak membenarkan konsep trinitas mereka. al-Qaradawi adalah seorang ulama Islam yang memiliki pemikiran moderat. Dia menyebukan pemikiran moderat dalam melihat hukum Islam dianjurkan dalam Islam, yang didasarkan pada keseimbangan memahami agama, kehidupan, dan perjuangan untuk memenangkan agama.

al-Qaradhawi⁴⁹ merupakan pemikiran moderat, menurutnya memiliki karakteristik yang membedakannya dengan arus pemikiran lainnya; antara lain penekanan terhadap prinsip-prinsip berikut ini: 1) Memahami ajaran agama dengan pemahaman yang menyeluruh, seimbang dan mendalam; 2) Memahami kehidupan nyata tanpa meremehkan atau takut kepadanya. Yaitu kehidupan nyata kaum muslimin dan kehidupan nyata-nyata musuh mereka; 3) Memahami sunnatullah dan hukum-hukumNya yang tetap dan tidak berubah-berubah, khususnya hukum yang berkaitan dengan masyarakat; 4) Memahami tujuan syariah, dengan amalan lahiriah yang tidak stagnan; 5) Memahami masalah prioritas, yang berkaitan dengan fikih pertimbangan; 6) Memahami perselisihan pendapat dan tata caranya, serta menghadapinya dengan sifat yang diajarkan oleh Islam (bekerja sama dalam masalah yang disepakati dan memberikan toleransi kepada orang yang berselisih pendapat dengannya); 7) Mempertimbangkan antara perkara-perkara Syariah yang tetap dengan perubahan zaman; 8) Menggabungkan antara pendapat salaf dan khalaf (antara pendapat yang orisinal dan pendapat yang modern); 9) Percaya kepada adanya perubahan pemikiran, kejiwaan dan perilaku yang didasarkan kepada perubahan budaya manusia; 10) Mengemukakan Islam sebagai proyek peradaban yang sempurna, untuk membangkitkan umat dan menyelematkan manusia dari filsafat materialisme modern; 11) Mengambi jalan yang paling mudah dalam memberikan fatwa dan memberikan kabar gembira dalam melakukan dakwah; 12) Memunculkan nilai-nilai sosial dan politik dalam Islam, seperti kebebasan, kehormatan, musyawarah, keadilan sosial, dan menghormati manusia hak asasi manusia; 13) Mau berdialog dengan orang lain dengan cara yang baik, yaitu dengan para penentang dari orang-orang bukan Islam, atau orang Islam yang inferior secara keruhanian dan pemikiran; dan 14) Mempergunakan jihad sebagai jalan untuk mempertahankan kehormatan kaum muslimin dan negeri mereka.

Dalam karakteristik moderat yang disampaikan al-Qaradawi di atas, terlihat menjelaskan kedudukan seorang muslim dalam melihat Islam secara normatif, dan melihat Islam secara konstektualitas, yang

⁴⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *Fikih Prioritas, sebuah kajian baru berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah*, (terj) Bahrudin F. (Jakarta: Robbani Press, 1999), h. 256

terkait dengan sosio kultural, politik dan ekonomi. Al-Qaradawi tidak menampik akan ada perubahan arus pemikiran baru dalam Islam yang berkaitan dengan perubahan zaman itu sendiri. Misalnya dalam persoalan toleransi antar umat beragama, menurutnya, sikap toleransi kepada orang lain (*others*) dalam Islam bisa dilihat dari empat alasan utama, yaitu: 1) manusia memiliki kedudukan yang mulia, apapun agama, kebangsaan, warna kulit, dan latar belakangnya; 2) perbedaan (agama) merupakan kehendak Allah sebagai konsekuensi dari kebebasan ikhtiar manusia; 3) persoalan hisab atas kekefiran dan hukuman atas kesesatan merupakan hak penuh Allah, sehingga tidak ada alasan untuk mempertentangkannya; dan 4) akhlak muslim memerintahkan berlaku adil dan membenci kedzaliman, kepada siapapun.⁵⁰

Moderatisme dalam Islam merupakan suatu realita yang berdasarkan tuntutan dari perubahan zaman. Al-Qaradawi mengupas masalah Islam secara khusus dengan istilah “madrasah moderat.” Madrasah moderat menurutnya berada ditengah-tengah di antara madrasah yang berhaluan liberal dan madrasah tesktual-ekstrim. Madrasah moderat merupakan madrasah “jalan lurus” yang menolak ekstrimisme.⁵¹ Al-Qaradawi tidak setuju dengan umat Islam yang berpandangan terlalu liberal. Begitu pula umat Islam yang bersikap ekstrim yang cenderung radikal. Namun madrasah moderat adalah beriman kepada keseimbangan, keadilan, sebagaimana firman Allah “*supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. dan tegakkanlah timbangan dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.* (Qs. al-Rahman:8-9). Inilah sikap moderta al-Qur’an, tidak melampaui batas dan tidak mengurangi timbangan.⁵²

Karakteristik Islam moderat menurut pandangan Yusuf al-Qaradawi adalah mempersembahkan Islam yang inklusif sesuai dengan kontek zaman namun tidak mengabaikan wilayah syariah yang menjadi kekhasan dari agama Islam. Karakteristik tersebut secara lebih spesifik dapat kita telusuri dalam bukunya, yaitu meliputi: 1) percaya kepada hikmat syariah yang mengandung kemaslahatan; 2) menggabungkan teks dan hukum syariat; 3) memandang dengan adil terhadap urusan

⁵⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *Fatawa Muasirah, Jil.III, cet.V* (Kairo: Dar al-Arqam, 2005), h.278

⁵¹ Yusuf al-Qaradhawi, *Fikih Maqashid Syariah, moderasi Islam antara aliran tekstual dan aliran liberal*, (terj) Aris Munandar Riswanto, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), h.143

⁵² Yusuf al-Qaradhawi, *Fikih Maqashid Syariah..* h.143

agama dan dunia; 4) menyambungkan teks dengan realita kehidupan; 5) memudahkan manusia; dan 6) terbuka, dialog, dan toleran terhadap dunia.⁵³

⁵³ Yusuf al-Qaradhawi, *Fikih Maqashid Syariah*.. h. 52-160



BAB 3

MEMBANGUN TRADISI MODERASI BERAGAMA DI Indonesia

A. Pendahuluan

Moderasi beragama dapat dirumuskan sebanyak mungkin ukuran, ciri-ciri, indikator untuk menentukan konsep, pola, sikap dan perilaku beragama tertentu apakah tergolong moderat atau sebaliknya. Menurut Shihab, seseorang yang memiliki sikap moderat dalam beragama memiliki pengetahuan yang luas, selalu berhati-hati, mampu mengendalikan emosi untuk tidak melebihi batas.⁵⁴ Sedangkan menurut Faturahman, moderasi beragama adalah cara pandang atau perilaku selalu memposisikan diri selalu di tengah-tengah, bertindak adil dan berimbang.⁵⁵ Kemudian menurut Hilmy, moderasi beragama merupakan ideologi tanpa kekerasan dalam menyebarkan Islam: mengadopsi cara hidup *modern* dengan semua turunannya, termasuk sains dan teknologi, demokratis, hak asasi manusia dan sejenisnya, penggunaan cara berfikir rasional, pendekatan kontekstual dalam memahami Islam, dan penggunaan Ijtihad.⁵⁶

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Albaqarah ayat 143 yang berbunyi:

⁵⁴ M. Q. Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2019)

⁵⁵ Oman Faturahman, dkk, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h.112

⁵⁶ Masdar Hilmy, Ampel, Iain Sunan. 2013. "WHITHER INDONESIA'S ISLAMIC MODERATISM? A Reexamination on the Moderate Vision of Muhammadiyah and NU" *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 7. No. 1 Tahun 2013, h. 24-48, DOI: [10.15642/JIIS.2013.7.1.24-48](https://doi.org/10.15642/JIIS.2013.7.1.24-48)

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ
عَلَيْكُمْ شَاهِدًا

“Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) “umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu”.

Dari ayat di atas, sepertinya Al-Qur’an menginginkan umat Islam sebagai *ummatan wasathan*/umat pertengahan. *Ummatan wasathan* dimaknai umat yang di tengah atau moderat, umat yang adil, dan umat pilihan. Kata *Ummah* di dalam Alqur’an disebutkan sebanyak 64 kali di dalam 24 surah. *Ummah* berarti bangsa, kelompok masyarakat, agama atau kelompok keagamaan. Di dalam bahasa Indonesia, *Ummah* sering di artikan umat, umat memiliki makna: (1) bangsa, kaum, rakyat yang bersatupadu yang berlandaskan pada keimanan, (2) pengikut suatu agama atau nabi, (3) khalayak ramai, dan (4) umum, seluruh, serta umat manusia.⁵⁷ Kata *umamah* dapat berarti seluruh kelompok ataupun golongan yang terhimpun atas sesuatu, baik itu agama maupun waktu, atau tempat yang sama, meskipun penghimpunannya itu dilakukan karena terpaksa ataupun atas dorongan kehendaknya⁵⁸

Sedangkan kata *Wasat* di dalam Al-Qur’an disebutkan sebanyak 5 kali, yakni QS. Al-Baqarah/2:143 dan 238, QS.Al-Maidah/5: 89, QS.Al-Qalam/68:28, QS. Al-‘Adiyat/100: 5.⁵⁹ *Wasat* pada awalnya adalah segala sesuat yang baik sesuai dengan objeknya. Segala sesuatu yang baik adalah dipertengahan diantara dua sifat yang ekstrim. Dipertengahan sifat boros dan kikir adalah dermawan, dipertengahan ceroboh dan takut adalah sifat berani. Ketika ada dua pihak yang berselisih dan beseteru, maka pihak ketiga adalah pihak yang dituntut sebagai wasit, agar berlaku adil, yakni agar tidak memihak kepihak manapun. Kemudian disitulah muncul makna *wasat* yang tiga yakni adil.⁶⁰

⁵⁷ Rahardjo, M. Dawam, *Ensiklopedia al-Qur’an: Tafsir Sosial berdasarkan Konsep-konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 483

⁵⁸ M.Q. Shihab, *Wawasan Al-Qur’an*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 430

⁵⁹ Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi, *Mu’jam al-Mufabraz li Alfaz al-Qur’an al-Karim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), h. 750

⁶⁰ M.Q. Shihab, *Wawasan Al-Qur’an...*, h. 433

Ummatan wasatan dalam arti yang lebih luas, umat yang menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat yakni terdapat aspek moderasi di dalamnya.⁶¹ Sikap moderat (*tawassuṭ*) tersebut digambarkan sebagai *ummatan wasaṭhan*, menyebutkan bahwa *wasatiyah* berarti yang terbaik, paling rendah hati dan adil.⁶² Ibnu Katsir, dalam Sulaiman, dkk dengan karakter ini, Islam moderat adalah mereka yang memiliki sikap toleran, rukun dan kooperatif dengan kelompok-kelompok agama yang berbeda.⁶³

Sikap moderat (*tawassuṭ*) tersebut digambarkan sebagai *ummatan wasaṭhan*, menyebutkan bahwa *wasatiyah* berarti adil dan terbaik. Al-Qurtubiy, dalam Sulaiman, dkk dalam konteks ini, *wasatiyah* tidak berarti mengambil posisi tengah atau dalam suatu persoalan, seperti posisi antara yang baik dan yang buruk⁶⁴ Kemudian Al-Raziy, dalam Sulaiman, dkk Sikap moderat (*tawassuṭ*) tersebut digambarkan sebagai *ummatan wasaṭhan*, menyebutkan bahwa *wasatiyah* memiliki 4 makna, yakni: 1). Adil, tidak memihak antara kedua belah pihak, 2). Sesuatu yang terbaik, 3). Yang paling rendah hati dan sempurna, dan 4). Tidak ekstrem dalam beragama.⁶⁵

Moderat adalah tidak ekstrim dalam urusan agama.⁶⁶ Moderat berarti masing-masing tidak boleh ekstrem di masing-masing sisi pandangnya dan harus saling mendekat dan mencari titik temu.⁶⁷ Moderat tidak terlepas dari toleransi, pendidikan toleransi tercermin pada 4 (empat) isu pokok yang dipandang sebagai dasar pendidikan toleransi, yaitu: (1) Kesatuan dalam aspek ketuhanan dan pesan-Nya (wahyu); (2) Kesatuan kenabian; (3) Tidak ada paksaan dalam

⁶¹ Joseph Alagha, "Moderation and the Performing Arts in Contemporary Muslim Societies" *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 32 (3): 44-68. 2015, DOI <https://doi.org/10.35632/ajis.v32i3.270>

⁶² Sulaiman, dkk, *Pendidikan Masyarakat: Moderasi, Literasi dan Pernikahan Dini*, (Yogyakarta: Diva Press, 2020) h.14-15

⁶³ Lulu Syifa Pratama, dkk, "Variasi Pemahaman Keagamaan Mahasiswa IAIN Surakarta", *Academika: Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2017, h. 113-125.

⁶⁴ Lihat Sulaiman, dkk, *Pendidikan Masyarakat: ...*, h.14-15

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Mohd Shukri Hanapi, "The Wasatiyyah (Moderation) Concept in Islamic Epistemology: A Case Study of its Implementation in Malaysia". *International Journal of Humanities and Social Science*, 4 (2) 51-62. 2014, DOI <https://doi.org/10.30845/ijhss.v4i2.2014>

⁶⁷ E. Sutrisno, "Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan Actualization of Religion Moderation in Education Institutions", *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 12, No. 1, h. 323-348. 2019, <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i2.113>

beragama; dan (4) Pengakuan terhadap eksistensi agama lain.⁶⁸ Wheatley menyebutkan bahwa kelompok-kelompok Islamis dapat menjadi moderat kalau mereka diberikan kesempatan untuk berpartisipasi di dalam negara yang moderat.⁶⁹

Yusuf Al-Qaradhawi⁷⁰ menjelaskan, sikap wasathiyah sama dengan al-tawazun, yaitu upaya untuk menjaga keseimbangan antara dua sisi/ujung/pinggir yang berlawanan atau bertolak-belakang, agar jangan sampai yang satu mendominasi dan menegasikan yang lain. Sebagai contoh dua sisi yang bertolak belakang; spiritualisme dan materialisme, individualisme dan sosialisme, paham yang realistik dan yang idealis, dan lainnya. Bersikap seimbang yang perlu dimunculkan yaitu dengan memberi porsi yang adil dan proporsional kepada masing-masing sisi/pihak tanpa berlebihan, baik karena terlalu banyak maupun terlalu sedikit.

Abd al-Karim al-Zaid mendefinikan wasathiyah sebagai suatu konsep yang mengandung makna yang luas meliputi setiap karakteristik terpuji (khashah mahmudah) di antara dua sisi tercela/ekstrem (tarfani mazmumani), seperti kedermawanan antara kebakhilan dan kemubaziran, sikap berani antara kepengecutan dan bunuh diri.⁷¹

Qaradhawi⁷² menjelaskan rambu-rambu moderasi tercermin melalui 1) Pemahaman Islam secara komprehensif yang terdapat hukum syariah dan menyesuaikan zaman, 2) memberikan kemaslahatan dan kemajuan terhadap peradapan umat, 3) mendukung kedamaian dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan, 4) mendukung keragaman budaya, politik, dan agama, 5) mengakui keuniversalan Islam sebagai rahmat alam semesta. Jadi sikap moderat adalah suatu sikap yang adil, berimbang, selalu di tengah-tengah yang diambil dari kata *wasat*, lalu didistribusikan keranah pedidikan.

Nah, indikator moderasi pendidikan Islam memiliki empat indikator yakni: (1) Komitme kebangsaan, (2) Toleransi, (3) Anti-

⁶⁸ Mawarti, S. Nilai-nilai Pendidikan Toleransi dalam Pembelajaran Agama Islam, *Jurnal Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 9 (1) DOI.10.24014/trs.v9i1.4324.

⁶⁹ Stephanie Wheatley, *From Violence to Voting: Toward an Islamist Theory of Moderation*. (Disertasi untuk program doctor pada Departemen Church studi Universitas Barley, 2011), h. 215

⁷⁰ Kemenag RI, *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*, (Jakarta: Dirjen Pendis, 2019) h.7-8

⁷¹ Kemenag RI, *Implementasi Moderasi ...*, h.-8

⁷² Lihat Sulaiman, dkk, *Pendidikan Masyarakat: ...*, h.152-159

kekerasan; dan (4) Akomodatif terhadap budaya lokal.⁷³ (5) Terbuka, (6) Dialog, (7) Toleransi.⁷⁴ Dalam konteks beragama, moderasi dipahami sebagai cara pandang, Sikap, (1) Perilaku beragama yang tidak ekstrem, (2) Di tengah-tengah dan (3) Berlaku adil.⁷⁵

B. Komitmen Kebangsaan.

Sebagai bagian dari komitmen kebangsaan adalah penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam kontistusi UUD 1945 dan regulasi yang keluar di bawahnya. Bangsa (*nation*) mengacu kepada sekelompok orang yang memiliki identitas kebangsaan yang sama. Identitas bersama itu bisa dibangun berdasarkan kesamaan bahasa, sejarah, budaya, atau sekadar karena fakta bahwa sekelompok orang itu menempati wilayah yang sama. Komitmen kebangsaan tidak secara ekstrem memaksakan satu agama menjadi ideologi negara, tetapi pada yang sama tidak merebut ruh nilai-nilai spiritual dari keseluruhan ideologi negara. Landasan komitmen kebangsaan dapat dilihat dalam Alquran Al-Hujarat:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”⁷⁶

Hadits Rasulullah SAW berkaitan dengan komitmen kebangsaan adalah hadits sanad dari Abi Nadlrah ra.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ

⁷³ Oman Faturahman, dkk, *Moderasi Beragama...*, h.43

⁷⁴ Hidayatullah, Kholid, “Mazhab Ulama dalam Memahami Maqashid Syari’ah”, *Jurnal Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1 2017, h. 16. DOI: [10.30659/jua.v1i1.1971](https://doi.org/10.30659/jua.v1i1.1971)

⁷⁵ Oman Faturahman, dkk, *Moderasi Beragama...*, h.15-17

⁷⁶ QS. Al Hujarat/49:13

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسْطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدٍ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى

“Telah menceritakan kepada kami Ismail, telah menceritakan kepadakami Sa’idal-Khudri, dari Abi Nadhroh, telah menceritakan kepadaku orang yang mendengar khutbah Rasulullah saw pada pertengahan hari Tasyriq, kemudian beliau berkata: Wahai manusia sekalian, ketahuilah bahwa Tuhan kalian satu, bapak kalian juga satu, ketahuilah tidak ada keutamaan dari orang arab terhadap non Arab, dan juga tidak ada keutamaan orang non Arab dari orang Arab kecuali ketakwaannya”.⁷⁷

Hadist di atas diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad Juz 5 Nomor Hadits 411, al-Baihaqy dalam Syu’abu al-Iman, Juz 4, Nomor Hadits 289, Al-Thabrany dalam al-Ausath Juz 5, Nomor Hadits 86, dan Nomor 4749, Al-Haitsamy dalam Majma’ al-Zawaid, juz 8 nomor hadits 84. Ath-Thabrani memberikan catatan kaki bahwa al-Bazar yang menjadi salah satu perawinya adalah perawi shahih.

Hal ini berbeda dari negara (*state*), yang mengacu kepada batas-batas wilayah di mana sebuah bangsa berada. Dengan kata lain, negara adalah sebuah unit politik dan administratif yang independen, dengan batas-batas yang relatif jelas, yang berhasil mendapatkan pengakuan akan loyalitas dari penduduk yang kemudian menjadi warganegaranya.⁷⁸ Nilai semangat kebangsaan adalah cara berpikir, bertindak dan wawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Nilai cinta tanah air adalah cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsanya⁷⁹

⁷⁷ HR. Imam Ahmad

⁷⁸ Oman Faturahman, dkk, *Moderasi Beragama...*, h.110

⁷⁹ Kemdikbud, *Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 2011)

C. Toleransi

Keberagaman suku, agama, ras, bahasa, keyakinan dan antar golongan telah berjalan sejak lama semenjak kejayaan kerajaan nusantara, dengan melahirkan satu semboyan yang kokoh di Indonesia yaitu “Bhineka Tunggal Ika” yang memiliki arti “Berbeda-beda tetapi tetap satu” yang dijadikan sebagai prinsip toleransi. Landasan toleransi beragama dapat dilihat dalam Alquran Al-An’am:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.”⁸⁰

Toleransi setara dengan sikap positif, dan menghargai orang lain dalam rangka menggunakan kebebasan hak asasi sebagai manusia.⁸¹ Toleransi beragama merupakan realisasi dari ekspresi pengalaman keagamaan dalam bentuk komunitas.⁸² Toleransi merupakan bentuk akomodasi dalam interaksi sosial.⁸³ Islam moderat adalah mereka yang memiliki sikap toleran, rukun dan kooperatif dengan kelompok-kelompok agama yang berbeda.⁸⁴ Pendidikan toleransi adalah tercermin pada 4 (empat) isu pokok yang dipandang sebagai dasar pendidikan toleransi, yaitu: (1) Kesatuan dalam aspek ketuhanan dan pesan-

⁸⁰ QS. Al-An’am/6:108

⁸¹ Casram, “Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural”, *Wawan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2016, h. 187-198, DOI: <http://dx.doi.org/10.15575/jw.v1i2.588>

⁸² Wach, Joachim, *The Comparative Study of Religion*, (Columbia University Press: New York, 1958), h. 121-132

⁸³ Kinloch, C Graham. *Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi* (Bandung, Pustaka Setia 2005), h. 35

⁸⁴ Lihat Lulu Syifa Pratama, dkk, “Variasi Pemahaman ...”, h. 113-125.

Nya (wahyu); (2) Kesatuan kenabian; (3) Tidak ada paksaan dalam beragama; dan (4) Pengakuan terhadap eksistensi agama lain.⁸⁵

D. Anti Kekerasan

Tindak kekerasan merupakan perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, dalam jaringan (*daring*), atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi dilingkungan satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan properti, luka/cedera, cacat, dan atau kematian.⁸⁶

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal” (QS. Ali Imran/3:159)

Kelompok agama pelaku kekerasan, yang kecewa terhadap dunia barat dan kedangkalan ilmu agama, mereka tidak menyadari bahwa bangsa Indonesia sudah berabad-abad yang lalu memiliki keragaman dalam agama yang dikenal dengan Bhineka Tunggal Ika; berbeda-beda tetapi tetap satu jua.⁸⁷ Konflik dengan berlatar belakang agama, etnik dan suku adalah sebuah pakta yang tidak terbantahkan dari masa lalu hingga masa kini. Namun konflik ini harus dikurangi sedemikian rupa

⁸⁵ Lihat Mawarti, S. Nilai-nilai Pendidikan Toleransi..., h. 70-90

⁸⁶ Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik, Penyelenggaraan Ujian Nasional, Dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan Pada Smp/Mts Atau Yang Sederajat Dan Sma/Ma/Smk Atau Yang Sederajat.

⁸⁷ Abdurrahman Wahid, (ed) Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional, Cet. I, (Jakarta: The Wahid Institute, 2009), h. xxvi

karena dengan satu atau lain alasan, konflik berani menganggangi nilai-nilai luhur seperti agama, adat istiadat, persaudaraan (*ukhuwa al-basyariah*) dan persatuan universal umat manusia (*unity of humankind*). Ketika konflik terjadi, maka agama harus hadir untuk menawarkan spirit angin kedamaian dan perdamaian. Dengan kata lain pendidikan agama perlu memfungsikan agama sebagai suatu cara dalam revolusi konflik.⁸⁸

E. Akomodatif Terhadap Budaya Lokal

Masyarakat Indonesia memiliki budaya dan daya resap cukup tinggi terkait dengan ajaran agama, hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya berbagai praktik ibadah atau ritual yang kompleks dan memiliki kemiripan serta kesamaan di antaranya. Pada masa kejayaan agama Hindu dan Budha dapat berdampingan dan membangun tradisi secara bersama-sama. Ketika Islam masuk, tradisi tersebut bersinggungan dengan ajaran agama Islam, mengalami akulturasi dan sinkritisme.

Agama di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri dalam mengakomodir budaya lokal. Contoh agama Islam: perjumpaan agama dengan budaya lokal itu mengambil banyak bentuk. *Pertama*, mengalami benturan (*clash*) yang sampai pada titik di mana budaya setempat dihabisi dan diganti yang baru dengan islamisasi misalnya, yang terjadi di Padang tempo dulu. *Kedua*, ada yang mengambil jalan akomodasi, artinya ada pertemuan saling mengisi dan tidak saling menjatuhkan. “Islam diterima tapi sebatas simboliknya, adapun substansi seperti kepercayaan terhadap leluhur tetap dijaga. *Ketiga*, mengambil bentuk hibriditas, artinya menerima agama tapi separohnya saja, sisanya tradisi setempat, bentuk ini kemudian biasa dikenal dengan misalnya, Islam Jawa, Islam Banjar, Islam Sasak dan sebagainya.⁸⁹

Lebih jauh lagi di lihat secara historis Wali Songo menakomodasi nilai-nilai lokal dalam Islam sebagai ajaran agama. Misalnya saja Sunan Bonang mengubah gamelan Jawa yang kental dengan estetika Hindu menjadi bernuansa zikir yang mendorong kecintaan pada kehidupan transendental. Tembang “Tombo Ati” adalah salah satu karyanya, lebih jauh lagi pentas pewayangan Sunan Bonang mengubah lakon dan

⁸⁸ Zakiyudin Baidhawiy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta : Erlangga, 2005) h. 84

⁸⁹ Ahmad Baso, *Tradisi Lokal dan Masa Depan Agama...*, h. 3

memasukkan tafsir-tafsir khas Islam.⁹⁰

F. Terbuka (inklusif)

Sikap terbuka menerima, mengakui, menghormati dan menghargai, keberagaman perbedaan budaya, bahasa, keyakinan, tradisi, nilai, norma, agama, status sosial di sekolah. Sikap inklusif dapat di lihat dalam dalil Alqur'an Al-Baqarah/2:62 dan Al- Maidah/5:69, dua ayat Alquran tersebut memiliki kesamaan:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَسِيحِيَّةَ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang sabi'in, siapa saja (di antara mereka) yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati”.⁹¹

Teologi inklusif sesungguhnya membuka ruang iman, yang pada umumnya bersifat eksklusif menjadi ruang inklusif. Teologi inklusif pada hakekatnya meyakini bahwa Tuhan itu Esa, tetapi Nabi membawa perintah-Nya beragam untuk makhluk-Nya beragam pula.⁹² Keterbukaan dan perjumpaan agama dengan agama yang beragam (mazhab, aliran, dan sekte), kebudayaan dengan kebudayaan yang beragam pula. Hal ini mengajarkan kepada siswa pada proses pendewasaan dan memiliki sudut pandang dan banyak cara untuk memahami realitas. Pendidikan agama Islam berbasis multikultural di harapkan mengkondisikan atau merekayasa ruang sosial sekolah, siswa diharapkan ketika berjumpa dengan pluralitas pandangan dan perbedaan radikal yang menantang identitas lama dan segalanya mulai

⁹⁰ Lihat Muhammad Harfin Zuhdi, *Dakwah dan Dialektika...*, h. 46-64

⁹¹ QS. Al-Baqarah/2:62

⁹² Misrawi, Zuhairi, *Al-Qur'an Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme*, (Jakarta: Fitrah, 2007), h. 202

tampak dalam sinar baru tidak merasa silau atau terheran-heran. Hasil pendidikan Islam berbasis multikultural adalah kemauan untuk memulai pendalaman tentang makna diri, identitas, dunia kehidupan, agama dan kebudayaan diri sendiri dan orang lain.⁹³

G. Dialog

Allah SWT mencintai dialog, di dalam Alqur'an diceritakan Allah SWT berdialog dengan Malaikat, Manusia, dan Iblis. Allah SWT berdialog dengan Malaikat terkait dengan kehendak Allah SWT "menjadikan seseorang khalifah di muka bumi" dan Malaikat menjawab "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan senantiasa membuat kerusakan" (QS. Al-Baqarah/2;30-34). Allah Swt berdialog dengan Manusia sejak dini di dalam rahim ibu (QS. Al-A'raf/7:172). Allah SWT berdialog dengan Iblis terkait dengan keengganannya Iblis bersujud kepada ciptaanNya (QS.Shad/38:75-85). Dari ayat-ayat tersebut dapat diambil ikhtibar bahwa begitu tinggi nilai dialog di mata Allah SWT:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا
غَافِلِينَ ۖ

"Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi (tulang belakang) anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka (seraya berfirman), "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi." (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari Kiamat kamu tidak mengatakan, "Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini."⁹⁴

Lembaga pendidikan yang harus menjadi motor penggerak moderasi beragama juga mencakup yang formal maupun non formal, termasuk pesantren, majelis taklim, sekolah minggu, pasraman, dan sebagainya. Sekolah menjadi sarana tepat guna menyebarkan

⁹³ Zakiyudin Baidhaw, *Pendidikan Agama Berwawasan ...*, h. 83

⁹⁴ QS. Al-A'raf/7:172

sensitivitas peserta didik pada ragam perbedaan. Membuka ruang dialog, guru memberikan pemahaman bahwa agama membawa risalah cinta bukan benci dan sistem di sekolah leluasa pada perbedaan tersebut.⁹⁵ Manakala adanya benturan perbedaan budaya, agama dan sosial masyarakat, Reychler mengemukakan 5 langkah dalam mengelola perbedaan *Pertama*, adanya saluran komunikasi yang efektif dan harmoni sehingga memungkinkan terjadi proses diskusi, klarifikasi, dan koreksi terhadap penyebaran informasi; *Kedua*, bekerjanya lembaga penyelesaian masalah, baik yang bersifat formal seperti pengadilan atau informal seperti lembaga adat dan agama; *Ketiga*, adanya tokoh-tokoh pro perdamaian yang memiliki pengaruh, sumberdaya dan strategi efektif dalam mencegah mobilisasi masa; *Keempat*, struktur sosial-politik yang mendukung terwujudnya keadilan dalam masyarakat; dan *Kelima*, struktur sosial-politik yang adil bagi bertahannya integrasi sosial.⁹⁶

H. Berperilaku Beragama Tidak Ekstrem.

Hidup berdampingan, toleran dan damai tanpa harus menilai perbedaan bagi dari segi etnis, suku, agama, bahasa, keyakinan, budaya, dan status sosial merupakan kehidupan yang idel yang di harapkan. Agama-agama lain selain Islam juga mempunyai hak untuk mendapatkan penghormatan, penghargaan, dan pengakuan, dari umat Islam.

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ
اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَدِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يُذَكَّرُ
فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

“ (yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, “Tuhan kami ialah Allah.” Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya

⁹⁵ Oman Faturahman, dkk, *Moderasi Beragama...*, h.147

⁹⁶ Luc Reychler, “Challenges of Peace Research”, *International Journal of Peace Studies*, Vol. 11 No. 1 Spring/summer 2006, h.1-16

banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh, Allah Mahakuat, Mahaperkasa.⁹⁷

Ada pemeluk agama yang memiliki pemikiran ekstrem meyakini mutlak kebenaran satu tafsir teks agama, seraya menganggap sesat penafsir se lainnya, kelompok ini biasa disebut ultrakonservatif. Di sisi lain, ada juga umat beragama yang esktrm mendewakan akal hingga mengabaikan kesucian agama, atau mengorban kan kepercayaan dasar ajaran agamanya demi toleransi yang tidak pada tempatnya kepada pemeluk agama lain, mereka biasa disebut ekstrem liberal, keduanya perlu dimoderasi.⁹⁸ Moderat merupakan tidak ekstrim dalam urusan agama.⁹⁹ Moderat berarti masing-masing tidak boleh ekstrem di masing-masing sisi pandangannya dan harus saling mendekat dan mencari titik temu.¹⁰⁰

Tidak dapat kita pungkiri bahwa kehidupan bersosial selalu dipenuhi oleh dinamika. Dinamika kehidupan selalu mengisyaratkan terjadinya transformasi, baik menjadi lebih baik atau bisa jadi lebih buruk. Sedangkan adanya konflik yang terjadi pada masyarakat karena ketidakmampuan menerima dan menjalani perubahan yang terjadi. Secara esensial siapapun, baik individu maupun sosial menginginkan kehidupan yang aman damai dan tenteram, akan tetapi realitas hidup justru bertolak belakang, inilah yang menjadi tugas masyarakat untuk mengelola perbedaan sebagai modal utama dalam membangun kerukunan bermasyarakat.¹⁰¹

I. Sikap di Tengah-Tengah.

Konsep “*ummatan washatan*” dimaknai sebagai komunitas umat Islam secara universal yang mempunyai karakter adil, seimbang dan sempurna untuk mengabdikan kepada Allah. Artinya umat yang menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat yakni terdapat aspek moderasi

⁹⁷ QS. Al-Hajj/22:40

⁹⁸ Oman Faturahman,dkk, *Moderasi Beragama...*, h.7

⁹⁹ Hanapi, Mohd Shukri, “The Wasatiyyah (Moderarion)”..., h. 51-62.

¹⁰⁰ Sutrisno, E., “Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan Actualization of Religion Moderation in Education Institutions”, *Jurnal Bimas Islam*, 12 (1): h. 323-348. 2019.

¹⁰¹ Ngainun Naim dan Sauqi, Achmad, *Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011) h. 99

di dalamnya.¹⁰² Alquran menyebut umat Islam sebagai *ummah wasatha* dalam Al Baqarah:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

“Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) ”umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menya-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia”¹⁰³

Ummah wasatha yaitu umat “tengahan”, “moderat”, adil, dan “terbaik”. Sikap moderat (*tawassuṭ*) tersebut digambarkan sebagai *ummahan wasathan*, menyebutkan bahwa *wasatiyah* berarti adil dan terbaik Al-Qurtubiy.¹⁰⁴ Kemudian menurut Ibnu Katsir, *Wasatiyah* tidak berarti mengambil posisi tengah atau dalam suatu persoalan, seperti posisi antara yang baik dan yang buruk. Sikap moderat (*tawassuṭ*) tersebut digambarkan sebagai *ummahan wasathan*, menyebutkan bahwa *wasatiyah* berarti yang terbaik, paling rendah hati dan adil.¹⁰⁵ Moderasi beragama dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak

¹⁰² Lihat Joseph Alagha, “Moderation and the Performing”..., h. 46

¹⁰³ QS. Al Baqarah/2:143

¹⁰⁴ Abu ‘Abd Allah Muhammad bin Ahmad al-Ansariy Al-Qurtubiy, *Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, Vol. 1. Beirut, (Lubnan: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993) h. 104-105

¹⁰⁵ Ibn Kathir, al-Hafiz Abi al-Fida’ Isma’il, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azim*, Vol. 1. Beirut, Lubnan: Dar al-Ma’rifah, 1992) h. 196-197

adil dan tidak ekstrem dalam beragama.¹⁰⁶

J. Berlaku Adil dan Berimbang

Inti dari moderasi beragama adalah adil dan berimbang dalam memandang, menyikapi, dan mempraktikkan semua konsep yang berpasangan di atas. Dalam KBBI, kata “adil” diartikan: (1) tidak berat sebelah/tidak memihak; (2) berpihak kepada kebenaran; dan (3) sepatutnya/ tidak sewenang-wenang. Kata “wasit” yang merujuk pada seseorang yang memimpin sebuah pertandingan, dapat di maknai dalam pengertian ini, yakni seseorang yang tidak berat sebelah, melainkan lebih berpihak pada kebenaran.¹⁰⁷

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”¹⁰⁸

Berimbang misalnya, keseimbangan akal dan wahyu, antara jasmani dan rohani, antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individual dan kepentingan komunal, antara keharusan dan kesukarelaan, antara teks agama dan ijtihad tokoh agama, antara gagasan ideal dan kenyataan, serta keseimbangan masa lalu dan masa depan.¹⁰⁹ Selanjutnya menurut Al-Raziy sikap moderat (*tawassuṭ*) tersebut digambarkan sebagai *ummatan wasaṭhan*, menyebutkan bahwa *wasatiyah* memiliki 4 makna, yakni: 1). Adil, tidak memihak antara kedua belah pihak, 2). Sesuatu yang terbaik, 3). Yang paling rendah hati dan sempurna, dan 4). Tidak ekstrim dalam urusan agama.¹¹⁰

¹⁰⁶ Oman Faturahman, dkk, *Moderasi Beragama...*, h.7

¹⁰⁷ Oman Faturahman, dkk, *Moderasi Beragama...*, h.19.

¹⁰⁸ QS. An-Nahl/16:90

¹⁰⁹ Oman Faturahman, dkk, *Moderasi Beragama...*, h.19

¹¹⁰ Fakh al-Din Al-Raziy, *Al-Tafsir al-Kabir aw Mafatih al-Ghayb*, Vol. 2. Beirut, (Lubnan: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990) h. 88-89.



BAB 4

TEORI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

A. Tipologi Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural atau multibudaya menurut Will Kymlicka adalah, merupakan suatu pengakuan, penghargaan dan keadilan terhadap etnik minoritas baik yang menyangkut hak-hak universal yang melekat pada hak-hak individu maupun komunitasnya yang bersifat kolektif dalam mengekspresikan kebudayaannya.¹¹¹

Setidaknya ada 5 Tipologi pendidikan multikultural yang dikemukakan oleh Sleeter dan Grant (1987) juga di dalam buku Thomas J. La Belle and Christopher Ward; demikian juga dikemukakan dalam Banks & Banks. Terdapat lima tipologi pendidikan multikultural yang berkembang sampai sekarang¹¹²:

Pertama, Mengajar mengenai kelompok siswa yang memiliki budaya yang lain (cultur difference). Perubahan ini terutama pada siswa dalam transisi dari sebagai kelompok kebudayaan ke dalam *mainstream* budaya yang ada.

Kedua, Hubungan manusia (human relation). Program ini membantu siswa dari kelompok-kelompok tertentu sehingga dia dapat mengikuti bersamasama dengan siswa yang lain dalam kehidupan sosial.

¹¹¹ Will, Kymlicka, "Misunderstanding Nationalism" dalam *Theorizing Nationalism*, ed. R. Beiner, (Albany: State University of New York, 1999), h. 24.

¹¹² Zainal Arifin, *Pendidikan Multikultural-Religius untuk Mewujudkan Karakter Peserta Didik yang Humanis-Religius* (Jurnal Pendidikan Islam Vol 1 No 1 Juni 2012, Faculty of Education and Teaching Science State Islamic University (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta) Hal 5. Lihat juga buku: *Pendidikan Multikultural dan Revitalisasi Hukum Adat, dalam Perspektif Sejarah*, Editor: Ki Supriyoko, (Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala Tahun Terbit : Juli 2005)

Ketiga, Single group studies. Program ini mengajarkan mengenai hal-hal yang memajukan pluralisme tetapi tidak menekankan kepada adanya perbedaan stratifikasi sosial yang ada di dalam masyarakat.

Keempat, Pendidikan multikultural. Program ini merupakan suatu reformasi pendidikan di sekolah-sekolah dengan menyediakan kurikulum serta materi-materi pelajaran yang menekankan kepada adanya perbedaan siswa dalam bahasa, yang keseluruhannya untuk memajukan pluralisme kebudayaan dan ekualitas sosial.

Kelima, Pendidikan multikultural yang sifatnya rekonstruksi sosial. Program ini merupakan suatu program baru yang bertujuan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan kultural dan menentang ketimpangan sosial yang ada dalam masyarakat. Program yang kelima ini dapat juga disebut sebagai “*critical multicultural education*”.

B. Pendekatan, Tipologi dan Pembelajaran Pendidikan Multikultural

Empat pendekatan kurikulum pendidikan berbasis multikultural Levinson sebenarnya merujuk pada empat level integrasi konten multikulturalisme James A. Banks. Empat level pendekatan tersebut adalah 1) pendekatan kontribusi; 2) pendekatan aditif; 3) pendekatan transformasi; dan 4) pendekatan aksi sosial. Pendekatan ini merupakan tahapan-tahapan integrasi konten multikulturalisme (*content integration*) dalam kurikulum (tipologi kurikulum). Empat level integrasi konten multikulturalisme dalam kurikulum menurut Levinson, dan Banks dapat dijelaskan berikut ini:

Pertama; pendekatan kontributif (*contribution approach*), yaitu melibatkan konten multikulturalisme dari beberapa kebudayaan yang ada seperti hari-hari libur, hari-hari pahlawan, dan peristiwa-peristiwa tertentu dari berbagai kebudayaan. *Kedua*; pendekatan aditif (*additif approach*), yaitu bentuk penambahan muatan-muatan, konsep-konsep, tema-tema, dan perspektif-perspektif ke dalam kurikulum tanpa mengubah struktur dasarnya. *Ketiga*; pendekatan transformatif (*transformation approach*), yaitu secara aktual berupaya mengubah struktur kurikulum dan mendorong siswa-siswa untuk melihat dan meninjau kembali konsep-konsep, isu-isu, tema-tema dan problem-problem lama, kemudian memperbaharui pemahaman dari berbagai perspektif dan sudut pandang etnik. Dan *keempat*; pendekatan aksi

sosial (*social action approach*), siswa menangkap isu-isu aktual sosial, membuat keputusan, dan berupaya untuk melakukan perubahan sosial.¹¹³

C. Konsep Pendidikan Multikultural

Menurut Geertz masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang terbagi dalam sub sistem yang pada masing-masing sub sistem tersebut terkait dengan ikatan-ikatan primordial.¹¹⁴ Sejalan dengan pemikiran tersebut Parekh dalam bukunya '*Rethinking Multiculturalism*' mengatakan bahwa multikulturalisms merupakan sebuah paham tentang kesetaraan dan perbedaan yang menjunjung tinggi penghargaan.¹¹⁵ Terdapat beberapa ciri-ciri masyarakat yang multikultur diantaranya terjadi segmentasi, memiliki struktur dalam lembaga yang non-komplementer, *consensus* rendah, relatif berpotensi timbulnya konflik, tumbuh integrasi antar kelompok dengan paksaan dan adanya dominasi politik terhadap kelompok lain. Namun meskipun demikian Parekh dalam Rustanto mengkategorikan multikulturalisme menjadi lima jenis yaitu:

1. Multikulturalisme isolasionis merupakan berbagai kelompok kultural dalam masyarakat menjalankan hidup secara otonom dan interaksi antar kelompok atau individu terjadi sangat minimalis.
2. Multikulturalisme akomodatif merupakan ketika masyarakat yang memiliki kultur dominan membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kebudayaan kaum minoritas. Penyesuaian dan akomodasi tersebut dilakukan dengan pembuatan undang-undang, hukum, kebijakan yang sensitif secara kultural dan memberikan kaum minoritas kebebasan untuk mempertahankan dan mengembangkan identitas masing-masing. Begitu sebaliknya, kaum minoritas tidak menganggap kaum mayoritas atau dominan sebagai ancaman.
3. Multikulturalisme otonomis ini terdiri dari masyarakat plural yang didominasi oleh suatu kelompok dan kelompok tersebut berusaha untuk mewujudkan kesetaraan dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik

¹¹³James A. Banks & Cherry A. McGee Banks (editors), *Multicultural;...*, h. 238-239

¹¹⁴Clifford Geertz, *The Interpretation of Culture*, (New York: Basic Books, 1973)

¹¹⁵Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism: Keragaman Budaya dan Teri Politik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008)

yang secara kolektif dapat diterima. Perhatian pokok pada kultural ini menuntut kesetaraan dan menolak adanya dominansi dari kelompok tertentu.

4. Multikulturalisme kritis merupakan suatu kultur ketika kelompok-kelompok kultural tidak terlalu fokus dengan kehidupan kultural otonom tetapi lebih membentuk penciptaan kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif pembeda mereka.
5. Multikulturalisme kosmopolitan berusaha menghapus batas-batas kultural untuk menciptakan sebuah masyarakat dimana setiap individu tidak lagi terikat pada budaya tertentu dan sebaliknya secara bebas terlibat dalam percobaan-percobaan interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing.¹¹⁶

Multikulturalisme merupakan watak dasar dari kehidupan sebagaimana yang bisa kita temukan dalam berbagai hal. Karakter mendasar multikulturalisme adalah adanya keragaman yang bersifat terpelihara secara terus-menerus sehingga membentuk modal sosial yang kuat.¹¹⁷ Seorang pendidik harus diperhatikan lima dimensi jika ingin melaksanakan pendidikan multikultural yakni (1) *Content Integration*, (2) *Knowledge Construction*, (3) *Reducing Prejudice* (4) *An Equality Pedagogy*, (5) *An Empowering School Cultural*.¹¹⁸ Pendidikan multikultural adalah proses pendidikan yang di dalamnya diajarkan bagaimana menerima, menghormati perbedaan dan keragaman serta menghadapkan siswa untuk melihat dunia dengan cara yang dilakukan orang lain.¹¹⁹ menurut Banks¹²⁰ “*multicultural education is at least three things: an idea or concept, an educational reform movement, and a process* (pendidikan multikultural setidaknya mencakup tiga hal: yang pertama yaitu suatu ide atau gagasan, sebuah gerakan reformasi pendidikan, dan

¹¹⁶Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur di Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015)

¹¹⁷Raslimin, *Multikulturalisme: Teori dan Aplikasi dalam Pendidikan IPS*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2020) h. 79

¹¹⁸James A. Bank, (ed), *Multicultural Education: Issues and Perspectives*, (London: Allyn and Bacon Press, 1993) h. 16

¹¹⁹Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism: Keragaman Budaya dan Teri Politik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008) h. 302

¹²⁰J. A. Banks, & C. A. M. Banks, *Handbook of Research on Multicultural Education*, (New York: Mac Millian, 2005) h. 1

merupakan sebuah proses).

Tilaar menyebutkan ada empat nilai dasar dalam pendidikan multikultural yaitu 1) Apresiasi terhadap adanya kenyataan pluralitas budaya dalam masyarakat, 2) Pengakuan terhadap harkat manusia dan hak asasi manusia, 3) pengembangan masyarakat dunia, 4) Pengembangan tanggung jawab manusia terhadap planet bumi.¹²¹

¹²¹ H.A.R Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*, (Jakarta: Indonesia Tera, 2003) h.171



BAB 5

TEORI PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURAL

A. Pengertian, dan Tujuan Pendidikan Islam Multikultural

Indonesia merupakan sebuah bangsa yang memiliki masyarakatnya sangat majemuk atau pluralis. Multikultural pada esensi dasarnya adalah menghargai keberagaman, mengakui perbedaan dan siap untuk berdampingan dengan suku, ras, agama dan budaya yang berbeda. Azra dalam Djamas mengatakan bahwa multikultural merupakan sebuah pandangan dunia tentang kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa memandang perbedaan budaya, etnis, gender, bahasa dan agama.¹²² Adapun masyarakat multikultural adalah sekumpulan yang terdiri dari dua atau lebih komunitas atau kelompok secara kultural dan ekonomi terpisah-pisah, secara struktur kelembagaan berbeda satu sama lainnya.¹²³

Islam telah menawarkan semangat multikulturalisme baik secara yuridis maupun secara historis umat Islam. Menurut Azra, pendidikan multikultural menemukan pijakannya dalam piagam madinah. Piagam ini menjadi rujukan suku dan agama pada waktu itu dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Piagam ini juga menjadi rujukan orang-orang yang ingin menjelaskan sistem pemerintahan dan ketatanegaraan Islam. Selanjutnya pijakan multikultural juga bisa dilacak pada akhlak

¹²² Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pascakemerdekaan*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2009), h. 7.

¹²³ Fita Mustafida dan Yakub Cikusin, "Pembelajaran Nilai Multikultural dalam Budaya Madrasah di MIN 1 kota Malang", *Jurnal Pendidikan Multikultural*, Vol. 3 No. 1 2019, h. 21-36, DOI: <http://dx.doi.org/10.33474/multikultural.v3i1.2550>

dan kepribadian Rasulullah saw. Ia seorang manusia multikulturalis. Ia sangat menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi perbedaan.

Kepribadian Rasulullah diakui oleh beberapa Rohaniawan non muslim, Uskup Sidon Paul of Antioch, Theodore Abu Qurrah, Kenneth Cragg, dan beberapa sarjana barat, seperti William Muir, dan Montgomery Watt. Kenyataannya bahwa Piagam Madinah dan pribadi Rasulullah menjadi pijakan multikultural. Dan secara tidak langsung menjelaskan al-Quran sebagai muara pijakan tersebut. Hal ini karena dua alasan: ¹²⁴ *Pertama*, Piagam Madinah diajukan oleh Rasulullah sebagai acuan hidup bermasyarakat karena dukungan ayat-ayat Madaniyah. *Kedua*, ada keterangan yang menyatakan bahwa akhlak Rasulullah adalah al-Qur'an. Artinya, kedua alasan ini menegaskan bahwa pijakan pendidikan multikultural dalam Islam adalah al-Qur'an. Menurut pandangan Azra di atas, pendidikan multikultural dalam persepektif Islam terdapat dalam kepribadian nabi Muhammad saw secara khusus, dan secara umum terdapat dalam piagam madinah. Piagam madinah menurutnya adalah konsensus antar pemeluk agama untuk menemukan kesepakatan tentang tata kelola hidup bersama.

Pendidikan multikultural mengungkapkan bahwa dalam program pendidikan multikultural, fokus tidak lagi diarahkan semata-mata kepada kelompok rasial, agama dan kultural domain atau mainstream. Pendidikan multikultural sebenarnya merupakan sikap “peduli” dan mau mengerti (*difference*), atau “*politics of recognition*” politik pengakuan terhadap orang-orang dari kelompok minoritas.¹²⁵ Kemudian Anderson dan Krathwohl¹²⁶ mendefenisikan pendidikan multikultural yaitu pendidikan multibudaya yang sarat dengan penghargaan, penghormatan dan kebersamaan dalam suatu komunitas yang majemuk.

Jika lebih jauh lagi masuk keranah teknisnya, seorang pendidik harus diperhatikan 4 dimensi jika ingin melaksanakan pendidikan multikultural yakni 1) *Content Integration*: Guru menggunakan contoh

¹²⁴ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), hal.13-14

¹²⁵ H.A.R., Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2004), h. 59.

¹²⁶ Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. *Taxonomy for learning, teaching and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives*, (New York, NY: Longman, 2001)

dan bagian-bagian dari perbedaan budaya saat mengajar, 2) *Knowledge Construction*: Guru membantu siswa untuk mengerti, mencari, dan memutuskan bagaimana asumsi implisit, batasan pemikiran perspektif di dalam suatu ilmu mempengaruhi bagaimana ilmu dibentuk atau dibangun, 3) *An Equality Pedagogy*: Timbul saat guru memodifikasi cara mengajar mereka dalam upaya untuk memfasilitasi pencapaian akademik siswa yang memiliki perbedaan ras, kebudayaan, jenis kelamin dan kelas sosial, 4) *Reduction Prejudice*: mengikis prasangka buruk di lingkungan sekolah, 5) *An Empowering School Cultural*: dalam rangka menciptakan budaya di sekolah, guru harus bisa mencermati saat melakukan, pengelompokan, pemberian nama sehingga tidak terjadi ketidak-proporsionalan dalam pencapaian dan inter relasi antara siswa agar tidak menimbulkan kekuatan siswa dari ras suku, jenis kelamin dan kelas sosial yang berbeda.¹²⁷

Konsep pendidikan Islam multikultural adalah sebuah model pendidikan yang menekankan pada nilai-nilai moral, seperti kasih sayang, tolong menolong, toleransi, menghargai keragaman dan sikap-sikap lain yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.¹²⁸ Dalam keragaman agama-agama, yang muncul dalam suatu masyarakat multikultural baik yang memiliki sistem pemerintahan republik atau monarki, perbedaan sering menjadi pemicu munculnya berbagai hambatan dalam kohesi sosial.¹²⁹ Pendidikan Islam multikultural berakar pada nilai-nilai inklusif seperti nilai-nilai *at tawassuth* (moderat), *at tassamuh* (toleran), *at ta'awun* (tolong-menolong), dan *at tawazun* (harmoni). Nilai-nilai pendidikan Islam multikultural terdapat pada: 1) nilai perdamaian, 2) nilai inklusivisme, 3) nilai kearifan, 4) nilai toleransi, 5) nilai humanisme, 5) nilai kebebasan.¹³⁰ Bahwa manusia diciptakan untuk bisa saling mengenal satu dengan yang lain, sehingga untuk merealisasikan hal tersebut diperlukan sebuah konsepsi hidup bermasyarakat yang riil berupa: 1) toleransi, 2) dialog dan musyawarah,

¹²⁷ James Banks, *Multicultural Education: Historical Development, Dimensions, And Practice*, (Review of Research in Education, 1993), h. 16

¹²⁸ Yaya Suryana, & H.A.Rusdiana, *Pendidikan Multikultural: Konsep, Prinsip dan Implementasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 321-322

¹²⁹ Bikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism; Cultural Diversity and Political Theory* (New York: Palgrave Macmillan, 2005), h.99

¹³⁰ Lihat Suryana, & H.A.Rusdiana, *Pendidikan Multikultural...*, 323-325.

3) tolong-menolong, 4) silaturahmi, 5) persaudaraan.¹³¹

B. Perkembangan Pendidikan Islam Multikultural di Indonesia

Azra¹³² mengungkapkan bahwa Multikulturalisme secara sederhana dapat dipahami sebagai pengakuan, bahwa sebuah negara atau masyarakat adalah beragam dan majemuk. Mayoritas negara di dunia mempunyai budaya yang multikultur. Hanya sedikit negara bersifat monokultur. Negara-negara monokultur itu pun, harus pula tetap bergaul dalam dunia internasional dan berinteraksi dengan bangsa yang mempunyai tradisi, budaya yang berbeda. Dengan demikian, multikulturalisme merupakan sunnatullah yang tidak dapat ditolak bagi setiap negara bangsa di dunia. Multikulturalisme dapat pula dipahami sebagai “kepercayaan” kepada normalitas dan penerimaan keragaman. Pandangan dunia multikulturalisme seperti ini dapat dipandang sebagai titik tolak dan fondasi bagi kewarganegaraan yang berkeadaban. Di sini, multikulturalisme dapat dipandang sebagai landasan budaya (cultural basis) tidak hanya bagi kewargaan dan kewarganegaraan, tetapi juga bagi pendidikan.

Begitu juga dalam pendidikan multikultural, pendidikan multikultural merupakan gejala baru dalam perjalanan umat manusia yang mendambakan persamaan hak termasuk mendapatkan pendidikan yang sama untuk semua orang (*education for all*). Multikulturalisme bertentangan dengan monokulturalisme dan asimilasi yang telah menjadi norma dalam paradigma negara dan bangsa (nation-state) sejak awal abad 17. Monokulturalisme menghendaki adanya kesatuan budaya secara normatif istilah ‘monokultural’ juga dapat digunakan untuk menggambarkan homogenitas yang belum terwujud (*pre-existing homogeneity*).¹³³

Pendidikan multikultural merupakan proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitas

¹³¹ Mundzier Suparta, *Islamic Multicultural Education*, (Jakarta: al-Ghozali Center, 2008), h. 55-68.

¹³² Azyumardi azra, *Pendidikan Agama: Membangun Multikulturalisme Indonesia*, dalam Zakiyuddin Baidhowy, *Pendidikan Agama Berwawasan MultiKultural* (Jakarta: Erlangga, 2005), VII

¹³³ Robert Hefner, *Introduktion: Multiculturalism and citizenship in Malaysia, Singapur, and Indonesia*, (Honolulu: University of Hawaii Press, 2001) h. 2-3

sebagai konsekuensi keragaman budaya, suku, agama, ekonomi, sosial dan politik. Sebagai salah satu negara multikultural terbesar didunia sudah seharusnya Indonesia mengembangkan pendidikan multikultural sebagai salah satu alternatif mencegah konflik sosial budaya yang sering kali terjadi di Indonesia. Maka dari itu, Tilaar¹³⁴ mengungkapkan bahwa, pendidikan multikultural merupakan pendidikan yang mengajarkan akan hidup dalam perbedaan, membangun saling percaya (*mutual trust*), memelihara saling menghargai (*mutual understanding*), menjunjung sikap saling menghargai (*mutual respect*), terbuka dalam berfikir, apresiasi dan interdependensi, resolusi konflik dan rekonsiliasi nir-kekerasan.

Sedangkan unutupik memahami nilai-nilai multikultural secara umum terdapat empat nilai inti (*core value*) antara lain: apresiasi terhadap adanya kenyataan pluralitas budaya dalam masyarakat, pengakuan terhadap harkat manusia dan hak asasi manusia, pengembangan tanggung jawab masyarakat dunia, pengembangan manusia terhadap dunia. Sejalan dengan pengembangan manusia dunia hari ini, konsep pendidikan “inter-kultural” dan “inter-kelompok” (*inter-cultural and inter-group education*). Pada dasarnya pendidikan interkultural merupakan cross-cultural education yang bertujuan mengembangkan nilai-nilai universal yang dapat diterima berbagai kelompok masyarakat berbeda.¹³⁵

Dari kesemua keterangan di atas, kita mafhum bahwa multikulturalisme demokratis, adalah pra-syarat terbentuknya negara multikultural yang tidak abai pada kenyataan. Negara yang multikultural, memerlukan kesadaran bersama bahwa untuk hidup dalam satu payung negara-bangsa, perlu ikatan perekat. Di Indonesia, kita meyakini Pancasila sebagai ikatan perekat itu. Dalam kesadaran hidup bersama berbangsa dan bertanah air, kita harus mengakui kesetaraan hak dan kewajiban sebagai anak bangsa sekaligus warga negara.

Bukti nyata bahwa PAI belum berhasil dalam mencetak generasi yang toleran dan inklusif misalnya dapat ditilik dari hasil survei yang dilakukan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif

¹³⁴Munif. Multikulturalisme dalam Pendidikan Madrasah: Nilai, Implikasi dan Model Pngembangannya, (Surabaya: Imtiyas, 2016). h.80-91

¹³⁵Thomas J La Belle, *Multiculturalism and Education: Diversity and Its Impact on Schools and Society* (United States: State of University of New York press,1994)

Hidayatullah, Jakarta pada penghujung tahun tahun 2008. Disebutkan bahwa mayoritas guru PAI dan pelajar Islam di sekolah-sekolah di Jawa tidak toleran dan menolak pluralisme agama. Survei tersebut antara lain menyebutkan bahwa 62,4% dari pada guru agama Islam yang disurvei, yang berasal dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, menolak kepemimpinan non-muslim. Survei tersebut juga mengungkapkan 68,6% dari responden menolak prinsip-prinsip non-muslim menjadi peraturan di sekolah mereka dan 33,8% menolak keberadaan guru non-muslim di sekolah-sekolah mereka. Sekitar 73,1% dari pada guru tidak menghendaki para penganut agama lain membangun rumah ibadah di lingkungan mereka. Sementara 87% melarang para siswanya untuk mempelajari agama-agama lain. Sementara itu, sebanyak 21,3% responden menghendaki hukuman mati bagi mereka yang murtad atau keluar dari agama Islam.¹³⁶

Temuan yang hampir sama juga dilansir oleh Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP). Survei LaKIP yang dilakukan pada Oktober 2010-Januari 2011 melibatkan responden 590 dari total 2.639 guru PAI dan 993 siswa beragama Islam dari jumlah 611.678 siswa SMP dan SMA, di 59 sekolah swasta dan 41 sekolah negeri di Jakarta, di Jabodetabek. Hasil survei tersebut antara lain menyebutkan 41,8%-63,8 % mendukung intoleransi dan kekerasan terhadap warga non-muslim. Hasil survei juga menyebutkan bahwa sebanyak 57,2% guru dan 45,2% siswa tidak setuju bila non-muslim menjadi kepala sekolah.¹³⁷

Data di atas menjelaskan bahwa kurikulum PAI belum mengakomodir nilai-nilai multikulturalisme bahkan cenderung bersifat eksklusifisme. Sebenarnya PAI adalah wadah yang cukup efektif untuk memasukkkan multikulturalisme, dikarenakan muatan yang terkandung dalamnya bertujuan menciptakan manusia yang beriman, bertaqwa, berbudi pekerti baik, dan menjalankan perintah Tuhan sebagai khalifah dimuka bumi. Dengan kata lain nilai-nilai multikulturalisme seperti toleransi, kesetaraan, kerjasama, selaras dengan tujuan pendidikan Islam itu sendiri.¹³⁸ Berdasarkan penjelasan

¹³⁶ Suhadi (editor) dkk, *Mengelola Keragaman Sekolah, Gagasan dan Pengalaman Guru*, (Yogyakarta: CRCS, PPs UGM, 2016), hal. 74

¹³⁷ Suhadi (editor) dkk, *Mengelola Keragaman Sekolah ...*, hal.75, hasil survei ini juga di muat di Media Indonesia, 27 Feb 2011

¹³⁸ Lebih lanjut lihat M. Amin Abdullah, "Pengajaran Kalam dan Teologi di Era Kemajemukan; sebuah Tinjauan Materi dan Metode Pendidikan Agama.(hal.14)" Abdul Munir Mulkan,

ini menunjukkan bahwa PAI multikultural bukan lagi suatu gagasan konsep atau wacana melainkan penting untuk diaplikasikan dalam pendidikan.

Pendidikan Islam merupakan suatu proses yang komprehensif dari pengembangan kepribadian manusia secara keseluruhan, yang meliputi intelektual, spiritual, emosi dan fisik, sehingga seorang muslim disiapkan dengan baik untuk dapat melaksanakan tugas dan eksistensinya di muka bumi sebagai khalifah Allah swt. Dengan demikian pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik berbentuk jasmaniah maupun rohaniah, menumbuhkan suburkan hubungan harmonis setiap pribadi dengan Allah, manusia dan alam semesta.¹³⁹ Oleh karena itu Pendidikan Agama Islam adalah satu pelajaran yang sangat tepat untuk menginternalisasikan nilai-nilai multikulturalisme. Dalam diskusi lebih lanjut, Pendidikan agama Islam bukan hanya sebagai suatu pelajaran di sekolah melainkan menjadi satu disiplin ilmu. Prinsip-prinsip paradigmatis yang menjadi dasar filosofi Pendidikan Agama Islam berbasis Multikultural: a) PAI mesti mendidik siswa untuk berani belajar hidup dalam perbedaan; b) PAI juga mendorong siswa untuk memiliki kompetensi dalam membangun rasa saling percaya kepada semua orang dengan latar belakang berbeda; c) PAI multikultural harus mendorong siswa untuk mampu memelihara saling pengertian di antara sesama teman yang beragama; d) PAI harus menjadikan siswa dapat menunjukkan sikap saling menghargai; e) PAI multikultural diorientasikan untuk melahirkan peserta didik untuk terbuka dalam berpikir, mampu membuka diri bagi pandangan orang lain yang berbeda; f) PAI multikultural diharapkan menghasilkan siswa yang dapat bersikap apresiatif dan memahami bahwa dalam hidup ada keharusan menjalin relasi yang menunjukkan interdependensi antara satu orang (kelompok) dengan orang lain; g) PAI multikultural juga mendorong siswa ke arah pemahaman pentingnya resolusi konflik dan rekonsiliasi tanpa kekerasan.¹⁴⁰ Beberapa ayat al-Qur'an mengunggulkan pentingnya pendidikan agama Islam multikultural;

“Humanisasi Pendidikan Islam” dalam *Tashwirul Afkar, Jurnal Refleksi Pemikiran keagamaan dan Keindonesiaan*, (hal.17-18). Edisi No.11 Tahun 2001.

¹³⁹ Tolchah, 137

¹⁴⁰ Zakiyuddin Baidhowy, *Pendidikan Agama Berwawasan...*, h.78, lihat juga Kasinyo Harto, *Model Pengembangan ...*, h.99

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ أَيِنَّمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللهُ
جَمِيعًا إِنَّ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”¹⁴¹

Ayat di atas menyebutkan bahwa tiap-tiap umat memiliki arah kiblat tersendiri. Arah kiblat di sini bukan saja diterjemahkan sebagai arah untuk shalat, melainkan norma-norma yang berlaku pada setiap umat. Pada sisi ini, manusia tidak bisa menghendaki hanya satu kiblat saja untuk seluruh umat melainkan kiblat masing-masing sebagai sunnatullah yang tidak bisa diubah. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia, apapun agamanya, dianjurkan oleh Allah swt agar senantiasa berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Jadi, kebaikan adalah unsur sentral pada setiap agama. di sini PAI harus dikembangkan sebagai satu ajaran komprehensif yang menganut prinsip bahwa kebenaran adalah ketika kebaikan menjadi landasan dan nilai hidup para pemeluk agama.

Berdasarkan pemaparan di atas maka PAI multikultural adalah sebuah gagasan dan konsep PAI yang memiliki wawasan multikulturalisme baik secara teoritis maupun praktis. Secara komprehensif untuk melihat tujuan PAI multikultural, terlebih dahulu dipaparkan tujuan dari pendidikan multikultural itu sendiri. Tujuan-tujuan pendidikan multikultural harus mencakup: 1) Upaya perubahan terhadap lingkungan pendidikan untuk mengembangkan wawasan keragaman budaya yang dapat mendukung kesetaraan pendidikan bagi semua kelompok; 2) Pengembangan kompetensi antara budaya termasuk kemampuan, sikap dan pengetahuan yang diperlukan untuk dapat hidup dalam kebudayaan etnik setiap individu dan kultur universal, baik di dalam maupun di dalam lintas kebudayaan-kebudayaan etnik; 3) Upaya untuk mengenal, memahami, dan menghormati perbedaan dan kesamaan antar kebudayaan dan kelompok; 4) Pengembangan

¹⁴¹ QS. al-Baqarah/2:148

pemahaman dan dampak dan implikasi positif dan negatif dari sikap rasisme; 5) Pengembangan sikap positif terhadap potensi etniknya dan menggunakannya sebagai pendorong agar dapat memberikan kontribusinya kepada masyarakat; 6) Upaya membantu anak agar dapat mengembangkan identitas kultural, gender, kelas, ras, dan identitas individualnya, bersikap terbuka dan mempunyai perhatian sehingga ia dapat menerima dan bekerja sama dengan, dan kehadirannya dapat diterima oleh kelompok-kelompok yang berbeda; 7) Dukungan terhadap anak agar mandiri dan peduli terhadap lingkungan sosialnya.¹⁴²

Kendall¹⁴³ merumuskan lima tujuan utama dari pendidikan multikultural, yaitu: pertama, mengajarkan kepada peserta didik untuk menghargai nilai-nilai dan budaya orang lain di samping nilai dan budayanya sendiri. Kedua, membantu semua peserta didik untuk menjadi manusia yang bermanfaat di tengah masyarakat yang beragam ras dan budaya. Ketiga, mengembangkan konsep diri yang positif dalam diri peserta didik yang dipengaruhi oleh ras anak-anak kulit berwarna. Keempat, membantu peserta didik untuk mengalami sendiri hidup di dalam persamaan dan perbedaan sebagai manusia dengan cara-cara yang terpuji. Kelima, mendorong dan memberikan pengalaman kepada para peserta didik bekerja sama dengan orang yang berbeda budaya sebagai bagian dari masyarakat secara keseluruhan.

Tujuan pendidikan dengan berbasis multikultural menurut Skeel¹⁴⁴ dapat diidentifikasi sebagai berikut: Untuk memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keberadaan siswa yang beraneka ragam; Untuk membantu siswa dalam membangun perlakuan yang positif terhadap perbedaan kultural, ras, etnik, kelompok keagamaan; Memberikan ketahanan siswa dengan cara mengajar mereka dalam mengambil keputusan dan keterampilan sosialnya; Untuk membantu peserta didik dalam membangun ketergantungan lintas budaya dan memberi gambaran positif kepada mereka mengenai perbedaan kelompok.

¹⁴²Dody S.Truna *Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikulturalisme: Telaah Kritis Atas Muatan Pendidikan Multikulturalisme dalam Buku Ajar Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010) h. 116

¹⁴³Kasinyo Harto, *Model Pengembangan Pendidikan Agama Islam berbasis Multikultural*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h.78

¹⁴⁴D.J. Skeel, *Elementary Social Studies: Challenge for Tomorrow's World* (New York: Harcourt Brce College Publishers, 1995), h. 76.

Tujuan akhir pendidikan multikultural adalah dimilikinya pengetahuan, sikap dan tindakan yang toleran terhadap perbedaan suku, agama, status ekonomi, aliran, paham dan bahkan toleransi terhadap perbedaan individu baik bersifat kultural, fisik, dan psikis (hobi, kemampuan intelektual, bakat dan minat). Dengan kata lain, pendidikan multikultural diarahkan untuk dapat menghasilkan generasi umat, disamping berilmu dan trampil, juga dapat hidup bersama di tengah masyarakat (*khairu ummah*), baik masyarakat dalam lingkup keluarga, regional, nasional dan bahkan internasional.¹⁴⁵

Maksum dan Ruhendi menjelaskan secara konseptual; pendidikan multikultural mempunyai tujuan dan prinsip sebagai berikut: (a) setiap siswa mempunyai kesempatan untuk mengembangkan prestasi mereka; (b) siswa belajar bagaimana belajar dan berpikir secara kritis; (c) mendorong siswa untuk mengambil peran aktif dalam pendidikan, dengan menghadirkan pengalaman-pengalaman mereka dalam konteks belajar; (d) mengakomodasikan semua gaya belajar siswa; (e) mengapresiasi kontribusi dari kelompok-kelompok yang berbeda; (f) mengembangkan sikap positif terhadap kelompok-kelompok yang mempunyai latar belakang yang berbeda; (g) untuk menjadi warga negara yang baik di sekolah maupun di masyarakat; (h) Belajar bagaimana menilai pengetahuan dari perspektif yang berbeda; (i) untuk mengembangkan identitas etnis, nasional dan global; (j) mengembangkan ketrampilan- ketrampilan mengambil keputusan dan analisis secara kritis sehingga siswa dapat membuat pilihan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Adapun prinsip-prinsip pendidikan multikultural yaitu: (a) pemilihan materi pelajaran harus terbuka secara budaya didasarkan pada siswa. Keterbukaan ini harus menyatukan opini-opini yang berlawanan dan interprestasi-interprestasi yang berbeda; (b) isi materi pelajaran yang dipilih harus mengandung perbedaan dan persamaan dalam lintas kelompok; (c) materi pelajaran yang dipilih harus sesuai dengan konteks waktu dan tempat; (d) pengajaran semua pelajaran harus menggambarkan dan dibangun berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dibawa siswa ke kelas. (5) Pendidikan hendaknya memuat model belajar mengajar yang interaktif agar supaya mudah dipahami.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Lihat Kasinyo Harto, *Model Pengembangan Pendidikan Agama...*, h.79

¹⁴⁶ Ali Maksum dan Luluk Yunan Ruhendi, *Paradigma pendidikan Universal di Era Modern*

Mengacu pada tujuan di atas maka pendidikan Agama Islam berbasis multikultural diharapkan dapat: 1) Menolong peserta didik menjadi lebih sadar terhadap ajaran agama mereka sendiri dan sadar terhadap adanya realitas agama lain; 2) Menolong peserta didik mengembangkan pemahaman dan apresiasi terhadap agama lain; 3) Menolong peserta didik untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang didalamnya terdapat penganut agama yang berbeda; 4) Menolong peserta didik mengembangkan seluruh potensi mereka sendiri termasuk potensi keberagaman mereka sehingga mereka dapat mengontrol kehidupan mereka sendiri, dan dengan cara demikian mereka lebih berdaya¹⁴⁷

Berdasarkan tujuan tersebut maka output yang diharapkan dari pendidikan agama Islam berbasis multikulturalisme adalah agar peserta didik mencintai negeri, dengan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat majemuk. Tujuan seperti ini disebutkan dalam al-Qur'an sebagai sikap seorang mukmin dalam hidup bernegara:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَ تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تَخْرُجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ

“Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu (yaitu): kamu tidak akan menumpahkan darahmu (membunuh orang), dan kamu tidak akan mengusir dirimu (saudaramu sebangsa) dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar (akan memenuhinya) sedang kamu mempersaksikannya.”¹⁴⁸

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمِّيئَةً قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَيُئْسَسُ الْمَاصِرِ

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari

dan Post-Modernisme (Yogyakarta: IRCiSod, 2004), h 306.

¹⁴⁷ Lihat Kasinyo Harto, *Model Pengembangan Pendidikan Agama ...*, h.79

¹⁴⁸ QS. al-Baqarah/2:84

buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian.”¹⁴⁹

Menjaga NKRI adalah bagian dari mencintai keutuhan negara dan tujuan dari pendidikan Islam berbasis multikultural. Rasulullah saw begitu mencintai kota Mekkah, ketika beliau di usir dari Mekkah oleh kaum Quraisy nabi saw bersabda: “betapa indahny engkau wahai Mekkah. Betapa cintanya aku padamu. Jika bukan karena aku dikeluarkan oleh kaumku darimu, aku tidak akan meninggalkanmu selamanya, dan aku tidak akan menginggali negara selainmu.”

C. Pendidikan Islam Multikultural dalam Kontek Kebangsaan Indonesia

Secara garis besar landasan yuridis yang memungkinkan disebutkan sebagai penataan kehidupan antar umat beragama adalah 4 pilar kebangsaan itu sendiri. Empat pilar kebangsaan yaitu pancasila, undang-undang, bhinneka tunggal ika dan NKRI. Nilai-nilai yang terkandung dalam empat pilar kebangsaan itu--seperti sudah disebutkan dimuka—adalah landasan yuridis yang mengharuskan masyarakat bahkan lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan untuk menginternalisasikan nilai-nilai tersebut dalam aktivitas sehari-hari. Dengan mengutip Ali Maksun,¹⁵⁰ empat pilar kebangsaan dikategorikan dalam tiga landasan yaitu; *pertama*, pancasila sebagai landasan ideal bangsa. Sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa, pancasila mengandung pesan nilai, moral, etika, dan rasa toleransi yang termaktub dalam sila-sila pancasila. Artinya, semua agama, budaya dan bahasa mendapat tempat yang setara dalam kehidupan berbangsa. Juga, semua nilai yang terkandung dalam pancasila bukan sekedar simbol semata, tetapi, merupakan falsafah dan ideologi bangsa yang harus terwujud dalma kehidupan sehari-hari.

Komitmen kebangsaan merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana cara pandang dan ekspresi keagamaan seseorang atau kelompok tertentu terhadap ideologi kebangsaan, terutama komitmennya di dalam menerima Pancasila sebagai dasar dalam bernegara. Persoalan komitmen kebangsaan saat ini sangat

¹⁴⁹ QS. *al-Baqarah*/2:126

¹⁵⁰ Ali Maksun, Ali Maksun, *Pluralisme dan Multikulturalisme, Paradigma Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, (Malang: Aditya Media Publishing, 2011), h. 206

penting untuk diperhatikan terutama ketika dikaitkan dengan kemunculan paham-paham baru keagamaan yang tidak akomodatif terhadap nilai-nilai dan budaya yang sudah lama terpatri sebagai identitas kebangsaan yang luhur. Pada tingkat tertentu, kemunculan paham keagamaan yang tidak akomodatif terhadap nilai-nilai dan budaya bangsa tersebut akan mengarah pada sikap mempertentangkan antara ajaran agama dengan budaya karena ajaran agama seolah-olah menjadi musuh budaya. Pemahaman keagamaan seperti ini kurang adaptif dan tidak bijaksana karena sejatinya ajaran agama mengandung spirit dalam menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa.¹⁵¹

Kedua, undang-undang dasar (UUD) 45 merupakan landasan konstitusional. UUD 45 juga mengandung muatan nilai, norma, dan etika bermasyarakat maupun berbangsa. Hal ini dapat dicermati dalam pembukaan UUD dan batang tubuh yang memuat pentingnya keseluruhan hak dan kewajiban setiap warga. *Ketiga*, undang-undang tentang sistem pendidikan nasional no. 20 tahun 2003 sebagai landasan operasional penyelenggaraan pendidikan nasional. Berdasarkan ketetapan sisdiknas ini mengandung implikasi perlunya mendesain pembelajaran yang sesuai dengan budaya masyarakat, norma, dan kebutuhan masyarakat.

Pembinaan kehidupan beragama di Indonesia telah dijamin oleh Pancasila. Rumusan tiap sila Pancasila mendasari alur pemahaman tentang martabat manusia yang mengarah pada kedamaian dan keselamatan seluruh umat manusia dan kelestarian alam semesta. Tujuan hidup umat manusia yang terkandung dalam sila pertama membantu manusia untuk senantiasa menjaga kesadaran bahwa semua tindakannya tidak hanya dimaknai untuk hidup saat ini, tetapi sesuatu yang memiliki implikasi pada kehidupan yang lebih luas, pada ruang dan waktu yang lain. Tujuan hidup yang dimiliki manusia, memunculkan rasa tanggung jawab dalam semua tindakan, khususnya dalam menjalani hubungan, baik dengan sesama manusia maupun dengan alam semesta. Kemudian dalam gagasan kemanusiaan yang adil dan beradab pada sila kedua menegaskan prinsi bahwa manusia setara dihadapan Tuhan apapun atribut yang melekat padanya; suku, agama, kelas sosial,, dan golongan-golongan.¹⁵²

¹⁵¹ Kemenag RI, *Implementasi Moderasi Beragama...*, h.17.

¹⁵² Listia dkk, *Pendidikan Interreligijs*, Gagasan Dasar dan Modul Pelaksanaan, (Jakarta:

Sila persatuan Indonesia membawa inspirasi tentang substansi pada seluruh manusia yang dapat menjadi dorongan untuk menyatukan. Sila keempat dapat dipahami bahwa martabat manusia terealisasi melalui komunikasi dan adanya ruang yang cukup untuk menyampaikan pendapat dan mengekspresi diri. Terakhir sila kelima Pancasila berbicara tentang keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, menggambarkan cita-cita hidup bersama.¹⁵³

Demi menjaga martabat manusia dalam relasinya dengan lembaga-lembaga dalam struktur pemerintahan yang memiliki kewenangan sangat besar untuk mengatur kehidupan bersama, dirumuskan kewajiban negara untuk melindungi martabat manusia dalam pembukaan UUD 1945. Sebagai konstitusi negara Indonesia. Martabat manusia yang wajib dilindungi oleh negara menjadi hak asasi manusia. Secara khusus kewajiban negara untuk melindungi hak asasi warga diturunkan dalam UU No. 39 tahun 1999, tentang hak asasi manusia, dan saat dibentuk satu komisi yang khusus mengatur hak asasi manusia yang disebut Komisi nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham).

Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945. Dalam historis sejarah Indonesia yang berkaitan dengan kebijakan negara terhadap agama, telah banyak peraturan perundang-undangan ditulis. Misalnya UU No.1/PNPS/Tahun 1965 Tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Undang-undang ini mengatur agar setiap manusia berhak memiliki agama dan kepercayaan dan tidak diperbolehkan menodai suatu agama. Pada tahun 2016 pemerintah mengeluarkan peraturan bersama terkait pemeliharaan umat beragama yaitu "Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan PendirianvRumah Ibadat. Sebelumnya

Religion for Peace, 2016), h. 10

¹⁵³ Listia dkk, *Pendidikan Interreligius*, h. 11

juga pernah diterbitkan peraturan bersama terkait agama Ahmadiyah “Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2008, No. KEP-033/A/JA/6/2008, No. 199 Tahun 2008 Tanggal 9 Juni 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, Dan/Atau Anggota/Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

Prinsip fundamental dalam UUD 1945 mengamanatkan supaya ajaran dan nilai-nilai agama selalu berperan dan memberi arah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Berkenaan dengan itu, dalam Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1978 tentang Kebijakan Mengenai Aliran-Aliran Kepercayaan yang ditandatangani Menteri Agama Alamsjah Ratu Perwiranegara, antara lain ditegaskan bahwa Departemen Agama yang tugas pokoknya adalah melaksanakan sebagian tugas pemerintahan umum dalam pembangunan di bidang agama tidak akan mengurus persoalan-persoalan aliran kepercayaan yang bukan merupakan agama tersebut. Moh. Slamet Anwar, tokoh senior Departemen Agama dan mantan Inspektur Jenderal yang banyak mencurahkan pemikiran tentang pewarisan nilai-nilai Departemen Agama mengatakan, “Misi Departemen Agama adalah mengagamatkan bangsa. Tugas mengamatkan bangsa adalah usaha yang harus dilaksanakan di dalam rangka memelihara dan mengembangkan keberagaman bangsa Indonesia, agar bangsa Indonesia tetap menjadi bangsa yang beragama sepanjang masa.”¹⁵⁴

D. Ukhuwah Wathaniyah (Ajaran Cinta Tanah Air)

Umat Islam mempunyai tiga pilar ukhuwah atau persaudaraan yaitu ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama umat Islam, ukhuwah wathaniyah atau persaudaraan sesama bangsa Indonesia dan ukhuwah basyariyah atau persaudaraan sesama umat manusia.¹⁵⁵

Jika *ukhuwah* Islam yang menjadi landasan teologis tidak dikembangkan ke dalam realitas sosiologis dan dijadikan sebagai budaya, maka akan berhenti sebagai *ukhuwah Islamiyah* yang sempit, sehingga menjadi sistem kepercayaan dan ritual belaka yang hanya peduli dan komitmen pada umat Islam saja. Padahal sebuah komunitas

¹⁵⁴Sebuat bab dari M. Fuad Nasar (Tim Kerja Dirjen Bimas Islam), yang penulis kutip dari website kementerian agama Peran Depag dalam Bingkai Nation State, <https://kemenag.go.id/home/bab/12537>

¹⁵⁵Kemenag RI, *Implementasi Moderasi Beragama...*, h.123

besar masyarakat yang membentuk sebuah bangsa terdiri dari berbagai suku, agama dan kepercayaan. Dari situlah kemudian muncul aspirasi pembentukan negara Islam, yakni ketika *ukhuwah* hanya dibatasi pada *ukhuwah Islamiyah*, tidak dikembangkan lebih luas menjadi *ukhuwah wathaniyah*. *Ukhuwah wathaniyah* terkait dengan fitrah kemanusiaan, yakni kecenderungan manusia sejak dahulu kala untuk mencintai tanah airnya.¹⁵⁶ Rasa cinta Nabi Ibrahim AS kepada tanah airnya diabadikan dalam satu pernyataan dan doanya dalam ayat Al-Qur'an:

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: “Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian.” Allah berfirman: “Dan kepada orang yang kafirpun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.”¹⁵⁷

Karunia Allah SWT yang diberikan kepada sebuah negeri harus senantiasa disyukuri dan dijaga keberlangsungannya. Itulah cara mendapatkan negeri yang makmur dan diampuni oleh Allah (*baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur*). Sebagaimana dalam ayat lain dikisahkan mengenai bangsa negeri Saba':

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَيْنِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ ۖ كُلُوا مِنْ رَزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۖ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ ۚ وَرَبُّ غَفُورٌ

“Sungguh bagi Kaum Saba' ada tanda (kebesaran Rabb) di kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (Kepada mereka dikatakan:) “Makanlah dari rizki yang dianugerahkan Tuhan kalian dan bersyukurlah kepadaNya!”. *Baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur*”¹⁵⁸

Dengan demikian, cinta tanah air merupakan bagian dari perintah agama. Para ulama sampai mengatakan bahwa “Cinta

¹⁵⁶Kemenag RI, *Implementasi Moderasi Beragama...*, h.124

¹⁵⁷QS: Al-Baqarah/2: 126

¹⁵⁸QS Saba'/34:15

Tanah Air adalah bagian dari Iman”. Berikutnya, sebagai langkah untuk mewujudkan masyarakat yang beradab (mutamaddin), maka ukhuwah Islamiyah yang dilandasi ketaatan kepada ajaran agama Islam dan ukhuwah wathaniyah yang dilandasi ajaran cinta tanah air itu kemudian ditingkatkan menjadi ukhuwah basyariyah untuk menjamin persaudaraan universal, membangun tata dunia yang berkeadilan dan beradab.¹⁵⁹ Keharusan membangun tata dunia ini ditegaskan dalam al-Qur’an:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

”Wahai manusia sesungguhnya telah kami ciptakan kalian yang terdiri dari kaum lelaki dan wanita dan aku jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal (berinteraksi secara setara dan adil), sesungguhnya orang yang paling mulia (beradab) di antara kalian adalah orang bertakwa (yakni mampu membangun dan memajukan suku dan bangsa kalian). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengetahui”.¹⁶⁰

Selanjutnya, manusia yang paling beradab di hadapan Allah adalah mereka yang mampu membangun bangsa dan masyarakatnya menjadi bangsa yang maju dan beradab. Yakni membangun masyarakat yang taat beragama sekaligus dilandasi oleh semangat kebangsaan (wathaniyah) dan ukhuwah basyariyah. Dengan ukhuwah islamiyah kita bahu-membahu menjalankan perintah ajaran Islam. Dengan ukhuwah wathaniyah kita peduli untuk membangun bangsa ini, karena ini merupakan langkah penting untuk menegakkan kembali kedaulatan negara agar tentram, aman dan sejahtera. Dua ukhuwah tersebut menjadi sangat penting dalam mengembangkan ukhuwah basyariyah untuk memperbesar peran bangsa ini dalam membantu dan bekerjasama dengan bangsa lain di dunia.¹⁶¹

¹⁵⁹ Kemenag RI, *Implementasi Moderasi Beragama...*, h.125

¹⁶⁰ QS Al- Hujurat/49: 13

¹⁶¹ Kemenag RI, *Implementasi Moderasi Beragama...*, h.126

Secara yuridis untuk melestarikan dan menjaga persatuan umat beragama kementerian agama memang tidak jarang mengeluarkan keputusan. Misalnya lagi, secara khusus kementerian agama menerbitkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 84 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kerukunan Hidup Umat Beragama. pada tahun 2003 lalu diterbitkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 473 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kerawanan Kerukunan Hidup Umat Beragama. begitu juga sebagai pedoman pendirian rumah ibada tiap agama diterbitkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Kemajemukan umat manusia di muka bumi telah membuat garis-garis pemisahan antar sesama kepada identitas dan kelompok-kelompok tertentu. Kemajemukan ini telah melahirkan ras, etnik suku, agama, dan bahasa yang beranekaragam, dan ini merupakan suatu yang niscaya. Untuk merangkul keberagaman itu menjadi suatu yang mendatangkan suasana rukun dan damai, maka diusunglah satu ideologi bersama yaitu multikulturalisme. Akar multikulturalisme adalah kebudayaan.

Secara etimologis, multikulturalisme dibentuk dari kata *multi* (banyak), *kultur* (budaya) dan *isme* (aliran/paham).¹⁶² Sebagai sebuah ideologi,¹⁶³ multikulturalisme adalah pandangan bahwa setiap kebudayaan memiliki nilai dan kedudukan yang sama dengan setiap kebudayaan lain, sehingga setiap kebudayaan berhak mendapat tempat sebagaimana kebudayaan lainnya.¹⁶⁴ Secara sederhana, multikulturalisme adalah sebuah *isme* yang mengajarkan tentang kesejajaran antarbudaya. Dalam pandangan multikulturalisme masing-masing budaya manusia atau kelompok etnis harus diposisikan sejajar dan setara. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih dominan.

¹⁶² Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal.75

¹⁶³ Ideologi adalah sistem kepercayaan yang komprehensif yang diikuti oleh berbagai kelompok sosial, dan dengan berbagai macam alasan. *Libal*. Zakiyuddin Baidhawiy, *Pendidikan ...*, hal. 3

¹⁶⁴ Zakiyuddin Baidhawiy, *Pendidikan ...*, hal.4

Gambaran mengenai fenomena multikulturalisme, kemajemukan, kebhinekaan baik secara vertikal maupun horisontal tersebut di atas, sesungguhnya merupakan bukti nyata akan sunatullah, bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) yang unik dengan ciri khasnya masing-masing, dimana satu sama lain berbeda, mulai dari perbedaan-perbedaan jenis kelamin, bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan bahkan agama dan keyakinan yang beragam. Hal ini memang telah menjadi kehendak Allah sebagaimana difirmankan dalam QS. Al-Hujurat/49:13 Artinya: *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*¹⁶⁵

Di dalam al-Qur'an terdapat banyak ayat yang mengakui adanya pluralitas sebagai sesuatu yang alamiah bahkan dikehendaki oleh Tuhan itu sendiri, yaitu:

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلَّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ
 اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.¹⁶⁶

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا
 عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ
 الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً
 وَاحِدَةً وَلَكِنْ لَيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ

¹⁶⁵ QS. Al-Hujurat/49: 13

¹⁶⁶ QS. Al-Baqarah/2: 148

جَمِيعًا فَيَنْبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ¹⁶⁷

“dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu,¹⁶⁷

Keterangan al-Qur'an terkait dua ayat di atas jelas merupakan pengakuan terhadap adanya pluralitas dalam agama. Dalam *Tafsir Al-Mu'minin*, Abdul Wadud Yusuf mengomentari ayat tersebut bahwa memang kehendak Allah-lah manusia dijadikan menjadi umat yang bermacam-macam. Karena jika seandainya Dia kehendaki manusia akan dijadikan satu umat saja dengan diberikan-Nya satu risalah dan di bawah satu kenabian. Tetapi Allah menghendaki manusia menjadi umat yang banyak (*umaman*) dan Dia turunkan bagi setiap umat itu satu orang Rasul untuk menguji manusia, siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang ingkar.¹⁶⁸ Hal senada juga dikemukakan oleh Syaikh Ahmad Al-Shawi Al-Maliki dalam *Hasyiyah Al-'Allamah Al-Shawi* Juz 1 bahwa, Allah sengaja memecah manusia menjadi beberapa kelompok yang berbeda untuk menguji mereka dengan adanya syari'at yang berbeda-beda (*al-syara'i al-mukhtalifah*) untuk mengetahui yang taat dan yang membangkang.¹⁶⁹

Dalam ayat tersebut juga disebutkan, bahwa perbedaan tidak dapat diperdebatkan sekarang, yakni pada saat orang tidak sanggup keluar

¹⁶⁷ QS. Al-Maidah/5: 48

¹⁶⁸ Yusuf, Abdul Wadud, *Tafsir al-Mu'minin*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt) h 62.

¹⁶⁹ Al-Maliky, Syaikh Ahmad Al-Shawi, *Hasyiah Al-'Allamah Al-Shawy 'Ala Tafsir Al-Jalaluddin*, (Surabaya: Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah, tt), h. 287

atau melepaskan diri dari apa yang diyakininya sebagai kebenaran. Allah-lah nanti yang akan menentukan mana yang benar. Sikap yang seharusnya diambil adalah membiarkan masing-masing orang berbuat menurut apa yang diyakininya.

Ayat 48 surah al-Ma'idah tersebut di atas mengemukakan kesengajaan Allah menciptakan perbedaan. Bahwa Tuhan tidak menjadikan manusia sebagai umat yang satu. Satu dalam pengertian, satu agama (*millarun wahidatun*) sehingga tidak berselisih paham dan berpecah-pecah seperti diungkapkan dalam tafsir *Shafwatul Bayan Li Ma'anil Qur'an* karya Syaikh Hasanain Muhammad Makluf.¹⁷⁰

Al-Qur'an seperti tersebut dalam ayat di atas mengakui bahwa masyarakat terdiri dari berbagai macam komunitas yang memiliki orientasi kehidupan sendiri-sendiri. Manusia harus menerima kenyataan keragaman budaya dan memberikan toleransi kepada masing-masing komunitas dalam menjalankan ibadahnya. Dengan keragaman dan perbedaan itu ditekankan perlunya masing-masing berlomba menuju kebaikan. Mereka semua akan dikumpulkan oleh Allah pada hari akhir untuk memperoleh keputusan final. Dikatakan oleh Heru Nugroho sebagaimana pernah termuat dalam *Harian Kompas* edisi 17 Januari 1997 dan *Atas Nama Agama* bahwa rahasia kemajemukan hanya diketahui oleh Allah, dan tugas manusia adalah menerima, memahami dan menjalani.¹⁷¹

Ujung ayat ini, kalau kita perhatikan dengan seksama adalah menjadi peringatan lebih dalam lagi bagi manusia yang silau matanya karena terpesona oleh urusan kebangsaan dan kesukuan, sehingga mereka lupa bahwa keduanya itu gunanya bukan untuk membanggakan suatu bangsa kepada bangsa yang lain, suatu suku kepada suku yang lain.¹⁷² Melainkan ditujukan agar setiap individu yang berbeda suku, bangsa, dan agama adalah untuk berbuat baik. Pentingnya mengakui keberadaan keberbedaan ini disampaikan dalam satu hadis Rasulullah saw. *seluruh manusia hendaknya menjadi saudara antara yang satu dengan yang lain, wakunu ibadallahi ikhwana (Hadist Bukhari)*". Islam sejak diturunkan berlandaskan pada asas kemudahan, sebagai-mana Rasulullah saw. bersabda :

¹⁷⁰ Makhluf, Syaikh Hasanain Muhammad, *Shafwatul Bayan Li Ma'anil Qur'an*, (Cairo: Darul Basya'ir, 1994) h. 277

¹⁷¹ Heru Nugroho, *Atas Nama Agama*, (Bandung: Pustaka Hidayah, Cet. I, 1998) hal. 64.

¹⁷² HAMKA, *Tafsir al-Azhar Juz ke-26*, hal. 243—247.

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغِفَارِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشُرُوا وَأَسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ ۝ ١٧٣

“Telah menceritakan kepada kami Abdus Salam bin Muthahhar berkata, telah menceritakan kepada kami Umar bin Ali dari Ma'an bin Muhammad Al Ghifari dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: «Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan (semakin berat dan sulit). Maka berlakulah lurus kalian, men-dekatlah (kepada yang benar) dan berilah kabar gembira dan minta tolong-lah dengan al-ghadwah (berangkat di awal pagi) dan ar-ruhah (berangkat setelah zhuhur) dan sesuatu dari ad-duljah (berangkat di waktu malam)”

Ibn Hajar al-Asqalâni berkata bahwa makna hadis ini adalah larangan bersikap *tasyaddud* (keras) dalam agama yaitu ketika seseorang memaksa-kan diri dalam melakukan ibadah sementara ia tidak mampu melaksana-kannya itulah maksud dari kata : “*Dan sama sekali tidak seseorang berlaku keras dalam agama kecuali akan terkalahkan*” artinya bahwa agama tidak dilaksanakan dalam bentuk pemaksaan maka barang siapa yang memaksakan atau berlaku keras dalam agama, maka agama akan mengalahkannya dan menghentikan tindakannya.¹⁷⁴

Berdasarkan pemaparan di atas menjelaskan kepada kita bahwa kemajemukan bukanlah dipertentangkan antar kebudayaan pada satu komunitas dengan komunitas yang lain melainkan mencari kesamaan dan saling pengertian bahwa kemajemukan itu adalah *sunnatullah*, sedangkan manusia dianjurkan untuk memahami dan

¹⁷³ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah bin Bardazibah al-Bukhariy al-Ju'fiy, *Shahih al-Bukhari*, Juz 1, (Semarang: Maktabah wa Matba'ah Usaha Keluarga, 1981 M/1401 H), h 15.

¹⁷⁴ Ibnu Hajar al-Asqalany, *Fath al-Bary*, Jilid. IV, h.143

merawatnya, demi keberlangsungan kehidupan yang damai dan rukun. Berdasarkan ayat-ayat di atas pula memperjelaskan multikulturalisme yang terkandung dalam al-Qur'an. Beberapa dalil yang menunjukkan multikulturalisme seperti dikategorikan di atas dapat disebutkan:

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَلِتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamukerjakan”.¹⁷⁵

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ

“Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka Senantiasa berselisih pendapat”.¹⁷⁶

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

“dan kalau Allah menghendaki niscaya Allah menjadikan mereka satu umat (saja), tetapi Dia memasukkan orang-orang yang dikehendaki-Nya ke dalam rahmat-Nya. dan orang-orang yang zalim tidak ada bagi mereka seorang pelindungpun dan tidak pula seorang penolong”.¹⁷⁷

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam at Thabari meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw memberi khutbah pada hari Tasyriq di Mina (dalam satu riwayat lain, khutbah Rasulullah tersebut di hari Arafah), beliau duduk di atas ontanya: “*Hai Manusia, sesungguhnya Tuhanmu*

¹⁷⁵ QS. Al-Nahl/16: 93

¹⁷⁶ QS. Al-Hud/11:118

¹⁷⁷ QS. As Syu'ara/26: 8

itu satu, dan sesungguhnya ayahmu sekalian itu satu. Ingatlah, tidak ada keutamaan bagi orang Arab melebihi orang Ajam (non Arab), dan tidak ada keutamaan bagi orang Ajam, melebihi orang Arab, dan juga tidak ada keutamaan bagi orang kulit hitam melebihi orang kulit merah, dan tidak ada keutamaan bagi orang merah melebihi orang kulit hitam kecuali takwa. Ingat, sudahkah aku menyampaikan hal ini? Mereka menjawab: iya, Rasulullah bersabda: yang hadir di sini agar menyampaikan kepada yang tidak hadir!”

Demikian pula dalam hadis Imam Muslim dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda:” sesungguhnya Allah tidak melihat kepada warnamu dan harta kekayaanmu, tetapi melihat kepada hatimu dan amal perbuatanmu”.¹⁷⁸ Dengan pernyataan yang hampir serupa, Imam at Thabrani meriwayatkan hadis dari Abu Malik al Asy’ary bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: “sesungguhnya Allah tidak melihat kepada kedudukanmu, juga tidak melihat kepada nasabmu, juga tidak melihat ragamu, dan juga tidak melihat kepada harta kekayaanmu, tetapi melihat kepada hatimu. Maka siapapun yang mempunyai hati yang baik. Allah akan menyayanginya. Kalian semua adalah sama-sama “anak” Adam, dan yang paling dicintai Allah adalah yang paling bertakwa kepada-Nya.¹⁷⁹

Dalam konsep multikulturalisme, terdapat kaitan erat bagi pembentukan masyarakat yang berlandaskan “Bhineka Tunggal Ika”serta mewujudkan suatu kebudayaan nasional yang menjadi pemersatu bagi bangsa Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan yang menghalangi terbentuknya multikulturalisme di masyarakat.

E. Akar-akar Inklusif dalam Mengkontruksi Pendidikan Islam Multikultural

James Banks menjelaskan bahwa pendidikan multikultural memiliki lima dimensi yang saling berkaitan dan dapat membantu guru dalam mengimplementasikan beberapa program yang mampu merespon terhadap perbedaan pelajar (siswa)¹⁸⁰, yaitu:

¹⁷⁸ Muhammad Tholchah Hasan, *Pendidikan Multikultural Sebagai Opsi Penanggulangan Radikalisme*, (Malang: Lembaga Penerbitan Unisma, 2016) h. 40.

¹⁷⁹ Muhammad Tholchah Hasan, *Pendidikan Multikultural ...*

¹⁸⁰ James Banks, *Multiethnic Education: Theory and Practice*, 3rd ed. (Boston; Allyn and Boston, 1994), hal. 196.

Pertama: Dimensi integrasi isi/materi (*content integration*). Dimensi ini digunakan oleh guru untuk memberikan keterangan dengan “poin kunci” pembelajaran dengan merefleksikan materi yang berbeda-beda. Secara khusus, para guru menggabungkan kandungan materi pembelajaran ke dalam kurikulum dengan beberapa cara pandang yang beragam. Salah satu pendekatan umum adalah mengakui kontribusinya, yaitu guru-guru bekerja ke dalam kurikulum mereka dengan membatasi fakta tentang semangat kepahlawanan dari berbagai kelompok. Di samping itu, rancangan pembelajaran dan unit pembelajarannya tidak dirubah. Dengan beberapa pendekatan, guru menambah beberapa unit atau topik secara khusus yang berkaitan dengan materi multikultural.

Jika kita merangkum konten integrasi multikulturalisme menurut Banks di atas dalam perspektif Islam, pada hakikatnya pendidikan Islam tidak membedakan ilmu umum dengan ilmu agama. Disiplin ilmu tersebut adalah milik Allah, mempelajarinya adalah mempelajari ilmu-ilmu Allah, jadi tidak ada dikotomis ilmu pengetahuan. Jadi ketika melakukan integrasi multikulturalisme dalam pembelajaran sesungguhnya sedang mengintegrasikan ilmu pengetahuan itu sendiri. Terkait dengan pernyataan ini Allah swt berfirman dalam surat al-Alaq ayat 1-5: “*bacalah dengan nama Tuhanmu. Tuhan yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan memuliakan Tuhanmu. Yang telah mengajarkan kamu melalui Qalam. Yang telah mengajarkan manusia dari sesuatu yang belum ia ketahui.*”¹⁸¹

Kemudian Allah menegaskan tujuan diciptakan manusia agar manusia itu menjadi khalifah yang memakmurkan bumi. Ini sejalan dengan pendidikan multikultural yang menghendaki agar peserta didik menjadi seorang pribadi yang menghormati orang lain, toleransi, kasing sayang, dan mendambakan perdamaian di tengah kemajemukan masyarakat. Allah menegaskan kalau penciptaan manusia bukan untuk saling menumpahkan darah sesamanya.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَجْعَلْ فِيْهَا مَنْ
يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنَّهٗ
اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

¹⁸¹ QS. al-Alaq/96: 1-5

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: «Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi». Mereka berkata: «Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?» Tuhan berfirman: «Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui».¹⁸²

Kedua; Dimensi konstruksi pengetahuan (*knowledge construction*). Suatu dimensi dimana para guru membantu siswa untuk memahami beberapa perspektif dan merumuskan kesimpulan yang dipengaruhi oleh disiplin pengetahuan yang mereka miliki. Dimensi ini juga berhubungan dengan pemahaman para pelajar terhadap perubahan pengetahuan yang ada pada diri mereka sendiri. Terkait dengan hal ini Allah berfirman:

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ
كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ
الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ¹⁸³

“Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia: «Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah.» Akan tetapi (dia berkata): «Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya.»¹⁸³

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang diberikan oleh Allah swt al-Kitab, hikmah, adalah orang-orang yang rabbani. Sebutan *rabbani* oleh beberapa tokoh pendidikan adalah erat kaitannya dengan pendidikan. “*rabbaniy* adalah orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang sempurna dan mendalam, kemudian ia terpenggil

¹⁸² QS. *al-Baqarah*/2: 30

¹⁸³ QS. *Ali Imran*/3: 79

dengan kesadarannya sendiri untuk mengontibusikan ilmunya itu untuk diajarkan kepada orang lain.”¹⁸⁴ Seseorang yang memiliki keilmuan sempurna dan mendalam adalah orang yang selalu belajar, dan berusaha memaknai realitas konstektual agar ilmunya itu tidak ketinggalan dan bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Esensi dari konstruksi ilmu pengetahuan dalam paparan dimensi pendidikan multikultural adalah dinamika pendidikan yang berhubungan dengan kemajemukan masyarakat, yang mana pendidik berusaha memahami keragaman tersebut dan mengajarkan peserta didiknya.

Ketiga; Dimensi pengurangan prasangka (prejudice reduction). Guru melakukan banyak usaha untuk membantu siswa dalam mengembangkan perilaku positif tentang perbedaan kelompok. Sebagai contoh, ketika anak-anak masuk sekolah dengan perilaku negatif dan memiliki kesalahpahaman terhadap ras atau etnik yang berbeda dan kelompok etnik lainnya, pendidikan dapat membantu siswa mengembangkan perilaku intergroup yang lebih positif, penyediaan kondisi yang mapan dan pasti. Dua kondisi yang dimaksud adalah bahan pembelajaran yang memiliki citra yang positif tentang perbedaan kelompok dan menggunakan bahan pembelajaran tersebut secara konsisten dan terus-menerus. Penelitian menunjukkan bahwa para pelajar yang datang ke sekolah dengan banyak *stereotype*, cenderung berperilaku negatif dan banyak melakukan kesalahpahaman terhadap kelompok etnik dan ras dari luar kelompoknya. Penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan *teksbook* multikultural atau bahan pengajaran lain dan strategi pembelajaran yang kooperatif dapat membantu para pelajar untuk mengembangkan perilaku dan persepsi terhadap ras yang lebih positif. Jenis strategi dan bahan dapat menghasilkan pilihan para pelajar untuk lebih bersahabat dengan ras luar, etnik dan kelompok budaya lain.

Pengurangan prasangka dalam istilah pendidikan islam adalah *husnud dzan* (berbaik sangka), antonim dari *suudzan* (berburuk sangka). Terkait dengan pengurangan prasangka ini secara literlek dapat kita temukan dalam surat al-Hujurat ayat 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا

¹⁸⁴ Abuddin Nata, *Pendidikan dalam Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2016), h. 74

وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ أَيُّبُ أَحَدِكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا
فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang”.¹⁸⁵

Al-Maraghi menjelaskan bahwa Allah melarang purbasangka yang buruk terhadap sesama manusia dan menuduh mereka berkhianat pada apapun yang mereka ucapkan dan lakukan. Karena sebagian purbangsangka, merupakan dosa semata-mata. Maka hendaklah menghindari kebanyakan dari hal tersebut.¹⁸⁶

Prasangka berarti membuat keputusan sebelum mengetahui fakta yang relevan mengenai objek tersebut. Awalnya istilah ini merujuk pada penilaian berdasar ras seseorang sebelum memiliki informasi yang relevan yang bisa dijadikan dasar penilaian tersebut. Selanjutnya prasangka juga diterapkan pada bidang lain selain ras. Pengertiannya sekarang menjadi sikap yang tidak masuk akal yang tidak terpengaruh oleh alasan rasional.¹⁸⁷ *Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa..* Tentang ayat ini Zamakhsyari menjelaskan:

Dan hal yang membenarkan prasangka itu ‘benar atau salah’ adalah dengan adanya tanda-tanda yang nyata, yang diiringi (tanda-tanda itu) dengan rasa takwa dan takut. Dan jikalau kata (*katsiran*) itu di *makrifah*-kan, perintah untuk menjauhkan itu terikat dengan hal yang banyak bukan hal yang sedikit.

¹⁸⁵ QS. al-Hujurat/49:12

¹⁸⁶ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi Jilid IV*, (Mesir: Mushthafa al-Bab al-Halabi: 1969) h.227

¹⁸⁷ Rosnow, Ralph L.; *Poultry and Prejudice*. (Psychology Today, 1972), h. 53.

Oleh karena itu prasangka (yang kuat) itu yang wajib di jauhi, sedangkan prasangka yang bersifat (ringan) harus dikurangi, supaya prasangka itu tidak menjadi kuat (karena biasanya prasangka yang kecil, kalau disimpan akan menjadi kuat-*pent*). Terus, yang membedakan kedua hal tersebut adalah; prasangka yang wajib di jauhi itu merupakan sesuatu yang tidak diketahui tanda-tandanya dan sebab yang pasti. Hal itu adalah haram dan wajib di jauhi.¹⁸⁸

Dari penjelasan di atas dapat dijelaskan ,“sebagian prasangka” termasuk wajib di jauhi, dikarenakan itu akan menjadi prasangka-prasangka yang banyak. Zamakhsyari berpendapat, kalimat *ijtanibu* memiliki dua objek, yaitu (jauhkan olehmu) *kebanyakan*, dan dari *prasangka*. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti *bagian-bagian tertentu dari prasangka*. Sebagaimana dijelaskan kata *katsiran* itu bersifat *nakirah*, yang tidak menentukan bagian objek tertentu. Hal ini menandakan tidak ada batasan tertentu untuk menjauhi prasangka. Prasangka meskipun sedikit atau tidak tetap disebutkan prasangka secara totalitas.

Shihab juga menjelaskan, kata *ijtanibu* terambil dari kata *janb* yang berarti *samping*. Mengesampingkan sesuatu berarti menjauhkan dari jangkauan tangan. Dari sini kata tersebut diartikan *jauhi*. Penambahan huruf *ta* pada kata tersebut berfungsi penekanan yang menjadikan kata *ijtanibu* berarti *bersungguh-sungguh*. Usaha sungguh-sungguh untuk menghindari prasangka buruk.¹⁸⁹ Dalam ayat ini Allah swt memberikan peringatan kepada orang-orang beriman, supaya mereka menjauhkan diri dari prasangka terhadap orang-orang yang beriman dan jika mereka mendengar sebuah kalimat yang keluar dari mulut saudaranya yang mukmin, maka kalimat itu harus diberi tanggapan yang baik, ditujukan kepada pengertian yang baik, dan jangan sekali-kali timbul salah paham, apalagi menyelewengkan sehingga menimbulkan fitnah dan prasangka.

Prasangka adalah sesuatu asumsi buruk yang dapat memakan kebaikan-kebaikan yang dilakukan manusia. Memperbanyak prasangka

¹⁸⁸ Abul Qasim Mahmud Bin Umar Al-Khawarizmi Az-Zamakhsyari. *Al-Khasysyaf, an Haqaiq al-tanzil 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, rth), hal. 361-362

¹⁸⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, ...hal. 254

juga akan lebih menyebabkan malapetaka untuk manusia itu sendiri dalam menjalankan rutinitas sehari-hari. Tatkala larangan didasarkan atas banyak berprasangka, sedang aturannya menyebutkan bahwa sebagian prasangka itu dosa, maka pemberitahuan dengan ungkapan ini intinya agar manusia menjauhi buruk sangka apapun yang akan menjerumuskannya ke dalam dosa. Sebab orang tersebut tak tahu sangkaannya yang manakah yang menimbulkan dosa itu.¹⁹⁰ Sangka-sangkaan biasanya akan tumbuh makin berkembang tatkala seseorang mendiamkannya dari apa yang sebenarnya harus diketahui. Oleh karena itu *pengurangan prasangka* sebagai satu dimensi yang dikemukakan oleh Banks sebenarnya dalam al-Qur'an telah dibicarakan secara komprehensif agar manusia bisa menghindarinya, demi kemaslahatan hidup bersama di tengah kemajemukan. "Manifesto ilahi dalam al-Qur'an yang mengungkapkan: "kamu boleh jadi membenci sesuatu keyakinan orang lain, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu"¹⁹¹ merupakan instruksi ilahiyah yang melarang manusia untuk berburuk sangka kepada orang lain secara semena-mena."¹⁹²

Keempat; Dimensi pendidikan yang sama/adil (*equitable pedagogy*). Dimensi ini memperhatikan cara-cara dalam mengubah fasilitas pembelajaran sehingga mempermudah pencapaian hasil belajar pada sejumlah siswa dari berbagai kelompok. Strategi dan aktivitas belajar yang dapat digunakan sebagai upaya memperlakukan pendidikan secara adil, antara lain dengan bentuk kerjasama (*cooperative learning*), dan bukan dengan cara-cara yang kompetitif (*competition learning*). Dimensi ini juga menyangkut pendidikan yang dirancang untuk membentuk lingkungan sekolah, menjadi banyak jenis kelompok, termasuk kelompok etnik, wanita, dan para pelajar dengan kebutuhan khusus yang akan memberikan pengalaman pendidikan persamaan hak dan persamaan memperoleh kesempatan belajar. Terkait dengan pendidikan yang sama/ adil Allah swt berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

¹⁹⁰ Sayyid Quthb, *Fi dzilalil Qur'an, di Bawah Naungan al-Qur'an*, terj. As'ad Yasin dkk, Jakarta: Gema Insani Pres, 2000), h. 418

¹⁹¹ Qs. al-Baqarah/2:216

¹⁹² Lihat Ali Maksun, *Pluralisme dan Multikulturalisme...*, h. 115

وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”¹⁹³

Ayat di atas terdapat kata “adil”. Kata ‘adl (عَدْل) dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 28 kali di dalam al-Quran. Kata ‘adl sendiri disebutkan 13 kali, yakni pada S. al-Baqarah (2): 48, 123, dan 282 (dua kali), S. An-Nisa’ (4): 58, S. Al-Ma’idah (5): 95 (dua kali) dan 106, S. Al-An’am (6): 70, S. An-Nahl (16): 76 dan 90, S. Al-Hujurat (49): 9, serta S. ath-Thalaq (65).¹⁹⁴ Adil, adalah intisari dari ajaran islam, artinya Allah menyuruh manusia untuk bersikap adil dalam hubungan antar sesamanya, termasuk dalam melaksanakan pendidikan.

Kelima; Dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial (*empowering school culture and social structure*). Dimensi ini penting dalam memperdayakan budaya siswa yang dibawa ke sekolah yang berasal dari kelompok yang berbeda. Di samping itu, dapat digunakan untuk menyusun struktur sosial (sekolah) yang memanfaatkan potensi budaya siswa yang beranekaragam sebagai karakteristik struktur sekolah setempat, misalnya berkaitan dengan praktik kelompok, iklim sosial, latihan-latihan, partisipasi ekstra kurikuler dan penghargaan staf dalam merespon berbagai perbedaan yang ada di sekolah. Terkait dimensi ini bisa kita ketengahkan dalam al-Qur’an:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.

¹⁹³ QS. an-Nahl/16: 90

¹⁹⁴ M. Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Quran* (Bandung: Mizan, 2003), hal. 44.

Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik”.¹⁹⁵

Dari ayat ini jelas terdapat dua kecenderungan budaya manusia, yaitu budaya yang baik dan budaya yang buruk. Al-Qur'an hanya menghendaki supaya manusia melahirkan budaya-budaya yang baik saja, yang bermanfaat bagi kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat, yaitu budaya yang tidak merusak akhlak, alam dan lingkungan. Memberdayakan budaya sekolah dari aneka ragam kebudayaan pada siswa atau komunitas sekolah adalah bagian dari melaksanakan kebaikan sebagaimana diperintahkan Allah dalam ayat di atas. Pluralitas budaya adalah suatu keniscayaan dalam kehidupan ini. Setiap orang telah dilahirkan dengan membawa keragaman tersebut, hal ini dalam agama Islam disebut sebagai *sunnatullah*. Sesuatu yang *given* pemberian Allah swt, yang tidak dapat diubah. Karena sifatnya *given* (asasi), maka tidak boleh seorangpun menolaknya. “*kullu mauludun yuladu ala al-Fitrah*” Secara tekstual hadis ini bisa diterjemahkan bahwa manusia telah lahir dengan fitrahnya masing-masing, yang kelak orang tua, yang menentukan arah fitrah manusia itu. Anak yang terlahir dalam keluarga muslim secara otomatis dia akan beragama Islam, begitu pula jika ia terlahir dalam etnis tertentu ia adalah manusia dengan etnis tersebut.

Secara bahasa, kata pluralis berasal dari bahasa Inggris *plural* yang berarti jamak, dalam arti keanekaragaman dalam masyarakat, atau banyak hal lain di luar kelompok kita yang harus diakui. Secara istilah, pluralisme bukan sekedar keadaan atau fakta yang bersifat plural, jamak, atau banyak. Lebih dari itu, pluralisme secara substansial termanifestasikan dalam sikap untuk saling mengakui sekaligus menghargai, menghormati, memelihara, dan bahkan mengembangkan atau memperkaya keadaan yang bersifat plural, jamak, atau banyak.¹⁹⁶

Dalam konteks sosiologis masyarakat Indonesia, pluralisme tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku dan agama. Sebab, jika hal semacam ini yang menjadi pemahaman, maka bukan pluralisme yang dipahami, tetapi hanya menggambarkan kesan fragmentatif.

¹⁹⁵ Qs. Ali ` Imran/3:110

¹⁹⁶ Kautsar Azhari Noer, *Menyemarakkan Dialog Agama Perspektif Kaum Sufi*, (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1999), hal.872.

Selain itu, pluralisme juga tidak boleh dipahami sekedar sebagai sebuah kebaikan yang negatif. Sebab, cara pandang semacam ini hanya mampu meminimalisasi fanatisme, tetapi belum sampai ke taraf membangun pluralisme secara hakiki. Menurut Nurcholis Madjid, pluralisme harus dipahami sebagai pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban (*genuine engagement of diversities within the bond of civility*).¹⁹⁷ Dalam diskusi selanjutnya, pluralitas dimasukkan dalam terminologi multikulturalisme. Antara pluralisme budaya dan multikulturalisme memang tidak nampak perbedaan mencolok. Kedua istilah ini adalah kata “ideologis” untuk membicarakan keragaman manusia sebagai terminal mempersembahkan kesamaan persepsi dan tindakan agar keragaman membawa kepada kedamaian dan kesejahteraan. Yang membedakan pluralisme budaya dan multikulturalisme adalah letak jangkauan bahwa pluralisme budaya terkadang mendistingsikan keunikan kebudayaan dalam peleburan, sehingga mengaburkan entitas dari suatu budaya itu. Multikulturalisme lahir untuk sebagai argumen ideologis dan membendung peleburan etnisitas dan suatu kebudayaan melainkan menghargai setiap etnis, agama, budaya, tanpa meleburkan nilai-nilai pada setiap entitas itu.

Islam menerima perbedaan agama dan keyakinan. Islam memiliki prinsip-prinsip dasar yang harus mewarnai sikap dan aktivitas pemeluknya. Islam tidak bersikap eksklusif dengan mengesampingkan keberadaan agama lain dalam wilayah teritorialnya. Bahkan Islam memperlakukan agama lain dengan cukup bagus dan dihormati. Dalam surat al-Kafirun ayat 1-6, Allah swt dengan tegas menyebutkan realita perbedaan ini, yaitu:

Artinya: “...*Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku*”.¹⁹⁸

Dalam surah al-Baqarah ayat 12 Allah menjelaskan perilaku umat beragama untuk saling berbuat baik dan melarang berbuat jahat. Allah swt menyuruh kepada setiap pemeluk berbuat baik dengan cara tidak memaksa pemeluk agama lain masuk ke dalam agamanya. Memaksa orang lain yang tidak seyakinkan dengannya adalah perilaku buruk. Sebagaimana bunyi firman-Nya:

¹⁹⁷ Pandangan Nurcholis Madjid ini dinukil oleh Budhy Munawar Rahman dalam Bukunya *Islam Pluralis*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hal. 31.

¹⁹⁸ *Qs.al-Kafirun/; 6*

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.¹⁹⁹

Ibnu Katsir berkata dikitab tafsirnya mengenai Firman Allah: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat” yaitu: janganlah kalian memaksa siapapun untuk masuk ke dalam agama Islam, sesungguhnya agama Islam itu jelas, terang, jernih dalil-dalil dan bukti-buktinya, maka tidak usah memaksa siapapun untuk masuk Islam. Bahkan barang siapa yang Allah berikan hidayah Islam kepadanya, terbuka hatinya, dan menerangkan penglihatan hatinya, maka ia akan masuk ke dalam penerangan. Begitu pula barang siapa yang Allah butakan hatinya, menulikan pendengarannya dan penglihatannya, maka sesungguhnya dia tidak akan masuk Islam walau dipaksa dengan kekerasan.²⁰⁰ Mengenai sebab-sebab turunnya ayat ini, bahwa sebagian orang Anshar ingin memaksa anak-anak mereka agar masuk Islam, kemudian turunlah ayat ini, dan Nabi saw melarang mereka.²⁰¹ Islam sebenarnya telah muncul dalam wajah yang kaya dari pemahaman multikultural (*multikulturalisme*). Karenanya sangat tidak pantas kalau dikatakan multikulturalisme muncul dari Barat kemudian umat Islam mencaploknya mentah-mentah atau mencoba menarik kesamaan kemudian menyimpulkan bahwa agama Islam telah berbicara pendidikan multikultural. Islam tidak jauh dari nilai-nilai pendidikan

¹⁹⁹ Qs. al-Baqarah/2; 256

²⁰⁰ Tim Ahli Tafsir di bawah pengawasan Syaikh Shafiyurrahman al-Mbarakfury, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2*, terj. Abu Ihsan al-Atsari, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hal. 16

²⁰¹ Tim Ahli Tafsir di bawah pengawasan Syaikh Shafiyurrahman al-Mbarakfury, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir...*, hal. 16

multikultural. Hanya saja disiplin ilmu berkaitan lebih menonjol di Barat untuk saat ini.

Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain adalah demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, suku bangsa, kesukubangsaan, kebudayaan suku bangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, HAM, hak budaya komunitas, dan konsep-konsep lain yang relevan.²⁰² Konsep yang diusung tersebut tidak bertentangan dengan Islam malahan sebaliknya konsep-konsep tersebut relevan dan anjuran dalam al-Qur'an. Oleh karena itu azas pendidikan multikultural harus mengadopsi tema multikulturalisme itu sendiri.

²⁰² Brian Fay, *Contemporary Philosophy of Social Science: A Multicultural Approach*, (Oxford: Blackwell, 1996), hal. 203



BAB 6

NILAI-NILAI MULTIKULTURALISME DALAM SEJARAH ISLAM

Merunut sejarahnya, konsep multikulturalisme berkembang awal di Kanada. Negara dengan populasi imigran yang lumayan besar. Menghadapi ancaman disintegrasi akibat segala macam adat, ras serta budaya yang berbeda, digaungkanlah konsep multikulturalisme sebagai sebuah tawaran solusi. Sebagai sebuah pemikiran dan gerakan, multikulturalisme baru muncul sekitar tahun 1970-an, mulai muncul pertama kali di Kanada dan Australia, kemudian Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan lain-lainnya. Setelah itu diskursus multikulturalisme berkembang dengan sangat cepat. Setelah tiga decade sejak digulirkan, multikulturalisme sudah mengalami 2 (dua) gelombang penting, yaitu:

Pertama, multikulturalisme dalam konteks perjuangan pengakuan budaya yang berbeda. Prinsip kebutuhan terhadap pengakuan (*needs of recognition*) adalah ciri utama dari gelombang pertama ini. *Kedua*, multikulturalisme yang berusaha melegitimasi keragaman budaya yang mengalami beberapa tahapan, diantaranya: kebutuhan atas pengakuan, melibatkan berbagai disiplin akademik, pembebasan melawan imperialisme dan kolonialisme, gerakan pembebasan kelompok identitas dan masyarakat adat (*indigenous people*), dan lain sebagainya.²⁰³

Sedangkan merunut beberapa nilai utama yang digali dari doktrin wahyu dan fakta historis umat Islam. Kita bisa melihat banyak ayat yang mengindikasikan doktrin pengakuan pada multikulturalisme sebagai sebuah keniscayaan. Dalam Q.S Al-Huud/11 ayat 118:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ^٥

²⁰³ Muhammad Tholchah Hasan, *Pendidikan Multikultural Sebagai Opsi Penanggulangan Radikalisme* (Malang: Lembaga Penerbitan Universitas Islam Malang, 2016), h. 20.

“Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat.”²⁰⁴

Imam Musthafa Al-Hishni Al-Manshuriy²⁰⁵, menafsirkan ayat ini dengan pernyataan, bahwa seandainya Allah menghendaki, pasti Allah menjadikan semua manusia menjadi muslim, menjadikan semua manusia berada dalam jalan kebenaran. Serta tidak menjadikan mereka berselisih keyakinan. Namun Allah tidak menghendaki itu. Allah tetap menjadikan sebagian berbeda. Ada sebagian yang berpegang pada kebenaran dan sebagian lain dalam kesesatan. Sebagaimana Allah juga juga mengindikasikan hal yang sama dalam Q.S Al-Sajdah ayat 13:

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ
مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

“dan kalau Kami menghendaki niscaya Kami akan berikan kepada tiap- tiap jiwa petunjuk, akan tetapi telah tetaplah Perkataan dari padaKu: “Sesungguhnya akan aku penuh neraka Jahannam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.”²⁰⁶

Dalam sejarahnya, prinsip dan kehidupan multikultural sudahlah terjadi sejak periode awal Islam. Rasulullah sendiri-lah yang memperkenalkan konsep dan membentuk masyarakat multikultural awal di Madinah. Masyarakat multikultural pernah menghasilkan keuntungan bagi kaum muslim dalam sejarah pertahanan dan keamanan. Pada tahun kelima Hijrah, ketika kaum kafir Quraisy dan beberapa kabilah Arab sekutunya hendak menyerang kaum muslimin di Madinah. Kaum muslimin dalam keadaan terjepit dan kebingungan menghadapi serangan besar yang hendak dilancarkan kaum kafir Quraisy dengan sekutu-sekutunya. Rasulullah pun mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah mengenai pertahanan yang harus dilakukan.

Pada saat itulah tampil seorang pemuda yang tampan dengan rambut yang lebat, pemuda ini sangat dicintai oleh Rasulullah. Dialah

²⁰⁴ Q.S Al-Huud/11: 118.

²⁰⁵ Musthafa Al-Hishni Al-Manshuriy, *Al-Muqtathaf min Uyuni Al-Tafasir*, juz 2 (Damsyiq: Dar Al-Qalam, 1996), h. 564

²⁰⁶ Q.S Al-Sajdah/32:13.

Salman al-Farisiy, pemuda inilah yang kemudian mengusulkan pembuatan parit pada Perang Khandaq yang terkenal itu. Usul ini dilandasi dari beberapa strategi dan alat-alat perang yang dikenal Salman dari negeri asalnya Persia. Strategi *khandaq*, atau parit yang ketika itu sebagai pertahanan tidaklah dikenal oleh bangsa Arab. Salman sendiri adalah seorang yang berasal dan berbangsa Persia. Beliau adalah bagian dari keunikan dan keagungan Islam, terutama dalam memperlakukan dan menghormati bangsa lain. Beliau adalah seorang filsuf muslim, ahli pengobatan, ahli fikih, ahli perbintangan, inovator dan ahli olah raga kaum muslim ketika itu.²⁰⁷ Ini menandakan bahwa Islam sangat menghargai pendapat dan perbedaan. Selain itu ini mempertegas keagungan Islam sekaligus menyuguhkan kepada kita keuntungan dari kehidupan multicultural. Selain tentu memberikan gambaran kepada kita bahwa Rasulullah menghargai keragaman. Buktinya saja, Salman Al-Farisiy yang bukan orang Arab dihargai pendapatnya.

Pada zaman Rasulullah, ketika selesai perang Badar, diceritakan pula raja Negus atau Najasyi dari kerajaan Habasyah atau Ethiopia yang beragama Nasrani (Kristen Ortodhok) bergembira atas kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar. Raja Najasyi ketika itu mengundang Ja'far bin Abi Thalib yang merupakan pemimpin kaum muslim yang sedang mencari suaka di Habasyah. Ketika Ja'far dan rombongannya datang, mereka melihat Raja Najasyi sedang duduk di bawah tanah beralaskan pasir. Sembari mengatakan, "Telah datang berita dari tanah kelahiran kalian, bahwa Allah telah memenangkan nabi-Nya dan menghancurkan musuhnya."²⁰⁸ Ini menandakan bahwa sudah ada hubungan yang erat antara kaum muslim awal dengan agama lain. Terutama dengan Najasyi raja Habasyah, ini mencirikan nilai saling mengenal.

Pada zaman Rasulullah pada saat perang Uhud, terdapat seorang Yahudi dari Bani Tsa'labah yang menyeru kepada kaumnya untuk turut serta berperang menjaga Madinah bersama Rasulullah. Dia

²⁰⁷ Khalid Muhammad Khalid, *Rijal Hawl al-Rasul*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2000), h. 31.

²⁰⁸ Abul Fida' Al Hafidz Ibnu Katsir, *Al Bidayah wa Al Nihayah*, juz 3 (Kairo: Dar AlHadits, 2006), h. 334. Dalam kitab ini dijelaskan panjang lebar bahwa Najasyi mengucapkan selamat dan berbahagia atas kemenangan kaum Muslim di perang Badar. Perlindungan Najasyi para pencari suaka Muslim dari Mekah juga diceritakan secara gamblang dalam banyak kitab tarikh. sebaliknya, banyak pula ditemukan hadits yang menceritakan pujian Rasulullah atas kebaikan rasa Najasyi.

mengatakan, “Wahai seluruh kaum Yahudi, kalian telah mengetahui bahwa hari ini membela Muhammad adalah sebuah kebenaran.” Menjawab seruan itu, banyak kaum Yahudi yang menolak sembari beralasan bahwa peperangan tersebut terjadi pada hari Sabat atau hari Sabtu. Hari agung kaum Yahudi yang terlarang di dalamnya perang. Namun Muhairiq, nama Yahudi tersebut mengatakan, “Tak ada hari Sabtu untuk kalian.” Sembari lalu ia mengambil pedang dan baju perangnya lantas menghadap Rasulullah. Dia menyatakan, “Jika aku terbunuh, maka seluruh hartaku adalah untuk Muhammad.”

Pada perang Uhud itu pula ia terbunuh. Sehingga Rasulullah memujinya, “Sebaik-baiknya orang Yahudi adalah Muhairiq.”²⁰⁹ Ini menandakan bahwa masyarakat Islam awal, sudah bekerja sama, bahu membahu dengan kaum agama lain demi mempertahankan negara Madinah. Pada saat Umar bin Khatab menaklukkan Syam (sekarang Suriah), telah datang waktu sholat sedangkan ketika itu ia berada di gereja “Al-Qiyamah”. Maka Patriarkh (pemimpin tertinggi gereja koptik) mempersilahkan Umar untuk sholat di gereja itu. Maka Umar menolak permintaan itu karena Umar khawatir suatu saat umat Islam akan merebut gereja itu dan menjadikannya masjid.²¹⁰ Ini menunjukkan rasa kasih sayang dan perlindungan dalam diri Umar sebagai pemimpin Islam. Padahal ketika itu Islam adalah pemenang dan penakluk Syam atau Suriah. Inilah nilai penting multikulturalisme yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab.

Pada suatu ketika kaum Masihi (Nasrani atau Kristen) Sham atau Suriah kini, menulis surat kepada Abu Ubaidah sebagai panglima perang kaum muslim ketika itu. “Saudara-saudara kami kaum muslimin, kami lebih bersimpati kepada saudara daripada orang-orang Romawi, meskipun mereka seagama dengan kami, karena saudara-saudara lebih setia kepada janji, lebih bersikap belas kasih kepada kami dengan menjauhkan tindakan-tindakan tidak adil serta pemerintah Islam lebih baik daripada pemerintah Byzantium, karena mereka telah merampok harta dan rumah-rumah kami.”

Penduduk Emessa menutup gerbang kota terhadap tentara Heraclius serta memberitahukan kepada orang-orang Muslim bahwa

²⁰⁹ Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisyam bin Ayyub Al-Himyari, *Al-Sirah Al-Nabawiyah*, juz 3 (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabiyy, 1990), h. 51

²¹⁰ Ahmad Muhammad al-Hufiy, *Samahab al-Islam*, (Kairo: al-Majlis al-A’la li Suuni al-Islamiyah, Wazirah al-Awqaf, 2009), h. 184

mereka lebih suka kepada pemerintahan dan sikap adil kaum muslimin dari pada tekanan dan sikap tidak adil orang-orang Yunani.²¹¹ Ini menandakan bahwa Islam sejak masa awal terkenal sebagai agama kasih sayang dan bertanggung jawab. Kaum muslim dan kaum nasrani Emessa mempunyai cerita yang patut diteladani. Seorang sejarawan Mesir, Jurji Zaydan atau George Zaydan bahkan menceritakan bagaimana keilmuan Islam berkembang justru kebanyakan atas pertolongan orang non-Arab. Ini terjadi karena orang-orang Arab ketika sibuk dengan usaha ekspansi kekuasaan dengan perang. Mereka setengah abai dengan keilmuan seperti bahasa, sastra dan keilmuan lainnya. Seorang yang peduli dengan kemerosotan pengetahuan orang Arab atas ini adalah Umar bin Khattab yang memerintahkan para penguasa di wilayahnya untuk mengajarkan syair Arab dan keilmuan kepada anak-anak muslim.

Keengganan orang Arab ini berbanding terbalik dengan orang-orang nonArab yang banyak mempelajari keilmuan, sastra dan sejenisnya. Hingga jika muncul seorang ahli ilmu dari Arab, kebanyakan justru berasal dari kabilah-kabilah kecil yang tidak sibuk dengan ekspansi kekuasaan dan politik. Seperti Al-Ashma'I yang berasal dari Kabilah Bahilah, sebuah kabilah kecil dari Arab. Di luar itu keilmuan justru banyak berkembang di kalangan orang-orang budak, bekas budak atau Mawali. Mereka ini rata-rata orang Persia. Hingga bahkan kebanyakan para ahli fikih maupun Qiraah ketika itu adalah orang non-Arab. Misalnya imam qiraah Nafi' Al-Dailamiy, seorang Persia. Para ahli fikih di beberapa kota utama juga kebanyakan non-Arab, misalnya Hasan bin Abi Hasan, Muhammad bin Sirrin di Basrah, Irak. Atha' bin Rabbah, Mujahid, Sa'id bin Jubayr, Sulaiman bin Yasar di Mekah. Zaid bin Aslam, Muhammad bin Munkadir, Nafi' bin Abu Najih di Madinah. Rabi'ah Al'Ra'y, Ibnu Abi Zinad di Kuba, Thowus dan anaknya, Ibnu Munbih di Yaman, Makhul di Syam, semuanya adalah golongan Mawali atau non-Arab.

Begitu juga ketika bahasa Arab telah meluas menjadi bahasa di banyak tempat. Kaidah-kaidah kebahasaan menjadi rusak. Muncullah para ahli Bahasa Arab yang justru juga bukan orang Arab. Seperti Hammad AlRawiyah berasal dari Persia, golongan Dailamiy, juga

²¹¹ Abu Ismail Muhammad ibn Abd Llah Al-Azdiy Al-Bashriy, Kitab Futuh Al-Syam, (Calcuta: Baptis Machine, 1854), h. 97

Khalil, Sibawayh, AlAhfas, kesemuanya adalah orang Persia.²¹² Ini menunjukkan Islam sudah mengenal kesetaraan dalam pengajaran keilmuan. Hal yang harus menjadi nilai lebih pendidikan Islam multikultural.

Melihat kenyataan itu, tentu membuat kita harus setuju dengan pernyataan Kyai Tholhah, bahwa “*Ta’aruf* (saling mengenal) merupakan indikasi positif dalam suatu masyarakat plural untuk dapat hidup bersama, saling menghormati dan saling menerima perbedaan yang ada di antara mereka. *Ta’aruf* menjadi gerbang kultural yang memberi akses melakukan langkah-langkah berikutnya dalam membangun kebersamaan kehidupan kultural, melalui karakter-karakter inklusif seperti *tasamuh* (toleransi), *tawasuth* (moderat), *ta’awun* (tolong menolong), *tawazun* (harmoni). Hal-hal tersebut disebut sebagai akar-akar nilai inklusif dari multikulturalisme Islam.²¹³

²¹² George Zaydan, *Tarikh Al Tamadun Al Islamiy*, (Beirut: Dar Maktabah Al Haya@t, tt), h. 53-55.

²¹³ Lihat Muhammad Tholchah Hasan, *Pendidikan Multikultural Sebagai Ops.*, h. 41.



BAB 7

LEGAL STANDING PENYELENGGARAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI INDONESIA

A. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional

Salah satu landasan yuridis implementasi pendidikan multikultural adalah “landasan operasional” yang terdapat dalam undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 (UU Sisdiknas 2003). Di sebut landasan operasional dikarenakan atas dasar sisdiknas tersebut pendidikan nasional dijalankan. Memang belum tegas secara spesifik dimensi multikulturalisme dan pendidikan multikultural yang dikandung dalam sisdiknas tersebut, namun jika ditelusuri secara mendalam terdapat akar dan nilai multikulturalisme, yang kelak menjadi operasional penerapan pendidikan multikultural. Bagian dari pasal tersebut dapat dirincikan berikut ini:

1. Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat (1) dan (2)

Bab I, pasal 1 ayat (1) disebutkan pendidikan adalah usaha sadar dan terus menerus untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif *mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara*. Kata yang bergaris miring (dari penulis) sengaja dibuat untuk sebagai tanda kehadiran multikulturalisme dalam pasal tersebut. Kata kunci yang dimaknai sebagai penghargaan diri siswa tanpa diskriminasi adalah *mengembangkan dirinya untuk...(dst)*. Memiliki *spiritual keagamaan*, ini adalah esensi manusia dalam

dimensi kebudayaan. Manusia adalah makhluk spiritual, yang terpatri dalam kebudayaan yang dimiliki. Secara paradigmatis teosentrisme, manusia memiliki tujuan yang sama untuk hidup yang berlandaskan prinsip ketuhanan. Kemudian sebagai apresiasi dari makhluk yang bertuhan ini manusia harus memiliki sikap *pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara*. Poin ini sangat penting, dalam kajian multikulturalisme setiap individu maupun kelompok tidak bisa memaksakan orang lain menjadi bagian daripadanya, orang lain memiliki budaya sendiri yang harus dihargai dan memiliki derajat yang sama, tidak ada superior maupun inferior. Di sinilah pendidikan bertujuan membentuk pengendalian diri dan akhlak mulia dan menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara, yang sangat sarat dengan kemajemukan.

Adapun pada pasal 1 ayat (2), ditegaskan *Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman*. Ada lima poin yang memungkinkan implementasi multikulturalisme dalam pasal ini, yaitu pendidikan berdasarkan pancasilais dan undang-undang 45, nilai-nilai agama, kebudayaan nasional, dan perubahan zaman. Sebagaimana kita ketahui sila-sila Pancasila mengandung tata nilai, norma, untuk masyarakat Indonesia. Secara tidak langsung Pancasila adalah akar falsafah multikulturalisme di tanah air. Demikian juga undang-undang tahun 1945, adalah landasan yuridis yang mampu merangkul kemajemukan masyarakat. Dan dalam butiran pasal-pasal UUD terdapat bagian yang mengulas secara mendalam tentang HAM.

Pendidikan juga berlandaskan nilai-nilai agama. Aspek multikulturalisme yang terkandung di sini adalah bahwasanya setiap agama memiliki nilai-nilai yang dapat dikategorikan sebagai nilai multikulturalisme, seperti toleransi, demokrasi, pluralis, hak asasi, kesetaraan, keadilan, dst. Aspek multikulturalisme juga bisa diperoleh dari kebudayaan nasional. Jika disebut sebagai kebudayaan nasional, maka itu meliputi kebudayaan setiap daerah

dan etnis di Indonesia. Indonesia sebagai negara yang memiliki kemajemukan etnis, agama, budaya, bahasa, adat-istiadat, yang bervariasi. Kebudayaan-kebudayaan ini dijaga dan dilestarikan oleh negara. yang terakhir adalah pendidikan bersifat progressif, artinya tanggap dan ikut perkembangan zaman. Multikulturalisme secara historis lahir atas sikap masyarakat global dalam memaknai kebudayaan-kebudayan setiap negara-bangsa.

2. Bab II tentang Dasar, Fungsi, dan Tujuan Pendidikan; pasal 2 dan 3.

Pasal 2: *Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.* Pasal 3, *Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi Marusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.* Aspek multikulturalisme yang terkandung dalam pasal 2 sudah dijelaskan pada no (1) di atas. Adapun dimensi multikulturalisme yang bisa diungkapkan dalam pasal 3 yaitu pada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan nasional, menjadi *menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.* Prinsip demokrasi adalah tujuan dari multikulturalisme secara ideologigis.

3. Bab III tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, pasal 4 ayat (1)

Pasal 4 ayat (1) berbunyi: *Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.* Prinsip penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan secara demokratis, berkeadilan, non-dismrininasi, HAM, dan pluralistik bangsa. Prinsip ini adalah tujuan dari multikulturalisme. Multikulturalisme mengandaikan suatu masyarakat yang demokratis, memberdayakan keadilan untuk setiap individu, tidak diskriminasi karena perbedaan latar sosio-kultural dan agama, serta memenuhi hak asasi manusia sebagai hak paling dasar

4. Bab IV, pasal 5 ayat (1) dan pasal 11 ayat (1)

Pada pasal ayat 1 disebutkan *Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu*. Aspek multikulturalisme yang terkandung dalam pasal ini bahwa kewajiban pemerintah memberikan pendidikan yang sama kepada warga. Warga Indonesia berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi, apakah ia berasal dari keluarga yang ekonomi tinggi, sederhana maupun rendah, ataupun ia berasal dari suatu suku yang berbeda, mereka mesti mendapatkan perlakuan yang sama dalam pendidikan, baik pada input pendidikan, proses, dan outputnya. Pada pasal ini niscayanya tidak ada pembedaan kepada peserta didik, tidak seperti selama ini misalnya ada kelas inti, kelas unggul, sekolah bertaraf internasional, dan lain sebagainya. Pelaksanaan pendidikan yang bermutu dengan prinsip memperbedakan status sosial, kelas, ekonomi, adalah bertentangan dengan pasal ini.

Kemudian nilai multikulturalisme juga terkandung dalam pasal 11 ayat 1. Pasal ini menjelaskan secara langsung penyelenggaraan pendidikan bebas dari diskriminasi. *Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi*.

5. Bab V tentang Peserta didik pasal 12 ayat (1)

Pada pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwasanya; *Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: a) mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama; b) mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; c) mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; d) mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; e) pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara; f) menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan*.

Pasal ini membicarakan hak-hak peserta didik dalam satuan pendidikan. Peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama dari guru seagama. Meskipun poin ini sempat jadi perdebatan

akademik di tanah air, dengan kata lain ada yang pro dan yang kontra. Bagi yang kontra, mereka mengatakan sah-sah saja peserta didik di ajarkan oleh guru yang tidak seagama dengan alasan-alasan tertentu secara ilmiah dan bertanggung jawab. Namun bagi yang pro, pasal ini sudah benar dan tidak perlu dipersoalkan. Mereka beralasan, agama adalah wilayah privasi anak didik, dan dalam agama ada ajaran-ajaran teologis yang tidak mungkin dipersamakan dan diterima dari guru yang berbeda agama.

Meskipun demikian, pada dasarnya hemat penulis, setiap peserta didik akan lebih bagus diajarkan oleh guru yang seagama, agar tidak muncul “keimbangan” dari peserta didik dalam menangkap pesan-pesan teologis dan ajaran-ajaran agama, karena pada dasarnya peserta didik akan lebih nyaman diajarkan oleh guru yang seagama. Dengan pelaksanaan seperti ini, aspek multikulturalisme terdapat pada penghormatan pada setiap agama, dan prinsip-prinsip teologis-normatif yang terkandung dalam agama. Namun pendidikan agama tidak bisa diajarkan secara kaku, dogmatis, melainkan diperkaya dengan nilai-nilai multikulturalisme seperti, toleransi kepada agama lain, memberi pengakuan kepada agama lain, dan saling kerja sama dalam hal kebaikan.

Kemudian pasal 12 ayat b sampai dengan ayat f, adalah hak peserta didik yang mesti diperhatikan pemerintah, seperti memperhatikan minat dan bakat peserta didik, kemampuan, dan prestasi yang dimiliki siswa. Ada siswa yang memiliki prestasi akademik tinggi namun disebabkan orang tua mereka tidak mampu menyekolahkan mereka lagi, akhirnya anak tersebut putus sekolah. Pemerintah harus memperhatikan status ekonomi orang tua anak-anak didik, bagi mereka yang tidak mampu bersekolah/melanjutkan sekolah karena alasan ekonomi, maka pemerintah harus menanggungnya. Persoalan ini masuk dalam kajian multikulturalisme terutama dipandang dari sisi multikultural vertikal.

6. Bab VI tentang Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan Pasal 32 Bagian Kesebelas Pendidikan khusus, Pendidikan Layanan Khusus

Pada pasal 32 disebutkan tentang pendidikan khusus dan layanan khusus terhadap kaum difabilitas. Kemudian ayat (2) tentang pendidikan terhadap peserta yang kena bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Dalam kajian multikulturalisme, khususnya pendidikan multikultural, bahwasanya pendidikan multikultural adalah memberikan hak yang sama kepada kaum difabel, yaitu peserta didik yang kesulitan mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional dan mental, misalnya anak tunanetra, tuna rungu, autis dst.

7. Bab VII tentang Bahasa Pengantar, pasal 33 ayat (2) dan (3)

Pada pasal 33 ayat 1 dijelaskan bahwa bahasa pengantar dalam pendidikan Nasional, namun untuk peserta didik di sekolah tingkat awal, diperbolehkan menggunakan bahasa daerah. Pasal 33 ayat 2 berbunyi: *Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.* Keragaman bahasa memang lumrah terjadi di masyarakat plural. Pendidikan tidak bisa menghambat perkembangan peserta didik disebabkan ketidakmampuan berbahasa Indonesia. Aspek multikulturalisme yang dikandung pasal ini adalah mengindahkan bahasa lokal dan perwujudan kepentingan nasional. Begitu pula bahasa asing juga bisa diterapkan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu. Misalnya suatu sekolah yang menerapkan pembelajaran bahasa Inggris, untuk mengembangkan kemampuan bahasa Inggris peserta didik maka perlu dibuat bahasa Inggris menjadi bahasa pengantar. Di beberapa sekolah, sudah ada penerapan wajib berbahasa Arab dan Inggris di hari tertentu di sekolah. Inipun tidak bertentangan dengan perundang-undangan kita. Pasal 33 ayat 3 menyebutkan; *Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.*

Itulah beberapa pasal dalam undang-undang sisdiknas yang mendukung atau mengapresiasi multikulturalisme dan pendidikan multikultural. Berbeda dengan Maslikhah, ia telah

mengkategorikan “pasal-pasal pendidikan multikultural” dari sisdiknas meliputi, 1) apresiasi terhadap spiritualitas keagamaan; 2) apresiasi terhadap mutu pendidikan tanpa diskriminasi; 3) apresiasi terhadap bahasa daerah dan asing; 4) apresiasi terhadap dunia kerja dan kepemilikan IPTEKS; 5) Perkembangan fisik dan psikis; 6) apresiasi terhadap keterlibatan masyarakat, dan 7) apresiasi terhadap penyelenggara lembaga pendidikan asing.²¹⁴

Dengan adanya konsep multikulturalisme dan nilai-nilai pendidikan multikultural dalam Undang-undang Sisdiknas No.20 tahun 2003, prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, mengarah kepada gerakan reformasi seperti demokrasi, keadilan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, toleransi, kerja sama lintas iman, dan pemberdayaan seluruh aspek kehidupan yang multikultural.

B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 tahun 2007 ini dijelaskan beberapa konsep penyelenggaraan dan pengembangan lembaga pendidikan Agama dan Keagamaan. PP ini juga perpanjangan tangan dari undang-undang No,20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas), khususnya pada pasal 30 Ayat 04, yang menyebutkan bahwa “*Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabbajja, samanera, dan bentuk lain sejenis*”. Untuk membedakan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan sebenarnya hal yang paling nampak adalah pada tujuannya, kalau pendidikan agama memiliki tujuan untuk diri pribadi siswa, sedangkan pendidikan keagamaan bertujuan menciptakan peserta didik secara khusus dalam kehidupan peserta didik sebagai anggota masyarakat. Sekilas perbedaan tidak nampak, terkucali dilihat pasal-pasal PP tersebut secara komprehensif. Demikian pula pendidikan keagamaan adalah apresiasi pemerintah terhadap pendidikan agama berbasis kemasyarakatan. Pendidikan keagamaan dilaksanakan oleh masyarakat dengan izin dari pejabat setempat ataupun kementerian agama. Berikut ini akan dijelaskan secara rinci PP tersebut dalam kaitannya tentang institusi pendidikan dan dalam konteks pembangunan Nasional.

²¹⁴Maslikhah, *Quo Vadis Pendidikan Multikultural, Rekonstruksi Pendidikan Berbasis Kebangsaan*, (Surabaya: Stain Salatiga Press, 2007), hal.92-115

1. Kedudukan PP No.55 2007 Terkait institusi pendidikan

Pada Bab II pasal 2 ayat (1) disebutkan: *Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama.* Dilihat dari fungsi pendidikan agama di atas, setelah memperoleh pendidikan agama peserta didik diharapkan menjadi pribadi yang memiliki spiritualitas yaitu beriman dan bertaqwa kepada Allah swt. Titik tolak fungsi pendidikan agama di sini adalah teosentrisme, yaitu suatu pandang bahwa manusia adalah makhluk spiritual dan memerlukan spirit ilahiyah dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. fungsi dari pendidikan agama di atas juga diharapkan agar peserta didik mempunyai akhlak mulia. Dalam pendidikan Islam, pendidikan agama di kenal dengan Pendidikan Agama Islam, yang mencakup beragam disiplin ilmu seperti aqidah akhlak, sejarah Islam, Fikih, al-Qur'an dan hadis. Sedangkan di sekolah seperti SD, pendidikan agama disebut sebagai Pelajaran Agama Islam. namun kedua institusi pendidikan ini memiliki kesamaan pada konsepsi fungsi, yaitu membentuk kepribadian peserta didik yang berakhlak mulia.

Pada fungsi pendidikan agama juga ditegaskan kalau akhlak mulia dikejawantahkan dalam pergaulan antar umat beragama, peserta didik diharapkan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan antar umat beragama. Di sini terlihat wajah PAI multikulturalisme sebenarnya, yaitu salah satu tujuan PAI berbasis multikultural adalah membentuk peserta didik untuk mampu hidup dalam komunitas yang berbeda agama.

Adapun pada ayat (2) *Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.* Pada tujuan pendidikan agama, peserta didik diharapkan memiliki kemampuan pada aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Domain afeksi adalah peserta didik dapat mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam agama. Pada aspek kognitif pendidikan agama juga bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Di sini terlihat bahwa pendidikan

aga tidak hanya mengajarkan tentang doktrin teologis agama, melainkan juga bisa dipadukan dengan teknologi dan seni.

PP No. 55 tahun 2007 juga mengisyaratkan bahwa setiap institusi pendidikan berkewajiban melaksanakan pendidikan agama, baik pada institusi tingkat dasar, menengah, maupun institusi pendidikan tinggi agama (pasal 3 ayat 1). Pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh kementarian agama (pasal 2 ayat 2). Jika dilihat dari instusi pendidikan hari ini di Indonesia maka pendidikan agama dimulai dari institusi Play-group, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan sampai ke perguruan tinggi. Kalaupun ada institusi pendidikan lain yang akan hadir, institusi tersebut mesti menerapkan pendidikan agama. Di sini terlihat bahwa Indonesia sangat memperhatikan pendidikan agama.

Dalam segi pelaksanaannya, kurikulum pendidikan agama didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) (*pasal 5 ayat 1*). Kedudukan pendidikan agama tidak bisa dimarginalkan, atau dinomorduakan dari pendidikan lain seperti pendidikan umum misalnya matematika, bahasa Indonesia dst, melainkan tetap harus mengacu pada SNP. Mengacu pada SNP, pendidikan agama memiliki manajemen yang baik dan benar, baik dari sisi input-proses dan ouput pendidikan. Berdasarkan pasal ini pula pendidikan agama bisa dievaluasi pada akhir jenjang pendidikan, dan sebagai standar kelulusan. Jadi ujian akhir nasional pendidikan tidak saja diuji pada pelajaran-pelajaran umum, melainkan juga termasuk pendidikan agama. Yang perlu diperhatikan adalah, pendidikan agama yang diberikan kepada peserta didik harus bersesuaian dengan kejiwaan peserta didik (pasal 5 ayat 2). Ini bermakna bahwa materi atau substansi pendidikan agama berbeda-beda diberikan kepada peserta didik sesuai dengan tingkatan dan usia peserta didik. Tidak mungkin materi pendidikan agama untuk sekolah tingkat menengah diberikan kepada peserta didik tingkat sekolah dasar, begitu sebaliknya.

Pada pasal 5 ayat 3 disebutkan: *Pendidikan agama mendorong peserta didik untuk taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan agama sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan pribadi, berkeluarga,*

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada tiga komponen yang diharapkan tumbuh pada diri peserta didik dari pendidikan agama yaitu untuk pribadinya, keluarganya, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk membentuk kepribadian yang bermanfaat ini, pendidikan agama diharapkan mampu membentuk pribadi peserta didik yang harmonis, rukun, dan memiliki rasa hormat kepada penganut agama lain (ayat 4). Dan secara spesifik diharapkan pendidikan agama dapat membangun sikap mental peserta didik yang jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, tulus, dan bertanggung jawab (ayat 5). Sebuah kompleksitas tujuan yang hanya memungkinkan dicapai jikalau benar-benar menerapkan pendidikan agama secara benar. Pendidikan agama juga bukan saja mendorong agar peserta didik memiliki sikap mental seperti disebutkan itu, melainkan juga dapat menumbuhkan sikap kritis, inovatif dan dinamis. Oleh karena itu pendidikan agama harus dijalankan secara interaktif, inspiratif, dan menyenangkan. (ayat 7).

Adapun pada Bab III tentang pendidikan keagamaan pasal 8 terdapat dua pasal, yang berbunyi: (1) *Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.* (2) *Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.*

Kedudukan pendidikan keagamaan berbeda dengan pendidikan agama, pendidikan keagamaan berbentuk satuan atau program pendidikan (pasal 13 ayat 1) yang selain didirikan oleh pemerintah, juga bisa didirikan oleh masyarakat (ayat 2) seizin dari kementerian agama atau pejabat yang ditunjuk (ayat 3). Dengan persyaratan terdiri atas ; a) isi pendidikan/kurikulum; b) jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan; c) sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran; d) sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan sekurang-kurangnya untuk 1 (satu) tahun

pendidikan/akademik berikutnya; e) sistem evaluasi; dan f) manajemen dan proses pendidikan. (ayat 4).

Pendidikan keagamaan Islam meliputi pendidikan diniyah dan pesantren yang diselenggarakan pada jalur formal, non formal dan informal. (pasal 14 ayat 1-3). Pemerintah tidak membedakan pendidikan diniyah dalam aspek tujuan dan penerapannya, pendidikan diniyah harus memasukkan pelajaran-pelajaran umum, (pasal 18) dan harus diujikan juga secara nasional (pasal 19). Namun pendidikan diniyah non formal diselenggarakan dalam bentuk pengajian pengajian kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Al Qur'an, Diniyah Takmiliah, atau bentuk lain yang sejenis. Dan diwajibkan mendapatkan izin dari kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. Pendidikan keagamaan ini berbeda dalam setiap agama. khusus dalam Islam setidaknya ada tiga lembaga yang di atur, berikut rinciannya:

- a. Pendidikan Keagamaan Islam di yang diatur dalam PP. No. 55 Tahun 2007 Pasal 14 adalah Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah. Madrasah Diniyah terbagi menjadi tiga model: Formal, Non Formal, Informal.
- b. Pengajian Kitab Menurut PP. No. 55 Tahun 2007. Pasal 22. Ayat 1) Pengajian kitab diselenggarakan dalam rangka mendalami ajaran Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam. 2) Penyelenggaraan pengajian kitab dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang. (3) Pengajian kitab dilaksanakan di pondok pesantren, masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat
- c. Majelis Ta'lim. Berdasarkan PP. No. 55 Tahun 2007. Pasal 23. Ayat 1). Majelis Ta'lim atau nama lain yang sejenis bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta Kurikulum. 2) Majelis Ta'lim bersifat terbuka dengan mengacu pada pemahaman terhadap al-Quran dan Hadits sebagai dasar untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, serta akhlak mulia 3. Majelis Ta'lim dilaksanakan di masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat
- d. Pendidikan al Qur'an menurut PP. No. 55 Tahun 2007 Pasal 24 Ayat 1) Pendidikan al-Quran bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan

- kandungan al-Quran 2) Pendidikan al-Quran terdiri dari Taman Kanak-Kanak Al-Quran (TKQ), Taman Pendidikan Al-Quran, Ta'liml Quran lil-Aulad (TQA), dan bentuk lain yang sejenis. 3) Pendidikan al-Quran dapat dilaksanakan secara berjenjang dan tidak berjenjang. 4) Penyelenggara pendidikan al-Quran dipusatkan di masjid, mushalla, atau ditempat lain yang memenuhi syarat. 5). Kurikulum pendidikan al-Quran adalah membaca, menulis, dan menghafal ayat-ayat al-Quran, tajwid serta menghafal doa-doa utama
- e. Diniyah *Takmiliah* menurut PP 55 Th 2007 Pasal 25 ayat : Diniyah *Takmiliah* bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama Islam yang diperoleh di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Allah SWT 2) Penyelenggaraan diniyah takmiliah dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang. 3) Penyelenggaraan diniyah takmiliah dilaksanakan di masjid, mushalla, atau di tempat lain yang memenuhi syarat. 4). Penamaan atas diniyah takmiliah merupakan kewenangan penyelenggara. 5) Penyelenggaraan diniyah takmiliah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau pendidikan tinggi
- f. Pesantren menurut PP 55 Pasal 26 ayat: Pesantren menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, akhlak mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) dan/atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan/keahlian untuk membangun kehidupan yang Islami di masyarakat 2) Pesantren menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan/atau pendidikan tinggi. 3). Peserta didik dan/atau pendidik di pesantren yang diakui keahliannya di bidang ilmu agama tetapi tidak memiliki ijazah pendidikan formal dapat menjadi pendidik mata pelajaran/kuliah pendidikan agama di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang memerlukan, setelah menempuh uji kompetensi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan

pemaparan di atas, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan adalah satu disiplin studi yang harus diterapkan dalam satuan pendidikan baik sekolah, madrasah, pesantren, dayah, ataupun disebut formal dan informal. Begitu pula pendidikan agama dan keagamaan pada agama-agama selain Islam. Semua agama wajib menyelenggarakan pendidikan agama dan keagamaan. Selain kewajiban untuk melaksanakan pendidikan agama dan keagamaan, semua agama yang menerapkan harus memiliki prinsip dan tujuan yang sama sebagaimana digariskan oleh PP ini. Ini membuktikan jikalau pendidikan agama dan keagamaan adalah sub-studi dari sistem pendidikan nasional, yang memiliki tugas untuk mendukung dan melaksanakan pembangunan nasional.

- g. Kedudukan PP No.55 2007 dalam konteks pembangunan nasional. Pendidikan agama diharapkan *mampu menumbuhkan sikap kritis, inovatif, dan dinamis, sehingga mendorong peserta didik untuk memiliki kompetensi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/ atau olahraga* (pasal 5 ayat 6). *Dan pendidikan agama diharapkan mampu mendorong kreatifitas dan kemandirian, serta menumbuhkan motivasi untuk hidup sukses.* (ayat 7). Berdasarkan tujuan pendidikan agama ini, dan kedudukan pendidikan agama dan keagamaan yang telah dijelaskan di atas, diharapkan pendidikan agama dan keagamaan berkontribusi dalam pembangunan nasional. Pendidikan agama dan keagamaan dalam hubungannya dengan konteks pembangunan nasional mesti dilihat pendidikan agama dan keagamaan sebagaimana melihat pendidikan lain pada umumnya, yang notabene sebagai tameng pembangunan nasional. Pendidikan adalah kunci sukses pembangunan.

Jika merujuk pada sub kategori pembanguan nasional, pembangunan nasional tidak saja membangun fisik seperti infrastruktur yang berbasis teknologi melainkan juga terlibat pada aspek psikis, yaitu pembangunan mental spiritual. Kedua aspek ini, yaitu fisik dan psikis, adalah tumpuan pembangunan nasional di negara Indonesia. Sebagaimana disebutkan pada bagian penjelasan PP No.55 2007 *keberadaan pendidikan keagamaan berbasis masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat belajar, terlebih lagi karena bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan*

masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan. Dalam kenyataan terdapat kesenjangan sumber daya yang besar antar satuan pendidikan keagamaan.

Begitu pula pendidikan keagamaan adalah sebagai komponen Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan keagamaan perlu diberi kesempatan untuk berkembang, dibina dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk Pemerintah dan pemerintah daerah. hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa yang menjadi tujuan akhir pembangunan adalah manusia, yaitu dapatnya dipenuhi hajat hidup, jasmaniah dan rohaniah, sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk religius, agar dengan demikian dapat meningkatkan martabatnya selaku makhluk. Jadi pendidikan mengarah ke dalam diri manusia, sedangkan pembangunan mengarah ke luar yaitu ke lingkungan sekitar manusia.



BAB 8

RISET BUDAYA SEKOLAH MULTIKULTURAL DALAM MEWUJUDKAN NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA DI SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA ISKANDAR MUDA KOTA MEDAN

A. Pendahuluan

Sekolah Menengah Atas Sultan Iskandar Muda kota Medan di bawah naungan Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda yang terletak di jalan Tengku Amir Hamzah Pekan I Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kotamadya Medan. Sekolah SMA Sultan Iskandar Muda memiliki keunikan tersendiri seperti 1) *Religion*: agama yang diakui oleh pemerintah seperti Islam, Kristen, Budha, dan Hindu ada di sekolah ini, selanjutnya Masjid, Gereja, Pura, serta Kuil dibangun secara permanen di sekolah ini. 2) *Culture*: kemajemukan bahasa, tradisi, nilai, keyakinan, mitos, norma, dan berbagai suku seperti suku Batak, Jawa, Tionghoa, Tamil, Mandailing, Melayu, Karo, Aceh, Padang, Nias, Sunda, Banten Palembang, Ambon dan Pakistan ada di sekolah ini. 3) *Economic*: warga sekolah SMA Sultan Iskandar Muda memiliki berbagai tingkatan status sosial ekonomi, seperti anak asuh atau anak kurang mampu, anak orang mampu dan donatur. Penelitian ini bertujuan *pertama*: mendeskripsikan nilai-nilai moderasi pendidikan Islam melalui budaya sekolah multicultural. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan etnografi realis Crasswell. Teknik pengumpulan data dengan teknik observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah kelas bersama mewujudkan nilai-nilai moderasi pendidikan Islam melalui budaya

sekolah multikultural di SMA Sultan Iskandar Muda yang pertama nilai terbuka, kedua nilai dialog, ketiga toleransi dan keempat tidak ekstrim dalam beragama.

Sekolah Menengah Atas Sultan Iskandar Muda Kota Medan selanjutnya disingkat dengan SMA SIM Kota Medan, secara administratif berada di dalam wilayah Desa Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan tepatnya di Jl. Tengku Amir Hamzah Pekan I Sunggal, gang Bakul Medan Sunggal. Sekolah Iskandar Muda di bawah Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda (YPSIM) menaungi lembaga pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sekolah ini berdiri pada 25 Agustus Tahun 1987 oleh dr. Sofyan Tan yang pada saat itu ingin mendirikan sekolah berbasis mendukung keragaman dan pengentasan kemiskinan dengan pendidikan yang berkualitas. Sebagaimana hasil wawancara dengan ketua pembina dan sekaligus pendiri Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda kota Medan dr. Sofyan Tan:

“...Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda didirikan tanggal 25 Agustus tahun 1987, ini sudah menuju ke 33 tahun. Kita membangun sekolah ini dengan tujuan bagaimana sekolah ini sebagai sarana pertemuan sosial budaya antar siswa, dari berbagai golongan, dari strata ekonomi, yang ujungnya itu adalah tentu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia...., kita membangun sekolah ini dengan tujuan 2 (dua) yani: (1) memberikan pendidikan kepada semua orang, artinya tidak peduli dia kaya miskin, suku apa, agama apa, dia boleh menikmati, karena landasan kita jelas, Pancasila ideologi kita. (2) sekolah ini adalah tempat untuk bisa saling memahami satu dengan yang lain, karena sekolah ini menganut motto membangun keberagaman bangsa...”²¹⁵

Perkembangan sekolah ini tergolong cepat karena yayasan memiliki kompetensi mengelola dan memiliki visi misi yang baik, sekolah ini mendapatkan banyak penghargaan baik dari tingkat regional maupun tingkat nasional. Pada tingkat nasional mendapatkan penghargaan

²¹⁵ Wan.A.01/30/07/2020

anugrah peduli pendidikan tahun 2014 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Maarif Award tahun 2014, meraih penghargaan organisasi kemasyarakatan bidang pendidikan dari Kementerian Pendidikan 2018.

Sekolah ini memiliki program unggulan pendidikan multikultural sebagaimana yang tertuang dalam visi dan misi sekolah. Kemudian pendidikan multikultural ini selalu didiseminasikan kepada seluruh guru, siswa, staf, tenaga pendidikan, satuan pengaman dan warga kantin, sebagaimana hasil wawancara dengan kepala sekolah pada saat *grand tour*: “...Jadi program kita ada 2 yakni satu pendidikan multikultural dan kedua anak asuh..., melalui pendidikan multikultural atau disebut kita katakan dengan pendidikan budaya, itu kita harus lakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai multikultural dari setiap proses pembelajaran...”²¹⁶

Peneliti pertama kali datang ke Yayasan Perguruan SMA Sultan Iskandar Muda tersebut, langsung bisa merasakan aura multikultural, terutama sekali di lihat dari segi *culture* (sangat mencolok perbedaan ras yang ada di sekolah ini, misalnya saja peneliti ketika keluar dari parkir, langsung disambut dengan siswa/i keturunan, yakni keturunan India Tamil dengan warna kulitnya yang khas. Selanjutnya ketika peneliti akan memasuki halaman sekolah, yang tidak begitu jauh dengan parkir sekolah, peneliti disambut lagi dengan siswa/i keturunan Tionghoa dengan warna kulit khasnya putih dan bermata sipit, dan siswa/i yang berkulit sawo matang, yakni suku asli Indonesia) budayanya.²¹⁷

Frekuensi siswa atau peserta didik tersebut dibangun melalui kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru masuk dengan materi memperkenalkan visi dan misi sekolah, budaya akademik, peraturan atau tata tertip dan kebiasaan-kabiasaan yang ada dimana tempat menimba ilmu, dilanjutkan pada kegiatan-kegiatan kelas bersama atau kelas keberagaman dan dibantu dengan kegiatan ekstrakurikuler. Metode yang digunakan dalam mendiseminasikan visi misi tersebut menggunakan metode *out bond* dan juga dengan cara diskusi atau *open minded*, berikut hasil wawancara dengan kepala sekolah:

²¹⁶ W. A.02./21/08/2019

²¹⁷ Ob.01/24/08/2019. Jam 07:12-08:38

“...Jadi anak-anak datang di sini, dengan berlatarbelakang berbeda, dari mulai sekolah keagamaan, ada dari sekolah negeri dan swasta... masa pengenalan lingkungan sekolah (PLS) selama tiga hari disitulah dikenalkan, apa sebenarnya visi misi sekolah ini”²¹⁸ “...harus dikemas dalam akademik, dikemas dalam kegiatan ekstrakurikuler, dikemas juga dalam sarana yang seperti itu...”²¹⁹

Kelas bersama ini merupakan salah satu program sekolah untuk mengikis, bahkan menghilangkan sikap-sikap intoleran, *stereotype*, mem-*bully*, diskriminasi, etnosentrisme, primordialisme, di tengah-tengah warga masyarakat, khususnya warga sekolah. Dengan harapan setelah kembali kekeluarga atau masyarakat, mereka menjadi lilin-lilin kecil kedamaian.

“Kalau itu (kelas bersama) waktu program multikulturalallah ketika normal, itu dulu sebelum di bangun apa (maksudnya auditorium), ada juga kita ngumpulin anak-anak persesi itu, itu anak-anak itu di kayak di motivasi dalam bentuk multikultural, dia kayak buat Games permainan juga itu ada sih. Mudah-mudahan nanti tinggal mereka cari aja dokumen (nateri) nya itu. Pak Agus Rizal dan guru-guru agama itu, artinya agama Kristen juga ada memberikan motivasi itu, membuat kegiatan-kegiatan yangsepertiitu.”²²⁰

Materi kelas bersama ini diambil dari bagian dari mata pelajaran agama dan budi pekerti, lalu dicari topik yang memiliki kesamaan atau titik temu. Materi kegiatan kelas bersama ini, diharamkan mencari topik-topik yang memiliki kontradiktif, karena ini akan membuat jurang perbedaan yang ada di sekolah semankin dalam. Karena konsep kelas bersama ini tujuannya adalah untuk mengikis jurang-jurang perbedaan, menyatukan keberagaman agama, budaya dan sosial ekonomi. Kelas bersama ini merupakan bagian dari pendidikan multikultural yang di programkan oleh sekolah, dengan motor penggeraknya adalah para dewan guru agama. Kelas bersama ini diharapkan mewujudkan nilai-nilai moderasi pendidikan Islam yang berbasiskan kepada budaya

²¹⁸ W.A.02./21/08/2019

²¹⁹ W.A.02./14/08/2020

²²⁰ Wan.A.03. 12/08/2020

sekolah multicultural.

B. Pembahasan

Nilai-Nilai Moderasi Pendidikan Islam

Moderasi beragama dapat dirumuskan sebanyak mungkin ukuran, ciri-ciri, indikator untuk menentukan konsep, pola, sikap dan perilaku beragama tertentu apakah tergolong moderat atau sebaliknya. Menurut Shihab, seseorang yang memiliki sikap moderat dalam beragama memiliki pengetahuan yang luas, selalu berhati-hati, mampu mengendalikan emosi untuk tidak melebihi batas.²²¹ Sedangkan menurut Faturahman, moderasi beragama adalah cara pandang atau perilaku selalu memposisikan diri selalu di tengah-tengah, bertindak adil dan berimbang.²²² Kemudian menurut Hilmy²²³, moderasi beragama merupakan ideologi tanpa kekerasan dalam menyebarkan Islam: mengadopsi cara hidup *modern* dengan semua turunannya, termasuk sains dan teknologi, demokratis, hak asasi manusia dan sejenisnya, penggunaan cara berfikir rasional, pendekatan kontekstual dalam memahami Islam, dan penggunaan Ijtihad.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Albaqarah ayat 143 yang berbunyi: "*Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu*".²²⁴

Dari ayat di atas, sepertinya Al-Qur'an menginginkan umat Islam sebagai *ummatan wasathan*/umat pertengahan. *Ummatan wasathan* dimaknai umat yang di tengah atau moderat, umat yang adil, dan umat pilihan. Kata *Ummah* di dalam Alqur'an disebutkan sebanyak 64 kali di dalam 24 surah. *Ummah* berarti bangsa, kelompok masyarakat, agama atau kelompok keagamaan. Di dalam bahasa

Indonesia, *Ummah* sering di artikan umat, umat memiliki makna:

²²¹ Shihab, M. Q. *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2019)

²²² Oman Faturahman, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019)

²²³ Masdar Hilmy, Ampel, Iain Sunan. 2013. "WHITHER INDONESIA'S ISLAMIC MODERATISM? A Reexamination on the Moderate Vision of Muhammadiyah and NU" *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 7. No. 1 Tahun 2013, h. 24-48, DOI: [10.15642/JIIS.2013.7.1.24-48](https://doi.org/10.15642/JIIS.2013.7.1.24-48)

²²⁴ QS Albaqarah/2: 143

(1) bangsa, kaum, rakyat yang bersatupadu yang berlandaskan pada keimanan, (2) pengikut suatu agama atau nabi, (3) khalayak ramai, dan (4) umum, seluruh, serta umat manusia.²²⁵ Kata *ummah* dapat berarti seluruh kelompok ataupun golongan yang terhimpun atas sesuatu, baik itu agama maupun waktu, atau tempat yang sama, meskipun penghimpunannya itu dilakukan karena terpaksa ataupun atas dorongan kehendaknya.²²⁶

Rambu-rambu moderasi tercermin melalui 1) Pemahaman Islam secara komprehensif yang terdapat hukum syariah dan menyesuaikan zaman, 2) memberikan kemaslahatan dan kemajuan terhadap peradapan umat, 3) mendukung kedamaian dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan, 4) mendukung keragaman budaya, politik, dan agama, 5) mengakui keuniversalan Islam sebagai rahmat alam semesta.²²⁷ Jadi sikap moderat adalah suatu sikap yang adil, berimbang, selalu di tengah-tengah yang diambil dari kata *wasat*, lalu didistribusikan keranah pedidikan.

Proses Budaya Sekolah Multikultural

Budaya tidak dibentuk secara permanen, namun budaya sangat dinamis dalam beradaptasi dengan waktu dan ruang seperti beradaptasi dengan lingkungan, ekonomi, teknologi dan perubahan demografi yang terus berkembang dan bahkan berevolusi untuk mempertahankan dan melanggengkan kehidupan. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Geertz: “*Culture is historically transmitted pattern of meanings embodied in symbols, a system of inherited conceptions expressed in symbolic forms by means of which men communicate, perpetuate, and develop their knowledge about and attitudes toward life*”²²⁸

Kemudian budaya menurut Binford, Budaya adalah semua cara yang bentuk-bentuknya tidak langsung berada di bawah kontrol genetik yang bekerja untuk menyesuaikan individu-individu dan kelompok ke dalam komunitas ekologi mereka.²²⁹ “Konsep budaya turun jadi pola

²²⁵ M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedia al-Qur'an: Tafsir Sosial berdasarkan Konsep-konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 483

²²⁶ M.Q. Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 430

²²⁷ Lihat Sulaiman, dkk, *Pendidikan Masyarakat: ...*, h.152-159

²²⁸ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures*, (New York: Basic Books Inc, 1973) h. 89

²²⁹ Binford, Lewis R. “The Archaeology of Place”, dalam Robert Whallon (ed.), *Journal of Anthropological Archaeology I (1)*. New York: Academic Press, 1982. h. 323

tingkah laku yang terikat kepada kelompok-kelompok tertentu, yaitu menjadi “adat istiadat” (*customs*) atau “cara kehidupan” (*way of life*) manusia”²³⁰ Kemudian sekolah merupakan bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Pertemuan atau waktu ketika murid diberi pelajaran dan guru mentransfer pengetahuan. Ini senada dengan Goodenough: “*People learn as individuals. Therefore, if culture is acquired by learning, then the main place is certainly in the individual rather than in social groups*”²³¹

Konsep dasar budaya sekolah telah didefinisikan oleh beberapa ahli diantaranya Stolp dan Smith menyatakan bahwa: *School culture can be defined as historically transmitted of meaning that include the norms, values, beliefs, tradition and myths understood, may be in varying degrees, by member of the school community.*²³²

Proses pembentukan budaya tidaklah instan atau pembentukannya tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan. Pastinya proses pembentukan budaya ini membutuhkan waktu yang panjang dan proses pembentukan ini yang berulang-ulang. Proses penanaman nilai karakter moderasi beragama melalui pembelajaran, habituasi (pembiasaan), ekstrakurikuler.²³³ Menurut Parekh²³⁴ kemajemukan (*plurality*), keanekaragaman (*diversity*) dan keberagaman (*heterogeneity*) serta keragaman masyarakat merupakan kenyataan sekaligus keniscayaan. Kenyataan seperti ini menuntut dibangunnya berbagai “saluran dialog” oleh semua tokoh di berbagai sektor kehidupan. Keharusan ini dalam rangka menutup kemungkinan adanya entitas masyarakat yang mendapat diskriminasi dan eksploitasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif, karena akan mendiskripsikan, memahami dan menginterpretasikan, data dilapangan. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan dan

²³⁰ M. Harris, *The Nature of Culture Things*, (New York: Random Hous, 1964), h. 25

²³¹ W.H. Goodenough, *Comment on Cultural Evolution*, (Daedalus, 1961), h. 37

²³² Stolp, Stephen dan Smith, Stuart C (1995). *Tranforming School Culture Stories, Symbols, Values and Leaders Role*. Eugene, OR: ERIC, Clearinghouse on Educational Management University of Oregon, h. 13

²³³ Kokom Komalasari & Saripudin, *Pendidikan Karakter Konsep dan Aplikasi Living Values Education*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017) h. 32

²³⁴ Parekh, Bikhu, *Rethinking Multiculturalism; Cultural Diversity and Political Theory* (New York: Palgrave Macmillan, 2005), h. 142-276

memahami, menginterpretasikan fenomena-fenomena dilapangan terkait dengan nilai-nilai moderasi pendidikan Islam dan budaya sekolah multikultural di sekolah SMA Sultan Iskandar Muda. Metode ini dilandaskan teori Litchman mengatakan bahwa penelitian kualitatif ini merupakan proses deskripsi, memahami dan menginterpretasi.²³⁵

Kemudian jenis penelitian kualitatif memiliki lima pendekatan yakni (1) *Grounded Theory*, (2) *Case Study*, (3) Etnografi, (4) *Study* Naratif, (5) Fenomenology.²³⁶ Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi realis hasil teori yang dikembangkan oleh Creswell dan teori Gay, *et al.*, Pendekatan etnografi realis Creswell digunakan karena penelitian kualitatif yang mendiskripsikan dan menafsirkan pola fenomena-fenomena yang sama dari nilai, perilaku, keyakinan, dan bahasa dari suatu kelompok yang berkebudayaan sama dalam mewujudkan nilai-nilai moderasi pendidikan Islam melalui budaya sekolah multicultural di SMA Sultan Iskandar Muda.²³⁷

Dalam proses pencarian data ini bergulir dari satu informan ke informan yang lain dengan mengikuti prinsip seperti “bola salju” atau *snowball* sampling dan akan berakhir jika informasi yang dibutuhkan sudah diperoleh secara utuh, mendalam dan memiliki titik kejenuhan data. Berikut subjek dan informan penelitian dalam penelitian ini:

Tabel 1 Subjek dan Informan Penelitian

No	NAMA	JABATAN/ PEKERJAAN
1	dr. Sofyan Tan	Ketua Pembina Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda
2	Edi Jitro Sihombing, M.Pd	Kepala Sekolah
3	Fince Kusmanto, SE, M.Psi	Ketua Yayasan
4	Yohani Fitri, S.S, M.Hum	Wakil Kepala Sekolah I
5	Lifransius H Simamora, S.Pd	Wakil Kepala Sekolah II
6	Megawati, S.Pd	Wakil Kepala Sekolah III

²³⁵ Marilyn Lichtman, *Qualitative Reseach in Education: a User's Guide*, (USA: Sage Publication: 2010)h. 12-19

²³⁶ Jhon W Cresswell, *Eduactional Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research* (New Jersey: Person Education, Inc, 2012) h. 96

²³⁷ *Ibid...*, h. 125

7	Agus Rizal, S.Hi, M.Pd.I	Ketua Team Implementasi Multikultural
8	Agus Rizal, S.Hi, M.Pd.I	Guru Agama Islam
9	Ebenezer Parulian Dabuke, S.Pd.K, M.Pd	Guru Agama Kristen
10	Sumitra, S.Pd	Guru Agama Hindu
11	Purna Satya Raz, S.Pd.B	Guru Agama Budha
12	Lifransius H Simamora, S.Pd	Guru Bimbingan Konseling
13	Eko Saputra	Satuan Pengaman (Satpam)
14	a. Raju Hasudungan Simalango. b. Yunita Patricia c. Kharisma Kalita d. Metta e. Fassell Axel	Siswa SMA Sultan Iskandar Muda
15	Firmansyah	Peneliti

Kelas Bersama: Moderasi Pendidikan Islam Melalui Budaya Sekolah Multikultural

Kelas bersama merupakan sebuah kelas yang diadakan dalam sebuah program di luar jam pembelajaran agama Islam formal. Kelas bersama ini di desain sedemikian rupa agar semua siswa merasa nyaman dalam mengikuti kegiatan ini. Kelas bersama ini secara teknis mengumpulkan seluruh siswa, baik siswa yang beragama Islam, Kristen, Budha dan Hindu menjadi satu ruangan. Kemudian para dewan guru agama menyepakati materi yang akan di berikan kepada siswa, yang mana materi tersebut tidak menimbulkan jurang perbedaan semangkin curam dan melebar. Misalnya saja materi kasih sayang, materi kasih sayang merupakan materi yang semua agama mengajarkan terkait dengan kasih sayang.

Setelah di sepakati materi kasih sayang, para dewan guru agama akan presentasi, materi kasih sayang akan di presentasikan menurut versi agamanya masing-masing. Misalnya saja guru agama Islam akan presentasi kasih sayang menurut versi agama Islam, kemudian kasih sayang versi agama Kristen, kasih sayang versi agama Budha, dan

kasih sayang versi agama Hindu. Setelah pemaparan materi, guru-guru memberikan kesempatan bagi siswa yang ingin bertanya terkait materi ini. Kemudian kegiatan kelas bersama ini di tutup doa, setiap agama agar berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing, yang menarik di sini ketika umat Islam yang berdoa hanya umat Islam saja yang mengaminkannya, sedangkan umat yang lain hanya diam saja. Begitu pula dengan agama lain ketika berdoa, umat Islam diam saja, untuk menghargai temannya yang sedang berdoa.

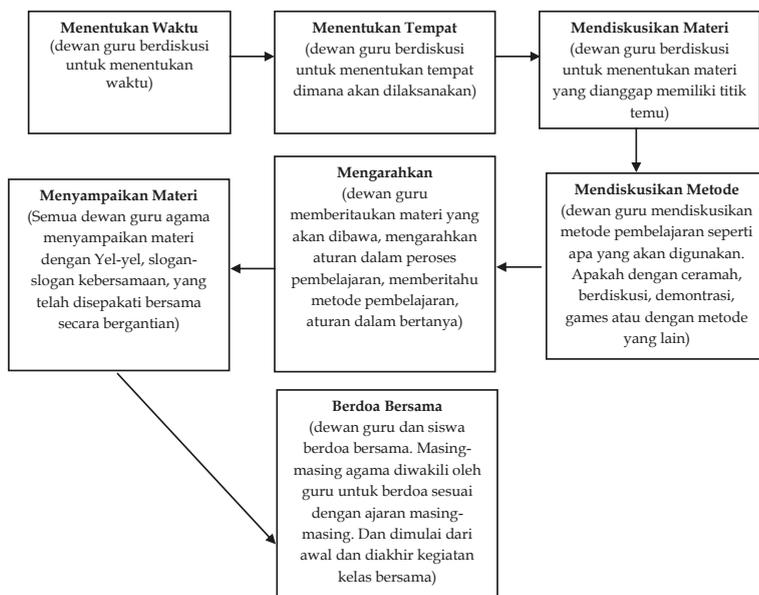
Kegiatan kelas bersama ini, tidaklah merubah sebuah keyakinan peserta didik, membuat siswa tidak taat kepada ajaran agamanya, berpindah agama dari yang satu ke agama lainnya, dan pendangkalan tauhid/ideologi. Namun siswa/i diberikan informasi terkait dengan ajaran agama yang dianut oleh orang lain, agar siswa bisa menghargai ketika mereka beribadah, ketika bergaul sesama mereka dan bercanda harus memiliki batasan serta memikirkan perasaan orang lain. Karena Undang-undang Dasar 1945 menjamin kebebasan untuk memeluk agama dan tidak ada unsur paksaan.

“Tapi kalau bersifat doktrinalnya tetap disampaikan ke anak-anak saya, tapi ketika di kelas bersama, sejauh ini malah, di sini agama kan 3 les Pak, tapi kelas keberagaman (bersama) itu mungkin karena kita mau berbuat variasi ya itu kurang, apa lagi mungkin pada saat sesi mulai kita selalu buat yel-yel gitu kan, gak ada sih yang baku yel-yelnya berubah-berubah karena untuk kebersamaan aja, kemudian endingnya ada game kebersamaan, gak tau sih guru-gurunya kayak gakk guru agama lama-lama, kayak guru kocak gitu, kayak comedian jadinya, seru pak jadinya, jadi anak-anak kapan lagi pak kelas kebersamaan.”²³⁸

Penyampaian materi, disampaikan dengan santai, rileks, dan nyaman mungkin untuk siswa. Dalam penyampaian materi diawali dengan yel-yel yang bertujuan untuk kebersamaan, lalu masuk materi inti, diselingi dengan jocki-jocki canda tawa, dan diakhiri dengan game kebersamaan. Dengan proses pembelajaran seperti itu, siswa merasa senang dan nyaman, mereka selalu menantikan kelas bersama akan dilaksanakan.

²³⁸ (Wan.A.06.13/08/2020).

Gambar 1. Proses Alur Kegiatan Kelas Bersama SMA Sultan Iskandar Muda



“Tapi tetap bahwa agama itu agama dia, karena di sini kita kan bukan berusaha merubah agama orang, tapi dari perspektif agama itu bagaimana, contoh saya ambil: kalau kita belajar “kasih” di Islam kan ada Pak, mengasih orang, misalnya konteks dari sisi Alqur’an gimana? Dari sisi Kristen kan ada, kata Tuhan Yesus “sayangilah dirimu, kalau kamu tidak menyayangi sesama mu tidak mungkin kamu menyayangi saya”, berarti omong kosong kita menyayangi Tuhan, kalau sesama kita tidak kita sayangi. Dan tidak dikatakan harus sesama Kristen, kan tidak ada. Budhis pun ada, ada kan Siwa dalam Budhis misalnya, diajarkan juga kasih ini. Di Hindu pun ada, jadi konteks-konteks inilah berpikir, sesungguhnya agama itu kebaikan, itulah yang bisa menekan rasismeituPak.”²³⁹

Namun, keberhasilan kegiatan kelas bersama ini, yang lebih penting adalah peran guru agama, mereka merupakan model, panutan, contoh, suri tauladan, di tengah-tengah warga sekolah yang tampak, ketika

²³⁹ Wan.A.02.14/08/2020

guru-guru agama bisa akur, damai, saling bercanda dan saling *support*, program kegiatan kelas bersama ini 90 persen berhasil, 10 persen lagi adalah dukungan dewan guru lainnya, dan tenaga pendidik. Berikut ini alur proses kegiatan kelas bersama yang dimulai dari menentukan waktu, menentukan tempat, mendiskusikan materi, mendiskusikan metode, mengarahkan, menyampaikan materi, dan berdoa bersama.

Materi dalam mata pelajaran pendidikan agama ini diambil dari materi yang bertemakan “kasih”. Kasih di pandang sesuai dengan konsep pembelajaran multikultural dari semua agama, karena kasih diajarkan pada setiap agama, yang perwujudannya adalah perbuatan baik. Ada materi lain yang relevan, namun materi yang bertemakan kasih dianggap cukup mewakili materi-materi yang lain. Materi ini juga dipandang sebagai realitas dari pluralism masyarakat Indonesia yang majemuk sesuai dengan prinsip-prinsip masing-masing agama, yaitu mengajarkan kasih. Walaupun dengan istilah dan dasar kitab yang berbeda-beda namun dapat dipastikan itu bermuara kesatu titik, yaitu membawa setiap umat yang dalam hal ini peserta didik untuk hidup dalam kebaikan dan menunjukan perbuatan baik dalam hidupnya sehari-hari.²⁴⁰

Selanjutnya untuk materi-materinya kelas bersama diambil dengan tema yang memang memiliki kesamaan, memiliki titik temu antar umat beragama, tidak memilih materi kontradiktif yang akan membuat jurang perbedaan semakin melebar. “Kita mengambil materi yang kontradiktif, itu nantikan membuat jurang perbedaan yang paling dalam, karena tujuan kita adalah bagaimana mereka memiliki nilai toleransi, kebersamaan, dengan satu tujuan membangun bangsa 5. Ustazd Agus Rijal menyatakan bahwa ajaran Rahmat (kasih sayang) dapat di lihat dalam Alqur’an: *Dan tiadalah Aku mengutus kamu (wahai Nabi muammad) melainkan karena rahmat (belas kasih) bagi semesta alam.*²⁴¹

Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan saling mencintai orang lain sebagaimana juga ia mencintai diri sendiri: “*Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman (dengan iman sempurna) sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.*”²⁴²

²⁴⁰ Yohani Fitri, *Melawan Kemiskinan: Kesaksian 7 Mantan Anak Asuh Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda*, (Medan: Yayasan Sultan Iskandar Muda kota Medan, 2017) h. 49

²⁴¹ QS. Al-Anbiya/21: 107)

²⁴² HR. Bukhori No. 13, Muslim No. 45

Guru agama Islam akan menekankan bahwa setiap orang bertanggung jawab mengasihi siapa saja yang ada di bumi ini tandapa memandang agama, suku, Bahasa, dan ras. Rasa sayang juga tidak hanya ditunjukkan bagi umat manusia saja, tetapi juga bagi alam dan lingkungan sekitar, dengan menjaganya, merawat dan melestarikannya.²⁴³ Kelas bersama ini salah satu model pembelajaran unik, yang jarang digunakan pada sekolah-sekolah umum lainnya. Sekolah SMA Sultan Iskandar Muda mengapresiasi pembelajaran model kelas bersama ini, karena kelas model seperti ini dapat mengikis sikap intoleransi antar umat beragama, *prejudice* dan *Stereotype* terhadap individu dan golongan. Dalam kegiatan kelas bersama ini mewujudkan nilai-nilai moderasi pendidikan Islam seperti nilai terbuka, nilai tidak ekstrim dalam beragama, nilai dialog dan nilai toleransi.

Kegiatan kelas bersama ini membentuk sebuah nilai moderasi pendidikan Islam Melalui Budaya Sekolah Multikultural:

1. Nilai Terbuka

Proses kelas bersama ini di luar jam pembelajaran formal, diagendakan ketika waktu guru memiliki titik temu. Kelas bersama ini sebuah program guru- guru agama SMA Sultan Iskandar Muda dengan tujuan untuk mempromosikan atau menyebarkan nilai-nilai kedamaian, kerukunan, kesamaan, kemanusiaan dan mengikis sikap-sikap intoleransi, *stereotype*, *prejudice*, diskriminasi, *mem-bully*, etnosentrisme, serta primordialisme di tengah-tengah masyarakat khususnya warga sekolah Sultan Iskandar Muda. Pada kegiatan kelas bersama ini terwujudlah nilai terbuka, kebenaran tidak hanya terdapat dalam satu kelompok saja, melainkan juga ada pada kelompok yang lain, termasuk kelompok agama sekalipun. Pemahaman ini berangkat dari sebuah keyakinan bahwa pada dasarnya semua agama membawa ajaran keselamatan. Perbedaan dari satu agama yang dibawa seorang nabi dari generasi ke generasi hanyalah syariat saja.²⁴⁴ Moderat dalam pemikiran Islam adalah mengedepankan sikap toleran dalam perbedaan. Keterbukaan menerima keberagaman. Baik beragama dalam mazhab maupun beragama dalam beragama.

²⁴³ Yohani Fitri, *Melawan Kemiskinan: Kesaksian 7 Mantan Anak Asuh Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda*, (Medan: Yayasan Sultan Iskandar Muda kota Medan, 2017) h. 51

²⁴⁴ A Shihab, *Islam Inklusif*, (Bandung: Mizan, 1999), h.89

Perbedaan tidak menghalangi untuk menjalin kerja sama, dengan asas kemanusiaan.²⁴⁵ Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujarat Ayat :10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ء

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”²⁴⁶

2. Nilai Tidak Ekstrim dalam Beragama

Kelas bersama ini jika diselenggarakan memiliki persiapan khusus seperti: mencari materi tepat yang memiliki titik temu disemua agama misalnya materi cinta kasih, berbakti orang tua, dan saling tolong menolong. Lalu strategi menyampaikan materi, dan waktu disesuaikan dengan guru-guru agama agar tidak berbenturan aktifitas atau kegiatan mereka. Kegiatan kelas bersama ini mewujudkan nilai tidak ekstrim dalam beragama moderasi pendidikan Islam ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Parekh, dalam keragaman agama-agama, yang muncul dalam suatu masyarakat multikultural baik yang memiliki sistem pemerintahan republik atau monarki, perbedaan sering menjadi pemicu munculnya berbagai hambatan dalam kohesi sosial.²⁴⁷ Hal senada yang dikatakan oleh Sirajuddin,²⁴⁸ yang mengatakan bahwa ajaran Islam mengembangkan dan membangun *intifah*, *tawassuth*, *musawah* dan *tawazun*, serta menjadi agen peradaban nilai-nilai, norma dan pesan agama yang penuh harmoni, persatuan dan perdamaian, termasuk mempertahankan nilai-nilai dan ketertiban

²⁴⁵ Darlis, “Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural”, *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat*, Vol.13 No. 2 Desember, 2017, 225-255. DOI: <https://doi.org/10.24239/rsy.v13i2.266>

²⁴⁶ Al-Hujarat/49:10

²⁴⁷ Bikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism; Cultural Diversity and Political Theory* (New York: Palgrave Macmillan, 2005), h. 99

²⁴⁸ Sirajuddin, M. “The Application of Multicultural Education in Pesantren: (A Case Study in the Pesantren Pancasila Bengkulu)”, *RJPS: Risalatuna Journal of Pesantren Studies*, 2010, 4 (1), h. 39

keharmonisan sosial di sekitarnya. Ini tercermin jelas dalam Al-Qur'an Surah An Nahl/16 Ayat: 93

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي
مَنْ يَشَاءُ ۗ وَلِتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan jika Allah menghendaki niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamukerjakan.”²⁴⁹

3. Nilai Dialog

Protokol kelas bersama ini dimulai dengan menentukan waktu, menentukan tempat, mendiskusikan materi bersama dewan guru, mendiskusikan metode, mengawali proses kegiatan bersama dengan doa, dewan guru memberitahu materi apa yang akan disampaikan, *ice breaking* sebelum menyampaikan materi, menyampaikan materi, penutup disimpulkan oleh setiap guru agama, yel-yel atau slogan yang telah disepakati bersama, lalu siswa dan dewan guru berdoa bersama. Perlu dicatat bahwa kelas bersama ini tidak merubah keyakinan siswa yang mengikuti kegiatan ini, bahwa siswa memiliki cara pandang, pengetahuan baru terkait dengan agama lain. Proses kelas bersama merupakan mewujudkan nilai dialog dalam moderasi pendidikan Islam, hal ini seiring dengan Mas'ud,²⁵⁰ upaya perlunya mengembangkan wawasan multikultural bagi segenap unsur dan lapisan masyarakat, serta peningkatan dialog dan kerja sama intern dan antarumat beragama dengan pemerintah dalam pembinaan kerukunan umat beragama.

4. Nilai Toleransi

Kegiatan kelas bersama juga mewujudkan nilai toleransi, karena adanya komunikasi, bersentuhan ruang-ruang religious diantara mereka. hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Casram yakni toleransi setara dengan sikap positif, dan menghargai

²⁴⁹ QS.An-Nahl/16:93

²⁵⁰ A Mas'ud, *Strategi Moderasi Antarumat Beragama*, (Jakarta: Kompas, 2018), h. 77

orang lain dalam rangka menggunakan kebebasan asasi sebagai manusia.²⁵¹ Kemudian toleransi beragama merupakan realisasi dari ekspresi pengalaman keagamaan dalam bentuk komunitas.²⁵² Toleransi merupakan bentuk akomodasi dalam interaksi sosial.²⁵³ Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Kafirun Ayat 2-6, terkait dengan toleransi: Artinya: *aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu buan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah, untukmu agamamu, dan untukku agamaku.*"²⁵⁴

C. Kesimpulan

Kelas bersama dalam mewujudkan nilai-nilai moderasi pendidikan Islam melalui budaya sekolah multikultural di SMA Sultan Iskandar Muda kota Medan, membentuk nilai-nilai 1) terbuka, 2) dialog, 3) toleransi dan 4) tidak ekstrim dalam beragama. Nilai terbuka tercermin pada keterbukaan siswa untuk menerima perbedaan yang ada pada diri mereka, terlihat mereka hadir dalam kegiatan kelas bersama. Kemudian nilai dialog, tercermin ketika siswa merespon materi yang diberikan oleh para dewan guru agama. Selanjutnya nilai toleransi, tercermin ketika bertemunya dalam satu ruangan, satu tempat duduk, yang berbeda dengan latar belakang, suku, etnis, agama dan golongan. Kemudian tidak ekstrim dalam beragama di sini, membuka ruang-ruang kecil untuk menerima penjelasan agama di luar agamanya.

²⁵¹ Casram, "Membangun Sikap Toleransi..," h. 187-198, DOI: <http://dx.doi.org/10.15575/jw.v1i2.588>

²⁵² Wach, Joachim, *The Comparative Study of Religion* (New York: Colombia University Press, 1958), h. 121-132

²⁵³ Graham C Kinloch, *Sociological Theory: Development and Major Paradigm* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), h. 35

²⁵⁴ QS.Al-Kafirun/109:2-6



BAB 9

RISET MULTIKULRALISME DAN KEMUNCULAN GERAKAN SOSIAL ISLAM DI MEDAN KONTEMPORER

A. Pendahuluan

Bab ini membahas kehadiran gerakan social Islam di ruang perkotaan di Indonesia Kontemporer, dalam hal ini Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama) di Medan. Titik fokusnya menelusuri bagaimana mereka muncul, dalam situasi dan ruang seperti apa yang mendorong kemunculannya, bagaimana mereka membentuk formasi gerakan, dan memengaruhi ruang public di Indonesia. Kehadiran gerakan social Islam seperti GNPF Ulama di ruang perkotaan tidak terlepas dari proses modernisasi kota. Pembangunan kota yang sekuler kapitalistik telah dipahami sebagai ancaman bagi eksistensi Islam di Medan. GNPF ulama memperkenalkan kepada public Islam tentang perlawanan terhadap kekuatan politik dan bisnis yang membuat hak-hak hidup kaum muslim terancam di kota. Public Islam juga harus disadarkan untuk bangkit dan bersatu dalam momentum politik electoral, mendukung pemimpin muslim yang peduli terhadap Islam. mereka meyakini dengan mendukung pemimpin muslim kebijakan kota akan mengarah pada pembelaan terhadap kepentingan kaum muslim.

Keterdesakan ruang hidup membuat banyak kalangan, terutama kaum muda milenial, mendukung aksi-aksi ini. Keterdesakan itu berupa dominasi kelompok Tionghoa yang memang unggul dalam berbisnis dan memiliki kemampuan mengakses lokasi-lokasi strategis di inti kota, kebutuhan pengembangan ruang pertokoan dan perhotelan modern mengakibatkan pengusuran beberapa masjid di kota sejak

2010an. Selain itu, beberapa kasus penistaan agama di Sumatera Utara, gelombang protes lebih besar di level nasional, terutama ketika menggugat pidato Basuki Tjahaja Purnama di Kepulauan Seribu Jakarta sekitar pertengahan Oktober 2016 tentang Surah Al-Maidah ayat 51, yang dianggap telah melecehkan dan menistakan Alquran. Menariknya, setelah kasus berlalu di pertengahan tahun 2017, GNPF Ulama Sumatera Utara masih melanjutkan gerakan mereka dengan banyak terlibat dalam proses politik elektoral seperti pemilihan kepala daerah Gubernur Sumatera Utara 2018, pemilu legislatif 2019, dan pemilihan kepala daerah Walikota-wakil Walikota Medan dan beberapa daerah lain tahun 2020.

Masuknya gerakan Islamis ke ruang demokrasi di Indonesia telah mendorong para sarjana untuk mengkaji fenomena ini dan memperdebatkannya. Beberapa kajian mengenai gerakan politik Islam populis ini dikorelasikan dengan kecenderungan globalisasi dan kapitalisme ekonomi. Sejatinya, perjuangan Islamis di sini adalah menolak demokrasi dan menegakkan syariah dan khilafah. Namun, perkembangan Islamis kontemporer menjelaskan fakta bahwa mereka beradaptasi dengan demokrasi modern sebagai kerja-kerja populisme Islam (Hadiz, 2018). Argumen Vedi R. Hadiz mengenai populisme Islam baru merujuk pada strategi yang diambil dengan mempertimbangkan atmosfer globalisasi yang kontradiktif dan sambil menunggu momentum yang memungkinkan penegakan ajaran Islam. Pendapat Vedi ini dikritik oleh Rangga Kusumo, bahwa fenomena gerakan Aksi Bela Islam yang digerakkan oleh GNPF MUI ketika itu bukanlah populisme Islam baru tetapi pseudo populisme Islam. Populisme Islam yang samar, yang menghendaki tujuan-tujuan politik pragmatis jangka pendek dengan mengatribusi dan framing Islam yang lekat (Kusumo & Hurriyah, 2018). Gerakan ini juga disebut sebagai kecenderungan meningkatnya aksi-aksi konservatisme agama atau dalam istilah Martin Van Bruinessen sebagai *conservative turn* (Van Bruinessen, 2013), ketika pemerintah tidak lagi mempromosikan Islam liberal seperti di era Suharto, maka kelompok Islam konservatif menguat. Gejala ini juga menjelaskan fragmentasi di kalangan otoritas keagamaan, di mana terjadi kekosongan figur otoritatif di kalangan Islam *mainstream* yang memunculkan otoritas alternatif di kalangan ummat Islam (Burhani, 2016). Kemunculan otoritas alternatif tersebut

segera disambut oleh ummat yang cenderung dalam atmosfer baru keagamaan dan kesalehan populer di ruang perkotaan di Indonesia (Wildan, 2016).

Penting dipertimbangkan bahwa fenomena kemunculan agama di ruang publik adalah tuntutan tata ulang sosial politik dan budaya yang mereka bayangkan mampu mewujudkan keadilan dan mencapai pembangunan yang sesungguhnya. Kesalihan di ruang publik kota muncul terkait dengan meningkatnya Islamisasi, mobilitas sosial, pertumbuhan ekonomi, dan demokratisasi yang terjadi di kalangan masyarakat (Hasan, 2011). Di sini dapat dilihat paralel antara Islamisasi, modernisasi, globalisasi, dan demokratisasi, di mana konsep kunci yang terkait dengan tren ini disesuaikan dengan yang berakar pada tradisi dan budaya lokal, untuk menginformasikan seluruh dinamika kota provinsi di Indonesia saat ini. Pemain kunci dalam aktivisme urban ini adalah kelas menengah baru, yang mencari inspirasi Islam baik untuk mengklaim perbedaan dan status sosial dan untuk melegitimasi gaya hidup konsumtif mereka (Hasan, 2011). Mereka, kaum muslim urban kelas menengah, menegosiasikan secara aktif antara keadaan global dan lokal serta pusat kosmopolitan dan pedalaman (Hasan, 2011). Di sisi lain, secara signifikan, mereka memainkan peran sebagai aktor yang meliberalisasi agama dari sikap yang secara tradisional tunduk, pasif, dan patuh dengan mengubahnya menjadi sumber legitimasi dan pembedaan moral untuk merepresentasikan bentuk kehidupan modern.

Dengan melihat hubungan erat dengan lokalitas, tradisi, modernitas, serta globalisasi, Islam semakin dianggap penting bagi politik lokal. Elit politik telah menggunakan simbol-simbol Islam untuk tujuan instrumental memperluas legitimasi politik mereka dan memobilisasi dukungan konstituen, dalam lingkungan politik persaingan terbuka dan peningkatan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan (Hasan, 2009). Dalam proses ini, simbol-simbol agama tak terbantahkan telah menjauh dari tambatan agama mereka dan pemahaman Islamis yang sempit, demi tujuan politik pragmatis (Hasan, 2011). Misalnya, fenomena gelaran zikir akbar dan pengajian di ruang-ruang kota (Hasan, 2012). Selain itu, geliat aktivisme keagamaan meningkat di ranah fashion, kosmetik, keuangan, dan gaya hidup lainnya. Di sini, kaum urban ini menggaungkan

pesan-pesan kebangkitan Islam, memengaruhi berbagai bidang sosial dan politik. Jaringan, pada gilirannya, menyediakan jalur yang dapat dideskripsikan untuk mobilitas ke atas dan juga pasar untuk produk komersial. Gerakan tersebut juga merupakan solidaritas Islam yang dapat dipertahankan dengan aktifitas pasca gerakan (Latief, 2016).

Sebagaimana setiap gerakan memiliki konsep, strategi, dan peranan yang unik di setiap ruang dan waktu, maka dalam konteks gerakan Islamis perkotaan di Medan, penting ditelusuri temuan-temuan yang membedakan secara halus (nuance) bagaimana setting sosial yang memberikan peluang kemunculan dan perkembangan gerakan. Kemudian, bagaimana mereka melakukan kerja-kerja mobilisasi sumber daya, mengatur strategi dan merumuskan tujuan dalam perebutan posisi politik dan sumber daya ekonomi; dan bagaimana mereka merumuskan dan mengidentifikasi budaya yang berkembang untuk dijadikan bahan pembingkai gerakan propaganda, yang berguna untuk menambah dukungan, mengawetkan dan memperpanjang daya tahan gerakan sehingga mencapai tujuan-tujuan gerakan.

Di sini, dapat dikatakan bahwa gerakan-gerakan tersebut merupakan peserta alamiah dalam proses urbanisasi. Henri Lefebvre, filsuf Marxis dan ahli teori proses sosio-spasial, berpendapat bahwa urbanisasi, sebagai fenomena globalisasi dan peran kapitalisme dalam proses perkotaan yang khas pada akumulasi modal, menyebabkan krisis perkotaan secara spesifik yang tidak dapat dengan mudah disimpulkan sebagai krisis kapitalisme industry (Lefebvre, 1991a). Akibatnya, gerakan politik protes di perkotaan bermunculan sebagai gerakan "*right for the city*", yang dipahami sebagai hak kaum urban untuk secara radikal mengubah proses-proses yang mengatur produksi dan penggunaan ruang kota (Kuymulu, 2013). B. Miller dan W. Nichols dalam laporannya mengatakan bahwa kota adalah ruang luas dan menjanjikan bagi gerakan mobilisasi karena karakteristik hubungan social perkotaan yang khas dan berbeda dari desa, dan problem ruang social yang kompleks (Miller & Nicholls, 2013).

Berbasis penelitian lapangan, saya menggunakan pendekatan sejarah dan ilmu politik untuk menganalisa factor-faktor kunci penyebab kemunculan gerakan. Teori peluang politik digunakan untuk menjelaskan kemunculan, perkembangan, dan pengaruh gerakan social (McAdam et al., 1996). Dalam konteks ini, pembahasan

mengadopsi pemahaman yang lebih luas tentang protes dan proses politik dan bahwa pengembangan teori membutuhkan lebih hati-hati dan lebih eksplisit konseptualisasi dan spesifikasi variabel dan model peluang politik, variabel dependen yang bersangkutan, dan asumsi yang mendasari tentang mekanisme di mana peluang dirubah ke dalam tindakan. Ketika mengamati GNPF, Saya juga menginvestigasi sejarah dan perkembangan gerakan social Islam, urbanisasi, dan proses demokratisasi di Medan. Selain itu, saya melakukan wawancara dengan beberapa tokoh kunci gerakan. Oleh karena itu bab ini fokus pada bagaimana proses politik dan struktur yang berkembang yang menyebabkan kehadiran gerakan social Islam? apa tujuan dari gerakan tersebut?

B. Pembahasan

Konflik ruang dan Gerakan Sosial Islam

Bagian ini merupakan uraian bagaimana urbanisasi dan kompleksitasnya menghasilkan aksi saling klaim ruang di Medan antara kelompok memunculkan aksi-aksi kolektif dari gerakan social Islam. dalam tempo tertentu, saling klaim ini tereskalasi meningkat menjadi konflik.

Medan merupakan ibu kota provinsi Sumatra Utara. Sejarah Medan sebagai kota modern bisa dimulai dengan Medan sebagai kota baru yang dibentuk oleh korporasi dagang Eropa dalam hal ini dipelopori oleh Deli Maschapaijt akhir abad 19. Sebelumnya Medan dikenal sebagai satu kampung kecil sebagaimana kampung kecil lainnya di sekitaran Sumatera Timur. Ichwan Azhari menjelaskan dalam memahami Medan sebagai cikal bakal kota modern dapat dilacak dari empat episode sejarah yang mengitarinya. Pertama, era Kota Cina pada abad 11-16 yang dipengaruhi oleh peradaban Hindu India. Kedua, era peradaban sungai yang ditandai oleh munculnya kerajaan Aru. Ketiga, era peradaban Labuhan Deli yang dikuasai oleh kesultanan Deli di sana. Dan keempat, periode kolonialisme perkebunan Belanda. Di fase sejarah yang belakangan inilah kota medan dapat dikatakan Medan sebagai sebuah kota.

Ekspansi perkebunan yang berada di sekitaran kota yang menopang perkembangan dari daerah di luarnya yang bermuara pada pembentukan wilayah administrasi bisnis di kota. Pembentukan kota ini murni untuk memenuhi kebutuhan orang-orang Eropa yang

bermukim di Sumatera Timur untuk berbisnis dan mengembangkan perkebunan. Di sini, dapat dipahami bahwa Medan diperuntukkan bagi kelas elit pengusaha pebisnis internasional bukan kolonial kelas tentara apa lagi buruh. Selain itu pula, Medan sebagai kota bukan dirancang untuk kehidupan keberagaman yang dibayangkan orang kebanyakan, tetapi sebagai kancha besar bisnis yang menjanjikan. Dengan pemahaman seperti itu, wajar kemudian Medan menjadi sasaran urbanisasi. Pengalaman ini menegaskan bahwa orang-orang yang datang dan bekerja di sini memiliki motivasi tinggi dalam perebutan ruang hidup yang lebih layak dan mapan ketimbang daerah asal mereka. Jadi, selain sebagai kancha ekonomi bisnis juga merupakan kancha pertarungan kepentingan politik. Kelompok-kelompok sosial yang beragam dari daerah asal mereka bergerak sesuai visi dan orientasi mereka, berkompetisi, dan berkonflik di ruang kota. Selain itu, unit-unit sosial membawa ideologi dan pengalaman hidup keagamaan mereka, mewarnai kehidupan kota, dan menambah kualitas hidup mereka secara lebih salih (Habermas, 2008). Urbanisasi di Medan banyak dilakukan oleh ragam etnis terutama Minang, Mandailing, dan sejumlah orang Jawa yang mendinamisir kehidupan bisnis sekaligus penyebaran Islam yang tidak dapat diabaikan. Secara okupasi, urbanisasi di Medan tidak hanya diisi oleh para buruh migran tetapi juga oleh para pelajar, para Ulama dan tenaga professional. Mereka pindah ke Medan karena alasan pendidikan, pekerjaan atau keselamatan untuk menghindari bahaya yang disebabkan oleh perang Kemerdekaan, revolusi sosial berdarah tahun 1946, dan tentara nasional mengejar para perambah ilegal di lahan perkebunan pada tahun 50an (Pelzer, 1982).

Kebijakan kolonialisme yang memanjakan kelas timur asing seperti kalangan Tionghoa dan mendiskreditkan Islam sebagai kelas bawah dalam politik telah memunculkan Gerakan Islam di Medan awal abad 20. Di sini telah muncul Syarikat Islam, Muhammadiyah (Pelly, 1994), Al Washliyah, Alittihadiyah (Rasyidin, 2016). Sementara NU baru masuk ke kota di paruh abad kedua puluh. Tiga organisasi yang disebut itu berasal dari promosi orang Jawa, sementara Al Washliyah (Tanjung, 2012) merupakan organisasi yang memang lahir dari Medan dan Al Ittihadiyah di Tanjungpura sekira 60 KM dari kota Medan.

Di Indonesia, konsep tata ruang kota dapat dilacak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 yang

menyatakan bahwa ruang merupakan keberadaan struktur ruang dan pola ruang. Sedangkan pengertian 'kota' adalah keadaan geografis yang menggambarkan sistem jaringan kehidupan manusia, ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya yang materialistis (Bintarto, 1989). Dalam Pasal 1 sub 10 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dinyatakan bahwa kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Politik tata ruang fisik di kota Medan kerap menghasilkan benturan antara ruang sekuler dengan ruang keagamaan. Ruang sekuler dapat dipahami sebagai representasi bangunan perkantoran pemerintah, lapangan terbuka, taman kota, jalan raya, pasar rakyat, dan pusat perbelanjaan modern (Kong & Woods, 2016). Ruang keagamaan berupa rumah ibadah secara fisik yang dapat dilihat dari bentuk bangunan Masjid sebagai rumah ibadah kaum muslim, Gereja untuk kalangan Kristen Protestan dan Katholik, Vihara untuk umat Budha, Kuil untuk penganut agama Hindu, dan Kelenteng untuk agama Konghucu. Bagian ini menerangkan bagaimana gerakan sosial Islam muncul sebagai respon dari proses gentrifikasi lahan di era pasca Suharto. Konflik yang terjadi merupakan perebutan ruang keagamaan dengan ruang bisnis. Intensitas konflik ini kemudian bergeser kepada anggapan buruk terhadap kelompok social lain dalam hal ini Etnis Tionghoa sebagai pesaing mereka dalam perebutan sumber daya politik di kota.

Di Medan, merujuk data BPS dalam angka 2018 terdapat komunitas plural agama yang terdiri dari 1.641.401 penduduk beragama Islam, 495.141 Protestan, 309.483 Khatolik, 9296 Hindu, 215.315 Budha, 11.194 Konghucu dan beragama lainnya 99 orang (BPS Medan, h. 179). Berdasarkan data tersebut dapat dipastikan terdapat persebaran ruang keagamaan secara fisik di Medan untuk melaksanakan peribadatan bagi penganut agama tersebut. Untuk rumah ibadah terdapat 1.110 Mesjid dan 649 Musholla, 594 Gereja, 18 Kuil, dan 185 vihara (BPS Medan, h. 175). Selain itu, lembaga pendidikan Islam juga tersedia banyak di kota, TK Alquran berjumlah 257 dengan jumlah guru 1308, jumlah Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah 438 dengan jumlah guru 2794

dan 64 Madrasah tsanawiyah.

Tabel 2 Ruang Keagamaan Secara Fisik di Medan

Rumah Ibadah	Jumlah
Islam	1033 Mesjid, 700 Musholla, 341 Langgar
Kristen Ptotestan	124 Gereja
Khatolik	10 Gereja
Hindu	35 Pura dan Kuil
Budhha	190 vihara
Konghucu	78 Kelenteng

Sumber: diolah dari Monografi Keagamaan Sumatera Utara
(Pulungan, 2013)

Tabel 3 Data Jumlah Pendidikan Islam Kemenag 2021

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	RA	289
2	MI	90
3	MTS	94
4	MA	33

Sumber: Website Kementerian Agama Kota Medan

Sayang sekali, dari website kementerian agama kota Medan tidak tersedia data mengenai sekolah keagamaan dari selain Islam sehingga dicukupkan di sini penjelasan mengenai ruang keagamaan di kota Medan. Namun, mengenai data penguasaan ruang fisik keagamaan selain Islam didapatkan sedikit informasi dari monography keagamaan Sumatera Utara seperti 17 Lembaga Pendidikan Budha dan 13 organisasi umat Budha. Lalu, ada sekitar 62 organisasi gereja. Di sini, melalui data yang tergambar dalam tabel yang telah disusun di atas menjelaskan bahwa penguasaan ruang fisik keagamaan didominasi oleh Islam.

Kecuali ruang fisik keagamaan yang digambarkan di atas, ruang kota Medan didominasi oleh ruang sekuler kapitalistik. Misalnya, Mall, di mana di sini terdapat sekira 18 pusat perbelanjaan modern seperti

Brastagi Supermarket, Buana Plaza, Cambridge City Square, Carrefour Citra Garden, Cathay City Hall Town Square, Crystal Square, Deli Grand City (DGC Supermall), Gelora Plaza, Grand Palladium Mall, Hermes Place Polonia, Hongkong Plaza, Imperial Trade Center, Istana Plaza Medan, Makro Cash & Carry Medan, Medan Mall, Medan Mega Trade Center (MMTC), Medan Plaza, Olympia Plaza, Plaza Medan Baru, Plaza Medan Fair, Plaza Millennium, Ramayana Super Center, Sun Plaza, Suzuya Superstore, Thamrin Plaza, Trend Trade Center, Yang Lim Plaza, Yuki Simpang Raya Mall, Yuki Sukaramai, Center point, dan yang terbaru di kawasan inti kota ada Deli Podomoro Supermall. Selain itu, ekspansi properti di kawasan Medan sangat massif. Perumahan-perumahan baru, sekolah dan kompleks pertokoan baru muncul sebagai pendukung kebutuhan aktifitas manusianya. Penelitian mengenai penggunaan lahan kota oleh Michel Sipayung dan koleganya menjelaskan bahwa perubahan penggunaan lahan di Kota Medan pada tahun 2007 dan 2012 sebesar 1.665,07 hektar dan perubahan penggunaan lahan di Kota Medan pada tahun 2012 dan 2018 sebesar 1.115,62 hektar (Sipayung et al., 2020).

Selanjutnya, Sipayung menjelaskan bahwa terdapat tiga wilayah kecamatan di Kota Medan yang mengalami perkembangan yaitu Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Labuhan dan Kecamatan Medan Marelan. Di sini dapat dilihat bahwa arah perkembangan fisik wilayah Kota Medan tahun 2007 hingga 2012 dan 2012 hingga 2018 adalah mengarah ke sebelah selatan Kota Medan. Sipayung juga menemukan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara metode yang digunakannya dengan fakta di lapangan, di mana hasil validasi menunjukkan bahwa terdapat delapan titik sampel yang tidak sesuai antara hasil digitasi dengan keadaan di lapangan. Delapan titik tersebut adalah klasifikasi Perdagangan Jasa sebanyak dua penggunaan lahan, Kawasan Industri sebanyak satu penggunaan lahan, Permukiman sebanyak empat penggunaan lahan dan Penggunaan Lain sebanyak satu penggunaan lahan (Sipayung et al., 2020). Nazaria Susanti dalam risetnya menemukan fenomena meningkatnya jumlah penduduk urban dapat memengaruhi tekanan terhadap ruang terbuka hijau sehingga terjadi perubahan lahan ruang terbuka hijau menjadi ruang terbangun.

Di Medan, tuntutan kebutuhan lahan bisnis sering menyeder tempat-tempat ibadah, secara mencolok terlihat ekspansi lahan bisnis

dan pusat perbelanjaan modern di kota, di mana selain menunjukkan kemegahan dan gemerlap kota juga menimbulkan konflik dengan komunitas muslim. Sejak 2012, terdapat belasan lokasi Mesjid yang dibongkar dan atau digantikan tempatnya dengan pusat-pusat bisnis modern. Kasus ini membuat gerakan Islam dalam hal ini dimotori oleh Forum Umat Islam (FUI) dan APMAS (aliansi Peduli Masjid) melakukan perlawanan baik melalui jalur hukum, melalui pengadilan, dan sejumlah demonstrasi. Di sini dapat dipahami bahwa kehadiran gerakan pembela masjid di Medan tidaklah dirancang dengan program strategis yang mapan kecuali sekedar reaksi kemarahan dan kekecewaan terhadap pihak dari luar mereka. Hal ini senada dengan argument Manuel Castell mengatakan bahwa gerakan muncul dan terbentuk dari emosi yang terkumpul dan berubah menjadi aksi (Castells, 2015). Gerakan social, di level personal, tidak muncul dan memulai aksi mereka dari sebuah program dan strategi politik. Gerakan hanya dimulai dari kemarahan, kekecewaan, dan keadaan emosional lainnya.

Mereka menganggap bahwa pembongkaran bangunan masjid dan ditukar fungsi menjadi pusat perbelanjaan modern adalah penistaan terhadap agama. Kasus ini tentu saja sempat menjadi berita panas yang menyita perhatian publik selama berbulan-bulan. Hingga kini, bahkan di beberapa lokasi konflik antara pengembang dengan pihak pengelola masjid masih terjadi. Beberapa masjid yang digusur dan dirobohkan atau dialihfungsikan antara lain; a) Masjid Al-Hidayah di komplek PJKA Gang Buntu; b) Masjid Jendral Sudirman di Komplek Kavaleri Padang Bulan; c) Masjid At Thoyyibah di jalan Multatuli Kecamatan Medan Maimun; d) Masjid Ar-Ridho di Komplek Kodam Polonia; e) Masjid Raudhatul Islam di jalan Peringatan Kelurahan Silalas Kecamatan Medan Barat; f) Masjid Al-Ikhlas di jalan Timor kecamatan Medan Timur.

Beragam modus sampai pada penggusuran masjid. Mulai dari kerja sama pihak pengembang dengan Pemkot Medan, penggusuran masyarakat dengan membeli rumah-rumah mereka dengan harga murah. Bila mereka tidak mau menjual rumahnya mereka diintimidasi sampai ada yang ditangkap dan ditahan, memengaruhi nadzir masjid untuk membuat surat permohonan agar dibuatkan Masjid baru, dengan alasan Masjid lama sudah tidak layak, atau jama`ah sudah tidak ada lagi karena telah pindah setelah rumah mereka dijual, merekayasa

dan memanipulasi hasil musyawarah sehingga seolah-olah masyarakat (jama'ah) setuju dengan pemindahan Masjid, mendapatkan fatwa / rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam kasus penghancuran Masjid At Thoyyibah, dikarenakan MUI Kecamatan Medan Maimun tidak setuju atas penghancuran Masjid At Thoyyibah, maka pihak pengembang langsung meminta, dan mendapatkan fatwa dari MUI Kota Medan, memanfaatkan oknum aparat keamanan dan preman sejak awal, dalam proses pembelian rumah warga, dan dalam pelaksanaan penghancuran Masjid At Thoyyibah.

Misalnya, kasus masjid at-Thayyibah yang bermula adanya rencana pembangunan ruko oleh PT Multatuli Indah Lestari di areal masjid itu berdiri. Sementara, masyarakat setempat menolak rencana pembangunan serta menolak eksekusi masjid, didasarkan Masjid At-Taibah berdiri di tanah wakaf sejak 1956. Tapi, tetap saja eksekusi dilakukan tahun 2006 oleh pihak PT Multatuli Indah Lestari. Dalih pengembang adalah telah mengantongi persetujuan dari MUI Medan, Pemko Medan serta pihak kepolisian dan bersedia mengganti rugi. Resistensi ummat kepada Ulama mereka dalam kasus pemindahan masjid terpolarisasi kepada dua bentuk yaitu tertutup dan terbuka. Mereka melakukan perlawanan terbuka melalui demonstrasi, memobilisasi massa, dan bahkan gugatan hukum. Indra Suheri sebagai salah satu tokoh FUI, menyatakan bahwa pembongkaran terjadi berkaitan dengan adanya fatwa yang dikeluarkan Komisi Fatwa MUI Medan tentang Masjid At Tayyibah (*MUI Medan Terus Dikecam*, n.d.) berulang kali aksi protes dilakukan bahkan di depan Kantor Sekretariat MUI Medan (Majelis Ulama Indonesia) tersebut, setelah Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Konflik perebutan ruang keagamaan paling panjang adalah masjid amal silaturahmi di Medan Area. Konflik ini terjadi sejak awal 2017 sampai sekarang. Awal mula terjadinya pertikaian ini adalah keinginan pihak perumnas sebagai perusahaan BUMN melakukan modernisasi gedung dan fasilitas rumah susun yang dikembangkan mereka. Salah satu upaya modernisasi fasilitas itu adalah merubah desain gedung dan menambah daya tampungnya. Pekerjaan ini harus merubuhkan bangunan masjid yang ada di sekitar lokasi pembangunan rumah susun (Fauzi, n.d.). Titik muncul perdebatan yang menyebabkan konflik dalam hal ini adalah soal status lahan masjid itu sendiri. Bagi

aliansi pembela Masjid, status masjid adalah wakaf dan secara syariah yang mereka pahami wakaf tidak bisa diganggu gugat, tidak mudah menggusur lahan wakaf. Di sisi berseberangan, bagi pihak Perumnas masjid dan lahannya berada dalam surat kepemilikan perusahaan sehingga tidak ada masalah bagi perusahaan untuk mengalihfungsikan bangunan apapun untuk keperluan perusahaan (Fauzi, n.d.).

Status wakaf sebagai dasar hukum sebenarnya dipahami beragam oleh kalangan ulama sendiri. Amar Adli, alumni Mesir dan Maroko, Dosen Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara, anggota komisi Fatwa di MUI kota Medan, memahami bahwa meskipun fatwa tidak masuk dalam struktur hukum di negara Indonesia tetapi dia harus menjadi landasan, apa lagi terkait langsung dengan kepentingan umat Islam. Oleh karena itu, fatwa tentang wakaf harus dipahami secara ketat dan hati-hati bahwa wakaf tidak bisa dialihfungsikan atau dipindahkan kecuali untuk persoalan kemaslahatan public (Adli, n.d.). Tidak bisa secara serampangan dan hanya untuk kepentingan bisnis semata lahan wakaf seperti masjid digusur atau dipindahkan (Adli, n.d.). Di sisi berbeda, Azhari Akmal Tarigan, anggota komisi Pengkajian Strategis MUI kota Medan berpendapat bahwa fatwa dalam system hukum Indonesia tidak dalam posisi yang meyakinkan dan kuat, soal pengalih fungsian atau istبدال masjid bisa dilakukan dengan pertimbangan konteks masyarakat kontemporer dan kebutuhan kota modern (Tarigan, n.d.). Namun, basis pegangan kelompok pembela masjid mempertahankan masjid Amal Silaturahmi adalah fatwa yang dipegang secara ketat sehingga tidak bisa sembarang dialihfungsikan oleh pihak luar.

Selain soal status hukum, konflik masjid Amal Silaturahmi juga dapat dibaca secara sosiologis. Misalnya, letak posisi Masjid ini dikepung oleh kompleks pertokoan yang secara kebetulan didominasi pebisnis Tionghoa, orang-orang muslim tergolong sedikit yang tinggal di sekitaran masjid. Dalam konteks ini, muncul pembacaan dari kalangan aliansi pembela masjid bahwa upaya penggusuran masjid bukanlah soal modernisasi perumnas, tetapi memberikan fasilitas bagi kalangan etnis tertentu dalam hal ini Tionghoa. Dari sini mereka meneruskan pembacaan bahwa pemerintah lebih pro kepada kelompok bisnis tidak kepada kelompok Islam. Kepentingan kebijakan politik dan bisnis mengorbankan kepentingan umat Islam dan menghilangkan symbol-symbol Islam di kota seperti masjid. Sejumlah spanduk dan poster

berisikan penolakan rencana penggusuran masjid terlihat di sekitar Masjid Amal Silaturrahim Jalan Timah Putih Rumah Susun Sukaramai, Kelurahan Sukaramai II, Kecamatan Medan Area. Spanduk, poster dan bendera sejumlah Ormas Islam itu terpasang sejak beberapa hari pasca adanya isu akan ada penggeseran Masjid Amal Silaturrahim yang akan dilakukan oleh pihak Perum Perumnas. Ketua Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Amal Silaturrahim Indra Syafi'i menyebutkan, pihaknya dan seluruh jamaah serta ormas Islam tetap mempertahankan keberadaan Masjid Amal Silaturrahim sekaligus menolak penggusuran tersebut. Tindakan Pihak Perumnas yang akan menggusur masjid melanggar Undang Undang Wakaf, apalagi penggeseran tersebut untuk kepentingan bisnis dan bukan kepentingan umum.

Konflik ruang keagamaan di Medan menjadi titik penting memahami kemunculan gerakan Islam perkotaan kontemporer. Kebijakan pemerintah kota, dominasi ruang, penggusuran, pada gilirannya menjadi bahan gerak mobilisasi dan framing kultur bagi gerakan untuk memperoleh dukungan dan menambah daya tahan gerakan. Dalam konteks Medan, sebagaimana risetnya Bruner (Bruner, 1961) Hasselgren (Hasselgren, 2000) Usman Pelly (Pelly, 1994) menjelaskan bahwa etnisitas memainkan peranannya dalam ruang urban yang kompetitif. Peluang politik dalam melakukan intervensi dan perubahan dalam sistem politik dapat muncul ketika sistem mengalami kerentanan dan krisis legitimasi dukungan dari masyarakat (McAdam et al., 1996)

Pembentukan wacana-wacana kota ini hadir di bawah tegangan berbagai kelompok kekuatan dan korporasi (Lefebvre, 1991b). Penguasaan secara signifikan akan menentukan kemungkinan penguasaan sebuah wilayah, ruang, atau kota itu sendiri oleh kelompok-kelompok atau korporasi-korporasi yang ada. Di dalam perbincangan mengenai kontruksi kota ia merupakan sinematik sosial, di mana simbol-simbol dan representasi menjelaskan hubungan dari berbagai interaksi sosial budaya. Di sini dipahami bahwa ruang bukanlah sesuatu yang netral tetapi ia dikonstruksi secara sosial di dalam ruang-ruang ini hadir berbagai macam praktik sosial. Ruang bukan hanya bersifat fisik tetapi sosio-kultural. Konstelasi dan relasi beragam kelompok, beragam kepentingan dan relasi kuasa menjadikan kota sebagai ruang kompleks. Kota merupakan sebuah lanskap semiotik yang di dalamnya berbagai

macam diskursus hadir (Papen, 2015)

Dalam konteks GNPF Ulama Sumatera Utara, mereka menganggap kota menjadi tempat mengkonsolidasi gerakan. Kota dan dinamika perkembangannya telah berlaku secara tidak proporsional dan tidak memihak umat Islam sehingga penting membangkitkan kembali semangat Islam yang bisa mewarnai perkembangan kota (Rafdinal, n.d.). Citra Islam pada diri kota, Islam sebagai mayoritas penduduk kota telah tereduksi oleh proses politik global, nasional, dan dinamika politik local (Rafdinal, n.d.). Oleh karena itu, mereka mencoba memanfaatkan proses politik seperti yang mereka anggap untuk bergerak memobilisasi Islam sebagai usaha melakukan perubahan sosial yang diinginkan.

Skema Kemunculan Gerakan Politik Islam Urban

Gambar 2. Politik Lokal Dan Kemunculan Gerakan



Manuel Castells mengatakan awalnya gerakan social hadir hanya berupa kemarahan dan kekecewaan, selanjutnya, ketika proses politik berlangsung, pemimpin-pemimpin gerakan muncul membawa agenda politik pribadi dan ideologis yang tidak selalu sama sejati dengan motivasi awal para anggota gerakan (Castells, 2012) dalam konteks gerakan social Islam di Medan, selain gerakan hadir untuk merespon struktur kota yang dianggap tidak memberikan keadilan dan proporsi yang cukup bagi umat Islam, gerakan juga hadir dalam momentum politik electoral di tingkat local. Factor kunci kehadiran gerakan Islam

dalam peristiwa politik electoral ini sangat terkait dengan actor gerakan itu sendiri. Jadi, actor kunci gerakan Islam yang mengatasmakan ummat ini juga actor politik.

Mobilisasi gerakan GNPF Ulama Sumatera Utara sangat terkait dengan momentum politik electoral. Konteks kemunculan GNPF MUI di Jakarta dengan aksi bela Islam berjilid-jilid, dapat dijadikan penguat argument ini bahwa gerakan ini terkait Pilkada Jakarta 2017. Oleh karena itu, gerakan ini bukanlah gerakan keagamaan semata tetapi gerakan politik praktis terkait suksesi kepemimpinan di Jakarta. Di sini, gerakan sebagai gerakan politik praktis tidak dapat begitu saja diabaikan dengan sejumlah argumen. Pertama, latar belakang sejumlah aktor kunci gerakan dari partai politik. Dalam gerakan GNPF Ulama Sumatera Utara terdapat sejumlah aktivis yang memang ikut dalam kontestasi pemilu legislatif. Ustadz Aidan Nazwir Panggabean yang berlaku sebagai ketua GNPF Ulama Sumatera Utara sesuai SK GNPFU Pusat per Januari 2021, adalah merupakan kader Partai Bulan Bintang wilayah Sumatera Utara. Ustadz Aidan pernah berlaku sebagai calon legislatif dari PBB untuk level dewan provinsi pada tahun 2014 dan 2019 (N. A. Panggabean, n.d.) Ustadz Aidan mengklarifikasi bahwa keikutsertaannya pada pemilu legislatif sebagai caleg dari PBB berdasar pada pemahaman integral dalam Islam bahwa Islam dan Politik tidak dapat dipisahkan. Sehingga, selain berpolitik secara non-parlemen, Ustadz Aidan meyakini perjuangan politik Islam melalui demokrasi dan duduk di kursi legislatif bisa lebih efektif dan berpengaruh (N. A. Panggabean, n.d.)

Selain itu, Tumpal Panggabean, salah satu wakil ketua GNPF misalnya, pernah terlibat dalam proses pemilu legislatif sebagai calon legislatif dari partai Demokrat pada pemilu 2014. Sama dengan Rafdinal yang ikut sebagai caleg dari ragam partai. Rafdinal mengaku sebagai aktivis reformasi 1998, salah seorang pendiri partai PAN di Medan di awal reformasi (Rafdinal, n.d.) Lalu, pada pemilu 2004-2009, Rafdinal merupakan calon legislatif dari PBB, tahun 2014 sebagai calon senator (DPD RI), dan di pemilu 2019 sebagai calon legislatif dari PAN untuk kursi dewan di kota Medan (Rafdinal, n.d.). Rabualam Syahputra, adalah aktivis gerakan kerakyatan di Forum Rakyat Bersatu (FRB) dan pernah dua kali mencalonkan diri sebagai kandidat bupati Deli Serdang tahun 2008 dan 2013 melalui jalur independen. Dedi Iskandar Batubara,

aktivis Al Washliyah dan sekarang merupakan ketua Al Washliyah Sumatera Utara, adalah senator anggota DPD RI dua periode 2014-2019 dan 2019-2024. Romo Raden Syafii, yang juga sebagai former gerakan di periode awal merupakan aktivis umat yang berpartai di Gerindra, pernah juga di PPP, dan PBR. Ustadz Heriyansyah, pernah didaulat sebagai kordinator presidium GNPF Ulama di masa awal juga pernah dua kali menjajal pemilukada di kabupaten Langkat periode 2008 dan pemilukada 2019. Keterlibatan dalam proses pemilukada juga tidak dapat disepelekan tetapi harus digencarkan. Dukung mendukung kepala daerah seperti dalam pilgubsu 2018 dilakukan oleh GNPF Ulama Sumatera Utara, (*GNPF Ulama Sumut Deklarasikan Dukung Eramas*, 2018) aktif terlibat dalam lobi pilkada kota medan 2020. (*Lobi PKS, PAN, Gerindra, Dan Demokrat Untuk Pilkada Medan, GNPF Ulama Sumut Usulkan 12 Nama Balon*, 2020)

Para aktivis yang saya wawancarai mengatakan bahwa langkah politik praktis tersebut sebenarnya adalah bagian dari gerakan politik yang sejalan dengan tujuan utama mereka yaitu berjuang secara politik untuk umat Islam, dan langkah ini juga merupakan bagian dari ajaran Islam untuk terlibat aktif secara politik. Tumpal menjelaskan bahwa GNPF Ulama SU mendorong para aktivis mereka untuk menyebar secara aktif dan terlibat dalam proses pencalegan dengan tujuan berpolitik untuk umat. Ketika kita bersentuhan dengan ruang politik yang ada pilihannya adalah memilih orang yang bisa dipercaya (T. Panggabean, n.d.). Dalam konteks pemilu legislatif para aktifis 212 itu melebur ke dalam berbagai partai, mereka yang terlibat dalam kepesertaan di Pileg 2019 menggunakan atribut bela Islam seperti Caleg 212 atau Mujahid 212, dalam rangka untuk menarik dukungan dari masyarakat yang simpati terhadap gerakan 212 waktu itu, mereka gunakan itu dalam rangka untuk menarik dukungan dari gerakan atau masyarakat yang simpati dengan 212. Merebut kursi legislative itu dilakukan dengan alasan untuk memberikan kontribusi yang jelas ketimbang teriak dari pinggir jalan, langkah itu juga dimaksudkan untuk mengawal kepentingan umat Islam secara kelembagaan resmi negara (T. Panggabean, n.d.). Mereka juga menganggap bahwa langkah politik praktis dapat juga dirasa lebih efektif untuk berjuang ketimbang berteriak di jalanan. Kemudian, usaha menguasai politik di parlemen resmi dapat diharapkan sekaligus untuk mengurangi praktek korupsi

dan kebijakan yang tidak memihak Islam (T. Panggabean, n.d.).

Di sini, dapat dipahami bahwa keterlibatan beberapa aktor gerakan dalam politik praktis politik elektoral di Indonesia sebagai strategi yang memungkinkan gerakan mobilisasi dilakukan. Selain itu, proses politik elektoral memungkinkan mereka mendapatkan peluang melakukan negosiasi politik, lobi kepada sejumlah elit politik. Mereka meyakini proses ini sebagai cara yang efektif dalam menancapkan kepentingan politik umat Islam kepada kandidat kepala daerah yang muslim agar bisa berkomitmen dalam pembangunan daerah yang memperhatikan umat Islam.

Dalam konteks politik electoral, mobilisasi gerakan yang massif, yang sering mengundang dukungan simpatik orang banyak, melibatkan massa dalam jumlah besar, merupakan peluang negosiasi dukungan kepada para elit politisi. Para actor gerakan melihat ada celah kelemahan dari sisi partai politik sebagai mesin pendukung calon kepala daerah dan sebagai mesin pengumpul suara. Mandeknya mesin mobilisasi partai politik ini didukung dengan liberalisasi permainan politik dalam proses pemilihan. Para kandidat kepala daerah harus mencari kelompok-kelompok strategis yang mampu bekerja mengumpulkan dukungan suara secara efektif dan efisien. Dalam konteks inilah kemudian mobilisasi gerakan social Islam bertransformasi kepada mobilisasi dukungan suara dalam pemilihan kepala daerah.

Pasca meredanya kasus Ahok di Jakarta, GNPf Ulama Sumatera Utara masih terus melancarkan mobilisasi gerakan mereka di pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 (Pilgubsu 2018). Mereka aktif bermusyawarah di level gerakan untuk memunculkan siapa yang perlu didorong untuk kontestasi di ajang Pilgubsu ini. Rangkaian maneuver politik mereka lancarkan dalam waktu yang terjaga. Pertama, mereka mengajukan calon mereka sendiri dari jalur perseorangan seperti yang dilakukan oleh Rabu Alam Sahputra. (*Pembina GNPf MUI Sumut Rabualam Deklarasi Cagub*, 2017) Deklarasi dilakukan di hotel berbintang empat di tengah kota Medan yaitu hotel Madani yang berseberangan jalan dengan Masjid Raya AlMahsun Medan dan berdekatan dengan Istana Maimon. Langkah ini sebagai strategi mengukur respon pasar dukungan terhadap gerakan dan usaha mengkonsolidasikan gerakan yang sempat lemah pasca kasus Ahok. Dalam menguatkan itu, mereka juga melakukan fragmentasi politik

dengan memunculkan calon lain dari kalangan mereka juga yaitu Ustadz Nazwir. Strategi lain yang mereka gunakan adalah mendelegitimasi tokoh-tokoh yang dianggap tidak pro Islam. Misalnya, ketika figur Edi Rahmayadi dideklarasikan oleh Gerindra dan PKS sebagai kandidat bakal calon Gubernur Sumatera Utara, mereka melakukan penolakan terhadap itu. Keputusan kedua partai tersebut mereka anggap tidak aspiratif karena belum berkomunikasi dengan mereka. Jelang penetapan calon pasangan peserta pilgubsu 2018 oleh KPU, PDIP sebagai partai besar di Medan mengeluarkan keputusan mengusung dan menetapkan Jarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus (Pasangan JOSS) sebagai jago mereka dalam Pilgubsu 2018. Segera setelah itu, muncul juga deklarasi pasangan Edi Rahmayadi dan Musa Rajekshah (ERAMAS) yang didukung oleh Golkar, Gerindra, Nasdem, PKS, Demokrat. Polarisasi politik segera terbentuk dari kedua pasangan peserta Pilgubsu 2018 ini. Misalnya, Narasi Djarot Saiful Hidayat sebagai pendukung Ahok. Jarot Saiful Hidayat memang merupakan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2016 ketika demonstrasi Anti Ahok sedang gencar-gencarnya. Akibatnya, figure ini diidentikkan sebagai figure yang lengket dengan Ahok. Selanjutnya, figure Sihar Sitorus yang beragama Kristen, dipersoalkan oleh gerakan ini sebagai ancaman terhadap eksistensi umat Islam di Sumatera Utara. Dalam konteks ini GNPF MUI kemudian memilih mendukung pasangan ERAMAS bersaing dengan pasangan Jarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus.

Dalam usaha mendukung pasangan ERAMAS, gerakan GNPF Ulama Sumatera Utara menganggap pasangan ini sebagai kandidat kepala daerah yang punya komitmen keislaman dan kemajuan Islam di Sumatera Utara. Oleh karena itu, telah dibuat kontrak sosial antara gerakan GNPF Ulama Sumatera Utara dengan pihak pasangan ERAMAS.

Gambar 3. Rabualam Syahputra mendeklarasikan pencalonannya di Pilgubsu 2018 melalui jalur perseorangan



Gambar 4. sesi penandatanganan kontrak politik pasangan ERAMAS dengan GNPf Ulama SU.



Ustadz Aidan Nazwir Panggabean menegaskan dukungan kepada pasangan ERAMAS ini sesuai dengan komitmen gerakan sejak awal yang meliputi; *pertama*, berkomitmen membela kepentingan Islam, Ummat, dan Ulama; *kedua*, berkomitmen menjaga keberadaan dan mensertifikasi masjid-masjid yang ada di Sumatera Utara secara bertahap; *ketiga*, berkomitmen membangun ekonomi Islam dengan mewujudkan perbankan syariah; *keempat*, berkomitmen membangun Islamic Centre; *kelima*, berkomitmen menjadikan GNPf Ulama Sumut, Ormas Islam, para Ulama serta Ummat sebagai mitra strategis dalam mengelola persoalan Sumut.

Mobilisasi Islam di ranah politik electoral pilgubsu 2018 mendapatkan momentum disebabkan dua hal. Pertama, figure Djarot Saiful Hidayat yang merupakan kader PDIP, selain bukan orang asli putra daerah Sumatera Utara, juga figure yang terlibat mendukung Ahok di Jakarta. Kedua, figure Sihar Sitorus sebagai pasangannya merupakan figure beragama Kristen. Dengan demikian, PDIP dianggap tidak pro perjuangan Islam karena mengusung figure tersebut. Narasi pasangan tidak pro Islam ini yang memperpanjang nafas gerakan dan mendapatkan framing secara mudah untuk kebutuhan mobilisasi politik. Tentu saja, gerakan tidak sendirian dalam memobilisasi ini dan jelas sekali kerja ini bagian dari kerjasama politik antara actor gerakan dan actor politik dalam momentum politik pula.

Gerakan ini memainkan politik identitas dalam hal ini agama dalam dukungan mereka memenangkan pasangan ERAMAS. Setelah rangkaian Pilgubsu sampai pada pemungutan suara kemudian, hasilnya, KPU Sumatera Utara mengumumkan bahwa pasangan ERAMAS menang dari pasangan JOSS. Dalam salinan Keputusan Pemilihan Umum Provinsi Sumatra Utara Nomor 160/PL.03.7-Kpt/12/Prov/VII/2018 yang diperoleh Bisnis, Ketua KPU Sumut Mulia Banurea menyatakan pasangan tersebut memperoleh 3.291.137 suara atau 57,58% dari total suara sah dalam Pilgubsu yang digelar pada 27 Juni 2018, dan pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar sitorus mendapatkan suara sebesar 2.424.960 atau sekitar 42,42%. Pasangan ERAMAS mendapatkan dukungan nyata dari mayoritas penduduk muslim yang berada di sekitaran wilayah pantai Timur dan ujung pantai Barat, Sumatera Utara.

Pemilu dan Pilpres 2019

Mobilisasi politik untuk kebutuhan electoral terus digulirkan oleh aktifis gerakan dalam pemilihan umum serentak antara pemilhan legislative dan Pilpres Tahun 2019. Sebabnya, pertama, para aktifis gerakan ikut sebagai peserta pemilu sebagai calon legislative. Kedua, kepesertaan kembali (rematch) Jokowi vs Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019.

Sejumlah aktifis GNPF Ulama Sumatera Utara turut serta dalam proses pemilihan calon anggota Legislatif tahun 2019, diantaranya; Rafdinal sebagai caleg no 4 dari PAN daerah pemilihan IV kota Medan. Nazwir Aidan Panggabean, Dedi Iskandar Batubara Calon DPD RI,

Raden Muhammad Syafii calon DPR RI dari partai Gerindra, Sugiati Santoso calon DPRRI dari Gerindra. Panggung-panggung aksi bela Islam yang digelar GNPF telah menambah keyakinan actor gerakan menjadi actor politik, mereka menjajal kursi legislative dan senat perwakilan daerah. Sayangnya, atribusi sebagai caleg 212 dan aktivis GNPF tidak membawa Rafdinal, Aidan Nazwir, dan Sugiati Santoso, ke raihan kursi legislative. Namun, untuk Dedi Iskandar Batubara dan Raden Muhammad Syafii berhasil menduduki kursi senator dan DPRRI.

Mobilisasi Islam lebih panas di ranah Pilpres 2019 ketimbang di pemilu legislative. Kepesertaan di legislative diikuti oleh banyak orang dan partai dengan latar belakang kepentingan beragam dan kompleks. Sementara itu, Pilpres 2019 adalah tarung ulang antara Joko Widodo versus Prabowo Subianto. Figur Joko Widodo sejak periode pemilu 2014 telah dipropagandakan ke khalayak public sebagai tidak pro Islam, pro China, pro komunis, dan kapitalis. Sehingga, dengan demikian dukungan kelompok gerakan Islamis lebih banyak ke pada Prabowo. Kedekatan Prabowo dengan gerakan Islamist atau populisme Islam ini sebenarnya agak aneh karena secara figure Prabowo berlatar belakang Militer sekuler liberal, Ibu dan beberapa anggota keluarganya penganut Kristen. Namun, sejak 2014 Prabowo tidak ragu menggunakan isu-isu Islam untuk membentuk koalisi dengan organisasi-organisasi Islam dalam upaya mengalahkan Jokowi, dan terutama dukungan Prabowo kepada Anis Baswedan-Sandiaga Uno di Pilgub DKI 2017, ia mendapat dukungan penuh dari semua kelompok Islam. Pada 2019, Prabowo kembali memanfaatkan isu agama yang memecah belah dan menggalang dukungan kelompok-kelompok Islam, dan dalam skala yang lebih besar dibandingkan 2014.

Dalam mempertimbangkan peta dukungan Islam populist ini, Joko Widodo memilih pasangannya yaitu Kyai Haji Ma'ruf Amin. Pilihan ini harus dibaca sebagai upaya melawan arus peningkatan yang mengkhawatirkan dalam politik identitas dan kewirausahaan politik dari beberapa aktor populis Islam utama selama periode 2016-2019. Kyai Ma'ruf merupakan ulama kharismatik NU dan ketua MUI yang memungkinkan Jokowi bisa menangkis serangan terhadap dirinya sebagai figure anti Islam, anti ulama. Hasilnya, Pilpres 2019 dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dengan raihan

suara sebesar 85.607.362 atau 55,50 persen dari total suara sah nasional. Sementara itu, Prabowo-Sandiaga Uno meraih sekira 68.650.239 atau 44,50 persen dari total suara sah nasional.

Pemilihan Walikota Tahun 2020

Mobilisasi politik atas nama ummat dan kepentingan Islam selalu dilakukan oleh GNPF selama pemilukada 2020. Berbagai maneuver politik mereka lancarkan di ruang public, kepada kelompok-kelompok politik strategis untuk memengaruhi kebijakan politik sepanjang perhelatan.

Pertama, GNPF Ulama memetakan calon. Langkah ini dibuat di antara lobi-lobi partai politik dalam penjaringan calon. Gerakan GNPF Ulama ini melakukan penjaringan calon mirip seperti yang dilakukan oleh partai politik. Dalam perhelatan pilkada kali ini mereka mempersiapkan dua opsi untuk mengusung bakal calon yang dijaring, yakni melalui jalur independen (perseorangan) maupun jalur parpol (Sumutpos, 2020). Januari 2020, GNPF Ulama melakukan rapat tertutup yang dihadiri oleh dewan syuro dan dewan tanfidz, diantaranya Ustad Heriansyah SAg, Ustad Aidan Nazwir P, H Tumpal Panggabean MA, Ustad Rahmad Gustin, dan pengurus lainnya di Kantor Sekretariat GNPF Ulama Sumut, Jalan Bunga Kenanga Medan. rapat tersebut mengagendakan pembahasan dan penjaringan nama-nama calon walikota Medan pada pilkada Medan 2020. Hasilnya, terjaring 12 nama tokoh Islam dan tokoh masyarakat kelas nasional dan daerah yang diusulkan menjadi calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, baik melalui jalur partai politik maupun jalur independen yakni Tifatul Sembiring, MS Kaban, Raden M Safii (Romo), Prof Dr Muhammad Hatta, Sakhyan Asmara, Dedy Iskandar Batubara, Syafii Efendi, Ihwan Ritonga, Salman Al Farisi, Irfan Hamidi, Muhammad Safii, dan Affan Lubis. Nama-nama tersebut diseleksi berdasarkan rekam jejak ketokohan dan pembelaan mereka terhadap ummat Islam dan akan diperjuangkan oleh GNPF Ulama untuk diperkenalkan kepada partai politik di daerah dan juga pusat (T. Panggabean, n.d.).

Selanjutnya, silaturahmi dan lobi politik. GNPF Ulama Sumut bersilaturahmi dengan parpol di Kota Medan dengan target partai-partai mempertimbangkan untuk memutuskan mengusung dua nama tokoh yang mereka usulkan untuk menjadi calon Wali Kota dan Wakil

Wali Kota Medan yang akan bertarung pada September 2020. Sembari berkomunikasi dengan Parpol, mereka juga berhitung secara politik untuk mempertimbangkan maju lewat jalur independent.

Langkah politik GNPF Ulama Sumatera Utara ini kandas, ketika Partai politik kemudian berbeda dengan suara mereka. Partai politik mengusung calon yang mereka unggulkan masing-masing. Dalam proses politik kemudian, PDIP-Gerindra Mengusung pasangan Bobby Nasution-Aulia Rahman. Didukung oleh Golkar, Nasdem, PAN, PPP, PSI, dan Hanura. Sementara itu, Demokrat dan PKS mengusung pasangan Akhyar Nasution-Salman Alfarisi.

Selanjutnya, sekira bulan September 2020, tiga bulan lagi jelang pemungutan suara di pilkada medan 2020, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Sumatera Utara menggalang petisi dukungan masyarakat menuntut pelaksanaan Pilkada Medan ditunda di tengah Pandemi Covid-19. Mereka khawatir Pilkada Medan akan menjadi klaster baru penularan virus Corona. Maneuver penundaan pilkada ini hanya di Medan, tidak terjadi di daerah lain. Alasannya, penularan virus Corona sangat tinggi dibanding daerah lainnya di Sumut. Dalam mobilisasi ini, masyarakat, yang setuju untuk penundaan pilkada, diminta untuk membubuhkan tandatangan di atas kain putih. Selain mobilisasi jalanan, mereka juga mengajukan gugatan Class Action ke Pengadilan Negeri Medan, dengan agenda gugatan meminta agar KPU Medan dan Bawaslu menunda Pilkada Kota Medan yang akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang.

Di luar itu, Pilkada Medan tetap belangsung sampai hari pemilihan. GNPF Ulama Sumatera Utara mengonsentrasikan dukungan mereka kepada pasangan Akhyar-Salman yang didukung oleh Demokrat-PKS. Selanjutnya, berdasarkan rekapitulasi KPU Medan, Bobby-Aulia memperoleh 393.327 suara atau 53,45 persen dari suara sah. Bobby Nasution - Aulia Rachman menang di 15 kecamatan antara lain Kecamatan Medan Kota, Sunggal, Helvetia, Denai, Kecamatan Medan Barat, Medan Deli, Tuntungan, Belawan, Medan Labuhan, Medan Polonia, Medan Baru, Medan Perjuangan, Petisah, Medan Timur dan Kecamatan Medan Selayang. Sementara itu, rival mereka yakni Calon Wali Kota Petahana Akhyar Nasution yang berpasangan dengan Salman Alfarisi meraih 342.580 suara atau 46,55 persen. Akhyar Nasution - Salman Alfarisi menang di 6 kecamatan antara lain Kecamatan Medan

Amplas, Medan Area, Medan Johor, Marelan, Medan Tembung, dan Kecamatan Medan Maimun.

C. Penutup

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kehadiran gerakan social Islam dalam hal ini GNPf Ulama Sumatera Utara merupakan reaksi dari keterdesakan ruang hidup mereka di ruang kota. Gentrifikasi terjadi sebagai konsekuensi dari urbanisasi dan orientasi pembangunan kota yang mementingkan ekspansi pertumbuhan ekonomi melalui peleluasaan pengembangan kawasan bisnis dan ekonomi, tetapi melupakan ketersediaan ruang keagamaan yang proporsional.

Kedua, kemunculan gerakan disebabkan peluang politik yang dilihat dari liberalisasi proses demokrasi, absennya partai politik sebagai mesin mobilisasi suara pendukung. Peluang memainkan politisasi identitas lebih dianggap sebagai kerja strategis yang murah dan efektif dengan tidak mempertimbangkan nilai-nilai keadaban public di ruang kota. Akibatnya, toleransi, saling menghargai sesama warga negara menjadi terabaikan dan ruang hidup yang nyaman di kota menjadi terancam.

Sebagai sebuah bab tentu saja kajian ini mengalami keterbatasan dalam menyusuri berbagai aspek yang dibutuhkan jawaban ilmiahnya. Dengan demikian keadaan ini juga memberikan peluang bagi para pengkaji lainnya dalam memahami sebab-sebab kemunculan gerakan social Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- A Mas'ud, *Strategi Moderasi Antarumat Beragama*, (Jakarta: Kompas, 2018)
- A Shihab, *Islam Inklusif*, (Bandung: Mizan, 1999)
- Abd. Qadir al-Awdah, *al-Tashri' al-Jina'i al-Islami*, (Beirut: Dar al-Kutb, 205)
- Abdul Munir Mulkhani, "Humanisasi Pendidikan Islam" dalam *Tashwirul Afkar, Jurnal Refleksi Pemikiran keagamaan dan Keindonesiaan*, Edisi No.11 Tahun 2001.
- Abdurrahman Wahid, (ed) *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional*, Cet. I, (Jakarta: The Wahid Institute, 2009)
- Abu 'Abd Allah Muhammad bin Ahmad al-Ansariy Al-Qurtubiy, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Vol. 1. Beirut, (Lubnan: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993)
- Abu Ismail Muhammad ibn Abd Llah Al-Azdiy Al-Bashriy, *Kitab Futuh Al-Syam*, (Calcuta: Bapstis Machine, 1854)
- Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisyam bin Ayyub Al-Himyari, *Al-Sirah Al-Nabawiyah*, juz 3 (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabiy, 1990)
- Abuddin Nata, *Pendidikan dalam Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2016)
- Abul Fida' Al Hafidz Ibnu Katsir, *Al Bidayah wa Al Nihayah*, juz 3 (Kairo: Dar AlHadits, 2006)
- Abul Qasim Mahmud Bin Umar Al-Khawarizmi Az-Zamakhsyari. *Al-Khasysyaf, an Haqaiq al-tanzil 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, tth)
- Ahmad Baso, *Tradisi Lokal dan Masa Depan Agama*, Majalah Majemuk, No. 6 November-Desember 2003

- Ahmad Muhammad al-Hufiy, *Samahah al-Islam*, (Kairo: al-Majlis al-A'la li Suuni al-Islamiyah, Wazirah al-Awqaf, 2009)
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi Jilid IV*, (Mesir: Mushthafa al-Bab al-Halabi: 1969)
- Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005)
- Al-Maliky, Syaikh Ahmad Al-Shawi, *Hasyiah Al-'Allamah Al-Shawy 'Ala Tafsir Al-Jalaluddin*, (Surabaya: Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah, tt)
- Ali Maksun dan Luluk Yunan Ruhendi, *Paradigma pendidikan Universal di Era Modern dan Post-Modernisme* (Yogyakarta: IRCiSod, 2004)
- Ali Maksun, Ali Maksun, *Pluralisme dan Multikulturalisme, Paradigma Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, (Malang: Aditya Media Publishing, 2011)
- Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. *Taxonomy for learning, teaching and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives*, (New York, NY: Longman, 2001)
- Azyumardi Azra, *Keragaman Indonesia: Pancasila dan Multikulturalisme*, makalah 2007.
- Azyumardi Azra, *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007)
- Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000)
- Adli, A. (n.d.). *Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Medan, 23 Agustus 2021*.
- Bintarto. (1989). *Interaksi Desa-Kota*. Ghalia Indonesia.
- Bruner, E. M. (1961). Urbanization and Ethnic Identity in North Sumatra. *American Anthropologist*, 63(3), 508–521. <https://doi.org/10.1525/aa.1961.63.3.02a00040>
- Burhani, N. (2016). Aksi Bela Islam Konservatisme: Konservatisme dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan. *Jurnal Maarif*, 11, 135–156.
- Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur di Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015)
- Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism: Keragaman Budaya dan Teri Politik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008)
- Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism: Keragaman Budaya dan*

- Teri Politik, (Yogyakarta: Kanisius, 2008)
- Bikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism; Cultural Diversity and Political Theory* (New York: Palgrave Macmillan, 2005)
- Bikhu Parekh, *Rethinking Multikulturalism*, (Harvard University Press, 2002)
- Binford, Lewis R. "The Archaeology of Place", dalam Robert Whallon (ed.), *Journal of Anthropological Archaeology I (1)*. (New York: Academic Press, 1982)
- Brian Fay, *Contemporary Philosophy of Social Science: A Multicultural Approach*, (Oxford: Blackwell, 1996)
- Casram, "Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural", *Wawan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2016, h. 187-198, DOI: <http://dx.doi.org/10.15575/jw.v1i2.588>
- Castells, M. (2012). *Networks of outrage and hope: social movements in the Internet age*. Cambridge: Polity Press.
- Castells, M. (2015). *Networks of outrage and hope: Social movements in the Internet age*. John Wiley & Sons.
- Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)
- Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
- Cliffortz Geertz, *The Interpretation of Cultures*, (New York: Basic Books Inc, 1973)
- D.J. Skeel, *Elementary Social Studies: Challenge for Tomorrow's World* (New York: Harcourt Brce College Publishers, 1995)
- Darlis, "Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural", *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat*, Vol.13 No. 2 Desember, 2017, 225-255. DOI: <https://doi.org/10.24239/rsy.v13i2.266>
- David Jarry and Julia Jary, *Dictionary of Sociology*, (London, Harper-Collins Publishers, 1991)
- Dody S.Truna *Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikulturalisme: Telaah Kritis Atas Muatan Pendidikan Multikulturalisme dalam Buku Ajar Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010)

- E. Sutrisno, "Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan Actualization of Religion Moderation in Education Institutions", *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 12, No. 1, h. 323-348. 2019, <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i2.113>
- Fauzi, A. (n.d.). *Menejer Proyek Perumnas Sentral Land Medan Area, Wawancara 11 Oktober 2021*.
- Fakhr al-Din Al-Raziy, *Al-Tafsir al-Kabir aw Mafatih al-Ghayb*, Vol. 2. Beirut, (Lubnan: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990)
- Fita Mustafida dan Yakub Cikusin, "Pembelajaran Nilai Multikultural dalam Budaya Madrasah di MIN 1 kota Malang", *Jurnal Pendidikan Multikultural*, Vol. 3 No. 1 2019, h. 21-36, DOI: <http://dx.doi.org/10.33474/multikultural.v3i1.2550>
- G Priyatmono, *Ngaji Teori : Bourdieu, Derrida, Foucault dan Implementasinya untuk Disertasi*. (Yogyakarta: Impulse, 2020)
- George Zaydan, *Tarih} Al Tamadun Al Islamiy*, (Beirut: Dar Maktabah Al Haya@t, tt)
- Graham C Kinloch, *Sociological Theory: Development and Major Paradigm* (Bandung: Pustaka Setia, 2005)
- GNPF Ulama Sumut Deklarasikan Dukung Eramas. (2018). <https://sumutpos.co/gnpf-ulama-sumut-deklarasikan-dukung-eramas/>
- Habermas, J. (2008). Notes on a Post Secularist Society. *NPQ: New Perspectives Quarterly*, 25(4), 16–29. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5842.2008.01017.x>
- Hadiz, V. R. (2018). Islamic populism in Indonesia: Emergence and limitations. *Routledge Handbook of Contemporary Indonesia*, 296–306. <https://doi.org/10.4324/9781315628837>
- Hasan, N. (2009). The making of public Islam: Piety, agency, and commodification on the landscape of the Indonesian public sphere. *Contemporary Islam*, 3(3), 229–250. <https://doi.org/10.1007/s11562-009-0096-9>
- Hasan, N. (2011). Islam in Provincial Indonesia: Middle Class, Lifestyle, and Democracy. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 49(1), 119–157. <https://doi.org/10.14421/ajis.2011.49.1.119-157>
- Hasan, N. (2012). Piety, Politics, and Post-Islamism: Dhikr Akbar in Indonesia. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 50, 369–390.

<https://doi.org/10.14421/ajis.2012.502.369-390>

- Hasselgren, J. (2000). *Rural Batak, Kings in Medan The Development of Toba Batak Ethno-religious Identity in Medan, Indonesia, 1912-1965*. Elanders Gotab.
- H.A.R Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*, (Jakarta: Indonesia Tera, 2003)
- H.A.R, Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2004)
- Helen A. Guthrie, *Human Nutrition* (Missouri : Mosby-Year Book, 1995)
- Heru Nugroho, *Atas Nama Agama*, (Bandung: Pustaka Hidayah, Cet. I, 1998)
- Hidayatullah, Kholid, "Mazhab Ulama dalam Memahami Maqashid Syari'ah", *Jurnal Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1 2017, h. 16. DOI: <https://doi.org/10.30659/jua.v1i1.1971>
- Ibn Kathir, al-Hafiz Abi al-Fida' Isma'il, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Vol. 1. Beirut, Lubnan: Dar al-Ma'rifah, 1992)
- Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah bin Bardazibah al-Bukhariy al-Ju'fiy, *Shahih al-Bukhari*, Juz 1, (Semarang: Maktabah wa Matba'ah Usaha Keluarga, 1981 M/1401 H)
- Imam Ahmad bin Muhamad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin 'Auf bin Qasithi bin Marin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa'labah bin Uqbah bin Sha'ab bin Ali bin Bakar bin Wail, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, tt)
- James A. Banks, & C. A. M. Banks, *Handbook of Research on Multicultural Education*, (New York: Mac Millian, 2005)
- James A. Bank, (ed), *Multicultural Education: Issues and Perspectives*, (London: Allyn and Bacon Press, 1993)
- James Banks, *Multicultural Education: Historical Development, Dimensions, And Practice*, (Review of Research in Education, 1993)
- James Banks, *Multiethnic Education: Theory and Practice*, 3rd ed. (Boston: Allyn and Boston, 1994)

- Jhon W Cresswell, *Eduactional Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research* (New Jersey: Person Education, Inc, 2012)
- Joseph Alagha, "Moderation and the Performing Arts in Contemporary Muslim Societies" *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 32 (3): 44-68. 2015, DOI <https://doi.org/10.35632/ajis.v32i3.270>
- Kasinyo Harto, *Model Pengembangan Pendidikan Agama Islam berbasis Multikultural*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012)
- Kautsar Azhari Noer, *Menyemarakkan Dialog Agama Perspektif Kaum Sufi*, (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1999)
- Kemdikbud, *Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 2011)
- Kemdikbud. 2011. *Pedoman pelaksanaan pendidikan karakter*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan.
- Kemenag RI, *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*, (Jakarta: Dirjen Pendis, 2019)
- Khalid Muhammad Khalid, *Rijal Hawl al-Rasul*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2000)
- Ki Supriyoko, (Ed) *Pendidikan Multikultural dan Revitalisasi Hukum Adat, dalam Perspektif Sejarah*, (Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala Tahun Terbit : Juli 2005)
- Kinloch, C Graham. *Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi* (Bandung, Pustaka Setia 2005)
- Koentjaraningrat, *Rintangan-rintangan Mental dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia*, Ed.2 (Jakarta: Lembaga Riset Kebudayaan Nasional Seni, 1969)
- Kokom Komalasari & Saripudin, *Pendidikan Karakter Konsep dan Aplikasi Living Values Education*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017)
- Kong, L., & Woods, O. (2016). *Religion and Space: Competition, Conflict, and Violence in the Contemporary World*. Bloombury Academic.
- Kusumo, R., & Hurriyah, H. (2018). *Populisme Islam di Indonesia: Studi*

- Kasus Aksi Bela Islam oleh GNPf-MUI Tahun 2016-2017. *Jurnal Politik*, 4(1), 87–114.
- Kuymulu, M. B. (2013). Reclaiming the right to the city: Reflections on the urban uprisings in Turkey. *City*, 17(3), 274–278. <https://doi.org/10.1080/13604813.2013.815450>Laila
- Octaviani, *Pandataru dan Jarlatsu: Model Pendidikan Multikultural di SMA Taruna Nusantara Magelang*”, *Jurnal Komunitas*, Vol. 5, No. 1 Tahun 2013, h. 112-127, DOI: <https://doi.org/10.15294/komunitas.v5i1.2383>
- Latief, H. (2016). Solidaritas Islam dan Gerakan Sosial Pasca “Aksi Bela Islam” 2016. *Ma’arif*, 11(11), 188.
- Lefebvre, H. (1991a). *The Production of Space*. Basil Blackwell, Ltd. <https://doi.org/10.2307/378107>
- Lefebvre, H. (1991b). *The Production of Space*. Blackwell: Oxford,.
- Lobi PKS, PAN, Gerindra, dan Demokrat untuk Pilkada Medan, GNPf Ulama Sumut Usulkan 12 Nama Balon*. (2020). <https://sumutpos.co/lobi-pks-pan-gerindra-dan-demokrat-untuk-pilkada-medan-gnpf-ulama-sumut-usulkan-12-nama-balon/>Listia dkk, *Pendidikan Interreligius, Gagasan Dasar dan Modul Pelaksanaan*, (Jakarta: Religion for Peace, 2016)
- Luc Reyhler, “Challenges of Peace Research”, *International Journal of Peace Studies*, Vol. 11 No. 1 Spring/summer 2006
- Lulu Syifa Pratama, dkk, “Variasi Pemahaman Keagamaan Mahasiswa IAIN Surakarta”, *Academika: Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2017
- M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedia al-Qur’an: Tafsir Sosial berdasarkan Konsep-konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 1996)
- M. Harris, *The Nature of Culture Things*, (New York: Random Hous, 1964)
- M. Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2019)
- M. Quraish Shihab, *Perempuan, Seri.03*, Cet. IV, (Jakarta: Lentera Hati, 2007)
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran* (Bandung: Mizan, 2003)
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Qur’an*. Vol. 8. (Lentera Hati, Jakarta, 2002).

- M.Q. Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996)
- Makhluf, Syaikh Hasanain Muhammad, *Shafwatul Bayan Li Ma'anil Qur'an*, (Cairo: Darul Basya'ir, 1994)
- Marilyn Lichtman, *Qualitative Reseach in Education: a User's Guide*, (USA: Sage Publication: 2010)
- Masdar Hilmy, Ampel, Iain Sunan. 2013. "WHITHER INDONESIA'S ISLAMIC MODERATISM? A Reexamination on the Moderate Vision of Muhammadiyah and NU" *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 7. No. 1 Tahun 2013, h. 24-48, DOI: [10.15642/JIIS.2013.7.1.24-48](https://doi.org/10.15642/JIIS.2013.7.1.24-48)
- Maslikhah, *Quo Vadis Pendidikan Multikultural, Rekonstruksi Pendidikan Berbasis Kebangsaan*, (Surabaya: Stain Salatiga Press, 2007)
- Mawarti, S. Nilai-nilai Pendidikan Toleransi dalam Pembelajaran Agama Islam, *Jurnal Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 9 (1) DOI <https://doi.org/10.24014/trs.v9i1.4324>
- Misrawi, Zuhairi, *Al-Qur'an Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme*, (Jakarta: Fitrah, 2007)
- Mohd Shukri Hanapi, "The Wasatiyyah (Moderation) Concept in Islamic Epistemology: A Case Study of its Implementation in Malaysia". *International Journal of Humanities and Social Science*, 4 (2) 51-62. 2014, DOI <https://doi.org/10.30845/ijhss.v4i2.2014>
- Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *Mu'jam al-Mufahraz li Alfaz al-Qur'an al-Karim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981)
- Muhammad Harfin Zuhdi, "Dakwah dan Dialektika Akulturasi Budaya", *Religia: Jurnal Ilmu-ilmu Kesilaman*, Vol. 15 No. 1, April 2012, h. 46-64, DOI:<https://doi.org/10.28918/religia.v15i1.122>
- Muhammad Tholchah Hasan, *Pendidikan Multikultural Sebagai Opsi Penanggulangan Radikalisme*, (Malang: Lembaga Penerbitan Unisma, 2016)
- Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Pcrspektif Sosio Kultural*, (Jakarta: Lantabora Press, 2005)
- Muhammad Tholhah Hasan, *Pendidikan Multikultural Sebagai Opsi Penanggulan Radikalisme*, Cet. Ke-3. (Malang: Lembaga Penerbitan UNISMA, 2016)
- Muhandis Azzuhri, Konsep multikulturalisme dan Pluralisme dalam

- Pendidikan Agama (Upaya Menguniversalkan Pendidikan Agama dalam Ranah Keindonesiaan). *Forum Tarbiyah* Vol. 10, No. 1, juni 2012. (Online), <https://id.scribd.com/doc/303154690/370-1380-2-PB>, diakses 13 Desember 2017
- Mundzier Suparta, *Islamic Multicultural Education*, (Jakarta: al-Ghozali Center, 2008)
- Munif, *Multikulturalisme dalam Pendidikan Madrasah: Nilai, Implikasi dan Model Pngembangannya*, (Surabaya: Imtiyas, 2016)
- Musthafa Al-Hishni Al-Manshuriy, *Al-Muqthathaf min Uyuni Al-Tafasir*, juz 2 (Damsyiq: Dar Al-Qalam, 1996)
- McAdam, D., McCarthy, J. D., & Mayer N. Zald. (1996). *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings*.
- Medan, B. K. (2019). *Kota Medan Dalam Angka 2019*. <http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19755.pdf>
- Miller, B., & Nicholls, W. (2013). Social movements in urban society: The city as a space of politicization. *Urban Geography*, 34(4), 452–473. <https://doi.org/10.1080/02723638.2013.786904>
- MUI Medan Terus Dikecam. (n.d.). Retrieved June 15, 2021, from <http://sumutpos.co/2012/09/12/mui-medan-terus-dikecam>
- Ngainun Naim dan Sauqi, Achmad, *Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011)
- Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pascakemerdekaan*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2009)
- Oman Faturahman,dkk, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019)
- Pandangan Nurcholis Madjid ini dinukil oleh Budhy Munawar Rahman dalam Bukunya *Islam Pluralis*, (Jakarta: Paramadina, 2001)
- Parekh, Bhikhu. *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*, (London : Macmillan, 2000)
- Parekh, Bikhu, *Rethinking Multiculturalism; Cultural Diversity and Political Theory* (New York: Palgrave Macmillan, 2005)
- Parsudi Suparlan, “Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural,” Makalah. Disampaikan pada Simposium Internasional Bali ke-3, *Jurnal Antropologi Indonesia, Denpasar Bali*, 16-21 Juli 2002.

- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik, Penyelenggaraan Ujian Nasional, Dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan Pada Smp/Mts Atau Yang Sederajat Dan Sma/Ma/Smk Atau Yang Sederajat.
- Pierre Bourdieu, *Arena Produksi Kultural, Sebuah Kajian Sosiologi Budaya*, terjemahan, (Bantul: kreasi Wacana, 2010)
- Panggabean, N. A. (n.d.). *Ketua GNPf Ulama Sumatera Utara, Wawancara 2 Juni 2021, di Medan.*
- Panggabean, T. (n.d.). *Wakil Ketua GNPf Ulama Sumatera Utara dan Delegasi khusus dengan GNPf Ulama di Jakarta, Wawancara 1 Juni 2021.*
- Papen, U. (2015). Signs in cities: The discursive production and commodification of Urban spaces. *Sociolinguistic Studies*, 9(1), 1–26. <https://doi.org/10.1558/sols.v9i1.21627>
- Pelly, U. (1994). *Urbanisasi dan Adaptasi: Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing*. LP3ES.
- Pelzer, K. J. (1982). *Planters against peasants*. Martinus Nijhoff.
- Pembina GNPf MUI Sumut Rabualam Deklarasi Cagub*. (2017). Medan Bisnis Daily. <https://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2017/11/22/327426/pembina-gnpf-mui-sumut-rabualam-deklarasi-cagub/>
- Pulungan, A. (2013). *Monografi Keagamaan Sumatera Utara*. IAIN Press.
- Rahardjo, M. Dawam, *Ensiklopedia al-Qur'an: Tafsir Sosial berdasarkan Konsep-konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 1996)
- Raslimin, *Multikulturalisme: Teori dan Aplikasi dalam Pendidikan IPS*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2020)
- Robert Hefner, *Introduktion: Multiculturalism and citizenship in Malaysia, Singapur, and Indonesia*, (Honolulu: University of Hawaii Press, 2001)
- Rosnow, Ralph L.; *Poultry and Prejudice*. (Psychology Today, 1972)
- Rafdinal. (n.d.). *Tokoh GNPf SU perwakilan Muhammadiyah, Wawancara di Medan 28 Mei 2021.*
- Rasyidin, A. (2016). Islamic organizations in North Sumatra: The politics of initial establishment and later development. *Journal of Indonesian*

- Islam*, 10(1), 63–88. <https://doi.org/10.15642/IIIS.2016.10.1.63-88>
- Sayyid Quthb, *Fi dzilalil Qur'an, di Bawah Naungan al-Qur'an*, terj. As'ad Yasin dkk, Jakarta: Gema Insani Pres, 2000)
- Sipayung, M. C., Sudarsono, B., & Awaluddin, M. (2020). Analisis Perubahan Lahan Untuk Melihat Arah Perkembangan Wilayah Menggunakan Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus : Kota Medan). *Jurnal Geodesi Undip*, 9(1), 373–382.
- Sumutpos. (2020). *Lobi PKS, PAN, Gerindra, dan Demokrat untuk Pilkada Medan, GNPF Ulama Sumut Usulkan 12 Nama Balon*. <https://sumutpos.co/lobi-pks-pan-gerindra-dan-demokrat-untuk-pilkada-medan-gnpf-ulama-sumut-usulkan-12-nama-balon/M.> Fuad Nasar (Tim Kerja Dirjen Bimas Islam), yang penulis kutip dari website kementerian agama Peran Depag dalam Bingkai Nation State, <https://kemenag.go.id/home/bab/12537>
- Shihab al-Din al-Sayyid Mahmud al-Alusi al-Baghdadi, *Ruh al-Ma'ani Jil. IX* (Beirut:Kutub al-Ilmiah, tt)
- Sirajuddin, M. “The Application of Multicultural Education in Pesantren: (A Case Study in the Pesantren Pancasila Bengkulu), RJPS: Risalatuna Journal of Pesantren Studies, 2010, 4 (1)
- Stephanie Wheatley, *From Violence to Voting: Toward an Islamist Theory of Moderation*. (Disertasi untuk program doctor pada Departemen Church studi Universitas Barley, 2011)
- Stolp, Stephen dan Smith, Stuart C, *Transforming School Culture Stories, Symbols, Values and Leaders Role*. Eugene, (OR: ERIC, Clearinghouse on Educational Management University of Oregon, 1995)
- Suhadi (editor) dkk, *Mengelola Keragaman Sekolah, Gagasan dan Pengalaman Guru*, (Yogyakarta: CRCS, PPs UGM, 2016)
- Sulaiman, dkk, *Pendidikan Masyarakat: Moderasi, Literasi dan Pernikahan Dini*, (Yogyakarta: Diva Press, 2020)
- Sutrisno, E., “Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan Actualization of Religion Moderation in Education Institutions”, *Jurnal Bimas Islam*, 12 (1): 323-348. 2019.
- Tanjung, M. (2012). *Maktab Islamiyah Tapanuli 1918-1942: Menelusuri Sejarah Pendidikan Islam Awal Abad ke-20 di Medan*. IAIN Press.

- Tarigan, A. A. (n.d.). *Komisi Kajian Strategis MUI Kota Medan, Wawancara 14 Agustus 2021*.
- Theresa E. McCormick (1984) *Multiculturalism: Some principles and issues, Theory Into Practice*, 23:2, 93-97, doi: 10.1080/00405848409543097
- Thomas J La Belle, *Multiculturalism and Education: Diversity and Its Impact on Schools and Society* (United States: State of University of New York press, 1994)
- Tim Ahli Tafsir di bawah pengawasan Syaikh Shafiyurrahman al-Mbarakfury, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2*, terj. Abu Ihsan al-Atsari, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006)
- Van Bruinessen, M. (Ed.). (2013). *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the 'Conservative Turn.'* ISEAS Publishing.
- Wildan, M. (2016). Aksi Damai 411-212, Kesalehan Populer, dan Identitas Muslim Perkotaan Indonesia. *Ma'arif*, 11, 188.
- W.H. Goodenough, *Comment on Cultural Evolution*, (Daedalus, 1961)
- Wach, Joachim, *The Comparative Study of Religion* (New York: Colombia University Press, 1958)
- Wach, Joachim, *The Comparative Study of Religion*, (Columbia University Press: New York, 1958)
- Will, Kymlicka, "Misunderstanding Nationalism" dalam *Theorizing Nationalism*, ed. R. Beiner, (Albany: State University of New York, 1999)
- Yaya Suryana, & H.A.Rusdiana, *Pendidikan Multikultural: Konsep, Prinsip dan Implementasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015)
- Yohani Fitri, *Melawan Kemiskinan: Kesaksian 7 Mantan Anak Asuh Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda*, (Medan: Yayasan Sultan Iskandar Muda kota Medan, 2017)
- Yusuf al-Qaradhawi, *Fatawa Mua'sirah, Jil.III, cet. V* (Kairo: Dar al-Arqam, 2005)
- Yusuf al-Qaradhawi, *Fikih Maqashid Syariah, moderasi Islam antara aliran tekstual dan aliran liberal*, (terj) Aris Munandar Riswanto, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007)
- Yusuf al-Qaradhawi, *Fikih Prioritas, sebuah kajian baru berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah*, (terj) Bahruddin F. (Jakarta: Robbani Press,

1999)

Yusuf, Abdul Wadud, *Tafsir al-Mu'minin*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt)

Zainal Arifin, *Pendidikan Multikultural-Religius untuk Mewujudkan Karakter Peserta Didik yang Humanis-Religius* (Jurnal Pendidikan Islam Vol 1 No 1 Juni 2012, Faculty of Education and Teaching Science State Islamic University (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Zakiyudin Baidhawiy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta: Erlangga, 2005)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Dr. Fridiyanto, lahir di Muara Bungo, 19 Juni 1981. Riwayat pendidikan: Doktoral Manajemen Pendidikan Islam di Pascasarjana UIN Maliki Malang (2018); Magister Pendidikan Islam di Program Pascasarjana IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2007); Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris di Fakultas Tarbiyah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2004). Saat ini ia merupakan staf pengajar di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Fridiyanto dapat dihubungi melalui email: fridyanto131@gmail.com Karya tulis dapat dilihat di google scholar <https://scholar.google.com/citations?user=e0dtCMwAAAAJ&hl=id&oi=ao>

Dr. Faisal Riza lahir tanggal 7 Juni 1982. Riwayat pendidikan: Program doktor di Filsafat Islam UIN Sumatera Utara (2022); Magister Pemikiran Islam di Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara (2009), dan Sarjana Pendidikan Agama Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004). Dr. Faisal Riza bekerja sebagai staf pengajar di Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara. Kontak email: faisalriza@uinsu.ac.id, karya ilmiah bisa dilihat di link google scholar sebagai berikut, <https://scholar.google.com/citations?user=ZpVWMIYAAAAJ&hl=id&oi=ao>

Dr. Firmansyah, MA lahir tanggal 20 Februari 1985, riwayat pendidikan: Doktor Pendidikan Agama Islam Multikultural Program Pascasarjana Universitas Islam Malang (2021), Magister di Pendidikan Islam Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara (2013), dan Sarjana di Pendidikan Agama Islam di Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara (2009). Saat ini ia bekerja di Universitas Dharmawangsa Medan. Kontak email firmansyah@dharmawangsa.ac.id. Publikasi bisa dilihat di <https://scholar.google.co.id/citations?user=zq8NXNAAAAJ&hl=id&authuser=4>

